



**PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Garuda No.10 Kel. Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I Lubuklinggau - Sumatera Selatan
website: www.bappeda.lubuklinggaukota.go.id
Telp./Fax. 0733-325513



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 24 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. Bahwa adanya asumsi Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 perlu diubah; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5, Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 6); dan
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

2. Ketentuan Pasal (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

BAB VI : Penutup

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
Pada tanggal 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

RKPD Kota Lubuklinggau tahun 2021 merupakan pemfokusan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tahun 2021. Pemfokusan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023. Setelah RKPD disahkan, maka RKPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021. Selain itu, RKPD juga menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang kemudian menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021, mengalami **perubahan** pada tahun 2021 yang menyesuaikan dengan dinamika keuangan pemerintah pusat. Sehingga perlu dilakukan sinkronasi dan harmonisasi antara RKPD Tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterjemahkan dalam RPJMD Kota Lubuklinggau 2018-2023.

Terwujudnya Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau tahun 2021 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bappedalitbang selaku koordinator penyusunan, seluruh Perangkat Daerah, pimpinan Pemerintah Kota Lubuklinggau, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kota Lubuklinggau telah terlibat didalamnya. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya dalam mewujudkannya.

Lubuklinggau, 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

TTD

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Perjalanan dan Realisasi RPJMD.....	II-1
2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	II-2
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-3
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-9
3.3.3. Pembiayaan Daerah.....	III-14
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Sumsel dan RKPD Kota Lubuklinggau.....	IV-11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021	V-1
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021	V-19
5.2.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja	V-33
5.2.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja	V-33
5.2.3 Usulan Pembangunan Nasional (DAK)	V-33
5.2.4 Belanja Penanganan Pandemi Covid-19	V-33
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau Triwulan II Tahun Anggaran 2021	II-4
Tabel 2.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Tahun Sebelumnya	II-57
Tabel 2.4. Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	II-64
Tabel 2.5. Realisasi Triwulan II Tahun 2021 Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).....	II-64
Tabel 3.1. Tabel Kinerja Makro Pembangunan Daerah	III-3
Tabel 3.2. Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021	III-8
Tabel 3.3. Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021	III-14
Tabel 3.4. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021	III-15
Tabel 4.1. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-3
Tabel 4.2. Sinkronisasi RKPD Kota Lubuklinggau dengan RKP.....	IV-11
Tabel 4.3. Sinkronisasi RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD Tahun 2018-2023	IV-16
Tabel 5.1. Program Prioritas Daerah RKPD Tahun 2021	V-2
Tabel 5.2. Program dan Kegiatan Daerah RKPD Tahun 2021	V-35
Tabel 5.3. Program Kegiatan Penanganan Covid-19 Kota Lubuklinggau	V-141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020	III-1
Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Lubuklinggau 2020.....	III-2
Gambar 3.3. Sumber Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020.....	III-3

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2021 dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau 2005-2025, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 serta peraturan daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

Dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Terlebih dengan adanya pandemi wabah covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berakibat pada menurunnya aktivitas ekonomi untuk mengurangi tingkat penyebaran wabah tersebut.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perubahan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa perubahan RKPD sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);

29. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01); dan
31. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 04).

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, sebagai berikut :

1. Percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas: penanganan kesehatan; penanganan dampak ekonomi; dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*; dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2021 terhadap kemampuan fiskal daerah.
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai.
4. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspiran masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perubahan RKPD 2021, meliputi:
 - a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
 - b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 - 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2021;
 - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2021; dan
 - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2021.
 - c. Perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2021 serta prakiraan maju tahun 2021 untuk semua PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2021;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah untuk penanganan dampak wabah COVID-19 yang menjadi bencana nasional.
5. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, serta Sistematika Perubahan RKPD

BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2021

Bagian ini memuat hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah pemerintahan daerah sampai dengan Triwulan II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan kerangka keuangan daerah;

BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RJPMD;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat perubahan rencana prioritas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB 2

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 terbagi ke dalam 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
RKP Kota Lubuklinggau Tahun 2021**

NO	PRIORITAS	SASARAN
1	Pengembangan Pariwisata, perdagangan dan Industri Sebagai Pendorong Ekonomi	1. Meningkatnya pengembangan pariwisata
		2. Tersedianya konektivitas wilayah
		3. Meningkatnya layanan sistem transportasi perkotaan
		4. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
		5. Meningkatnya daya saing UKM
		6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan
2	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi	7. Meningkatnya pengembangan wilayah
		8. Terbentuknya kawasan industri
		9. Terselenggaranya infrastruktur pendukung kawasan industri
		10. Meningkatnya sinkronisasi pembangunan yang mengacu kepada RTRW
		11. Meningkatnya nilai investasi
3	Penyederhanaan Birokrasi untuk mendorong investasi	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		13. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel
		14. Meningkatnya kapasitas birokrasi
		15. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		16. Terciptanya keamanan data dan informasi
		17. Terwujudnya keterbukaan informasi publik
		18. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
4	Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas/ Berkarakter dan Merata	
5	Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Unggul	
6	Penguatan Jaring Pengaman Sosial Daerah	19. Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan
		20. Meningkatnya kualitas perumahan
		21. Meningkatnya kesempatan kerja

NO	PRIORITAS	SASARAN
7	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Penyehatan Lingkungan	22. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
		23. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan
		24. Meningkatnya sarana dan prasarana keciptakarya
		25. Terwujudnya usaha jasa konstruksi berkualitas
		26. Menurunnya pencemaran lingkungan hidup
		27. Meningkatnya Infrastruktur Dasar
8	Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah	28. Terwujudnya SDA yang Handal
		29. Meningkatnya produksi perikanan
		30. Meningkatnya Produktivitas Pertanian
		31. Terpenuhinya Pangan Masyarakat

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (4) disebutkan bahwa perubahan RKPD sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada tahun 2021 ini, adanya pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam upaya pemerintah Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2021 bertujuan untuk:

- 1) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 2) Konsistensi antara dokumen perencanaan;
- 3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- 4) Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan;

- 5) Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan
- 6) Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, index, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau
Triwulan II Tahun Anggaran 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Indeks Kesehatan Masyarakat					Dinas Kesehatan
Meningkatnya status kesehatan		Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	KH	4,1	1,9	1,54	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	KH	100	0,00	0%	Dinas Kesehatan
Meningkannya keselamatan ibu dan bayi	Kegiatan Penyediaan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (k4)	persen	100%	42%	42%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	79%	100%	126,6%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi	persen	96%	47%	49%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	persen	100%	38,2%	38,2%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	85%	100%	118%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Kn Lengkap)	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan ibu	Jumlah Pelaksanaan audit maternal perinatal	kl				Dinas Kesehatan
		bahan komunikasi informasi dan edukasi tentang audit maternal perinatal (peserta)					Dinas Kesehatan
		Terlaksananya ANC terpadu	kl				Dinas Kesehatan
		Bahan komunikasi informasi dan edukasi tentang ANC terpadu					Dinas Kesehatan
	Kegiatan Jaminan persalinan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan jaminan persalinan					Dinas Kesehatan
		jumlah pertemuan koordinasi jaminan persalinan	kl				Dinas Kesehatan
		Jumlah pertemuan koordinasi SHK	kl				Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu bersalin yang					Dinas Kesehatan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		mendapatkan pertolongan persalinan normal					
		Jumlah Ibu bersalin dengan resiko yang mendapatkan pertolongan persalinan.					Dinas Kesehatan
		Jumlah neonatal dengan resiko yang mendapatkan pertolongan.					Dinas Kesehatan
		Jumlah bumil resti yang mendapatkan perawatan					Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil/bersalin dengan resiko yang mendapatkan uang transport menuju fasyankes					Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil/bersalin/neonatal resti yang mendapatkan transport rumah sakit rujukan lanjutan (provinsi)					Dinas Kesehatan
		Jumlah sample SHK yang diperiksa oleh RS Cipto Mangunkusumo					Dinas Kesehatan
		Jumlah sampel SHK yang dikirim lewat ekspedisi Pengiriman Paket					Dinas Kesehatan
		Jumlah Petugas verifikasi Jampersal yang mendapatkan Honor					Dinas Kesehatan
		Jumlah koordinasi ke provinsi	kl				Dinas Kesehatan
		Jumlah Koordinasi ke Pusat	kl				Dinas Kesehatan
Meningkatnya perlindungan imunitas bayi dan ibu	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan anak sekolah usia pendidikan dasar (Kelas 1, dan Kelas 7, dan Kelas 9)	persen	100%	69%	69%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya status kesehatan masyarakat pada jenjang anak sekolah, usia produktif dan lansia	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Presentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	persen	100%	41,6%	41,6%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Presentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	persen	100%	50,38%	50,4%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Gizi		Prevalensi Balita gizi Buruk		1,3	0,0	0,0	Dinas Kesehatan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
Masyarakat							
		Prevalensi balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar	persen	100%	0%	0%	Dinas Kesehatan
Menurunnya Stunting dan wasting pada balita	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Prevalensi stunting pada balita	persen	15%	0,013	2	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting sangat pendek pada balita	persen	2,5	0,004	2,0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting pada baduta	persen	7,0	0,014	2,0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting sangat pendek pada baduta	persen	1,7	0,004	2,0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anak balita yang kurus (wasting)	persen	8,1	0,005	2,0	Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting sangat kurus pada balita	persen	1,4	0,001	2,0	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	persen	100%			Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita		Angka Kematian balita (Per 1000 balita)	Per 1000 balita	3	0,04	2	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	persen	100%	145,76%	145,76%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Gizi Ibu Hamil		Persentase anemia pada ibu hamil	persen	25%	8%	31,3%	Dinas Kesehatan
		Presentase Ibu hamil yang mendapatkan Fe	persen	100,0%	42%	42%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Presentase Puskesmas yang terakreditasi minimal utama		56%	22%	40%	Dinas Kesehatan
		Presentase Puskesmas Perkotaan yang Memiliki Gedung sesuai Standar	persen	30%	20%	67%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan yang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki SDMK sesuai standar	persen	100%	64%	64%	Dinas Kesehatan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
sesuai standar							
Jaminan Pelayanan kesehatan dasar penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan peningkatan sarana prasarana puskesmas (ASPAK)	persen	80%	57%	71%	Dinas Kesehatan
		Cakupan ketersediaan alkes di Puskesmas sesuai standar (ASPAK)	persen	40%	25,30%	63%	Dinas Kesehatan
		Presentase perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu	persen	100%	65,5%	65%	Dinas Kesehatan
		Presentase Pelaksanaan UHC	persen	98%	95,08%	97,02%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	80	84	104%	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota	Presentase Puskesmas beroperasi BLUD	persen	100%	90,0%	90,0%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan (Standar WHO)	\$	\$ 1,5	21%	14%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat secara benar		Persentase Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	persen	100%	24%	24%	Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan Sarana Apotik dan Toko Obat	persen	100%	16%	16%	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana Kefarmasian Puskesmas yang memenuhi standar kefarmasian	persen	100%	90%	90%	Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Kefarmasian Apotek yang memenuhi standar Kefarmasian	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi Farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase toko alat kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Presentase Penggunaan obat rasional di sarana kesehatan dasar pemerintah	persen	60%	0,60	100%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase TPM yang memenuhi standar kesehatan	persen	84%	77,2%	92%	Dinas Kesehatan
		Presentase TTUI yang memenuhi standar kesehatan	persen	93%	81,1%	87%	Dinas Kesehatan
		Kelurahan Stop BABS	persen	85%	100%	118%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS	persen	78%	104%	133%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga Belum Ber PHBS	persen	32%	18%	55%	Dinas Kesehatan
		Presentase Penyelenggaraan Air minum yang memenuhi syarat	persen	100%	93%	93%	Dinas Kesehatan
		Presentase Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan UKBM yang aktif	persen	95%	100%	105%	Dinas Kesehatan
		Cakupan UKBM Strata Aktif Mandiri	persen	39%	67%	172%	Dinas Kesehatan
		Presentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Olahraga	persen	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Pos UKM yang dilakukan Pembinaan	persen	100%	83%	83%	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Penanganan dan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						Dinas Kesehatan
Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase MBR Mendapatkan Akses Perumahan Subsidi	%	11,77	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Program pembangunan infrastruktur perkotaan / permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Memiliki Ketersediaan prasarana yang memadai	%	80	61,79	77,03	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program peningkatan	% Permukiman dengan realisasi	%	80	37,54	46,93	Dinas Perumahan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	capaian sarana dan utilitas permukiman yang memadai					dan Kawasan Permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat layanan administrasi perkantoran	%	100	50	50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pemilu		Persentase pemilih dalam pemilu	%	80,00	0,00	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Peran Serta Partai Politik		Persentase Partai Politik yang mengkampanyekan Pemilu	%	90	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Kesadaran Politik dan Demokrasi Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu	%	75	75	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Partai Politik	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Tim Verifikasi, Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Bantuan Pemerintah	org	7	100	1428,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Kelembagaan Partai Politik yang Menerima Bantuan	%	100	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Kualitas Partai Politik Dalam Berkampanye		Persentase Kelembagaan Partai Politik yang memenuhi syarat berkampanye	%	100	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat		Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa yang Mengikuti Pembinaan Politik	org	70	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah masyarakat yang memahami Kehidupan Berdemokrasi	org			#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya		Persentase Jumlah Golput	%	25			Badan Kesatuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan politik yang berbudaya							Bangsa dan Politik
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kemitraan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemilu		Jumlah kelembagaan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu	lembaga	5	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kerjasama Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu	%	90	100	111,1111111	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Optimalisasi Peran Serta Ormas/ LSM	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kelembagaan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu	Lembaga	5	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah buku profil dan data base parpol di kota Lubuklinggau	dokumen	16	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah anggota Ormas dan Niirlaba Lainnya yang mengikuti pembinaan pendidikan politik	org	150	100	66,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah dokumen data base ormas dan LSM di kota Lubuklinggau	dokumen	2	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Harmonisasi kehidupan beragama		Zero Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan	Persentase Kelompok/	%	79	79	100	Badan Kesatuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan solidaritas antar umat beragama					Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Wilayah Rawan Konflik Keagamaan	Wilayah	1	0	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah konflik yang tertangani oleh Tim Penanganan Konflik Sosial	konflik	3	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Anggota FKUB yang berperan aktif dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	org	10	10	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah konflik yang tertangani oleh Tim Penanganan Konflik Sosial	konflik	100	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Peran lembaga adat dalam pencegahan konflik sosial		% lembaga adat yang aktif	%	75	100	133,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah lembaga masyarakat adat yang aktif	Lembaga	10	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah forum pemuda yang aktif	Forum	2	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai lcor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya keamanan wilayah		Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	7,95	0	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya stabilitas keamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Persentase tindak kriminalitas yang terselesaikan	%	75	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						
		Tingkat kriminalitas		58	0	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penguatan Kelembagaan Kemitraan Pemerintah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kelembagaan kemitraan pemerintah yang aktif menangani konflik	Lembaga	5	5	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah anggota pengendali keamanan yang aktif dalam menjaga stabilitas keamanan	orang	216	216	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya penanganan konflik		Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Upaya Preventif Konflik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik	%	100	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Jumlah Aparat yang memiliki kemampuan deteksi dini ancaman stabilitas di Daerah	Aparat	101	101	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah potensi wilayah rawan konflik	Wilayah	10	25	-50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Pengurus FKDM yang berperan aktif dalam Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Lubuklinggau	org	40	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah dokumen pemetaan konflik diwilayah Kota Lubuklinggau	Dokumen	2	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Kajian pemicu konflik di Kota Lubuklinggau	Dokumen	1	1	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Pengembangan Nilai Wawasan Kebangsaan Masyarakat		Persentase kelembagaan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang memahami Ideologi dan wawasan kebangsaan	%	100	25	25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan		70	25	35,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	80	80	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pokja PPWK dan masyarakat yang terfasilitasi	%	80	80	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Aparat Birokrasi dan Pengurus Forum Mitra	Orang	50			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mengikuti jelajah Nusantara					
Meningkatnya Peran Forum wawasan kebangsaan		Jumlah forum kelompok masyarakat yang aktif	forum	1	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Pengurus FPK yang berperan aktif dalam Pembinaan Pembauran Kebangsaan di Masyarakat, terselenggaranya Jambore dan Dialog Pembauran	orang	20	25	125,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya keikutsertaan pemuda/pelajar, ormas dan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Mahasiswa, Pemuda/Pelajar, Ormas dan Masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan wawasan kebangsaan				#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kelompok	10			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya profesionalisme aparatur	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penilaian akuntabilitas Kinerja OPD		BB			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		75			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat kedisiplinan Aparatur		100	100	100,00	Badan Kesatuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
							Bangsa dan Politik
		Persentase Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM		0,7			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan yang berkualiyas baik dan tepat waktu	%	100	0	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang memiliki mobil dan mesin layak pakai	%	88,00%	3533,6%	40,154%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana sesuai Standar	%	62,16%	30,76%	49,49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran</i>	%	100	100	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia</i>	%	100	100	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jasa Administrasi Keuangan</i>	%	100	100	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik</i>	%	100	100	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	orang/klp	303	260	85,81	Dinas Sosial
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</i>	<i>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan</i>	<i>orang/klp</i>	<i>210</i>	<i>158</i>	<i>75,24</i>	Dinas Sosial

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	<i>Kabupaten/Kota</i>						
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran dan Orang Terlantar	Persen	100	100	100,00	Dinas Sosial
	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	<i>Jumlah orang terlantar yang dapat kembali ke daerah asal</i>	<i>orang</i>	<i>120</i>	<i>21</i>	<i>17,50</i>	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persen	49,62	43,06	86,77	Dinas Sosial
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial</i>	<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, ABH, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar</i>	Persen	<i>49,62</i>	<i>51</i>	<i>103,22</i>	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	93,41	90,70	97,10	Dinas Sosial
	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial di luar Panti</i>	Persen	<i>90,91</i>	<i>86,22</i>	<i>94,84</i>	Dinas Sosial
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Fakir Miskin</i>	Persen	<i>92,83</i>	<i>91,83</i>	<i>98,92</i>	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	Persen	100	76,47	76,47	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan jaminan	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Sosial

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	dan Sosial Kabupaten/Kota	sosial					
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	orang	42	49,00	116,67	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat layanan administrasi Keuangan	Persen	93			Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan	Tingkat layanan administrasi Keuangan	Persen	99			Dinas Sosial
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi Kepegawaian	Persen	95			Dinas Sosial
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran	Persen	92			Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Persen	94			Dinas Sosial
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	94			Dinas Sosial
Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,15%	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Lulus uji Kompetensi	%	32,00%	53,33%	166,67%	Dinas Ketenagakerjaan
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang dilatih	orang	400	176	44,00	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	28,80%	1,82%	6,31%	Dinas Ketenagakerjaan
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	%	100	100	100,00	Dinas Ketenagakerjaan
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Job Fair	%	40			Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis		Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	%	16,7%	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Menerapkan UMP	%	26,25%	19,06%	72,61%	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase Angka Sengketa Pekerja Pengusaha Per tahun	%	2,5%	0,99%	39,60%	Dinas Ketenagakerjaan
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah mendapatkan Pembinaan Hubungan Industrial	%	10	4,95	49,50	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Peranjan Bersama (PB) tripartit	kasus	10	4	40	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya kinerja organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinas Ketenagakerjaan
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	64,95	68,50	105	Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
Menurunnya pencemaran lingkungan hidup		Indeks pencemaran air	Indeks	67,05	68,75	103	Dinas Hidup	Lingkungan
		Indeks pencemaran udara	Indeks	82,59	85,71	104	Dinas Hidup	Lingkungan
		Indeks tutupan lahan	Indeks	28,70	36,24	126	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya kualitas air		Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	Persen	60	100,00	166,67	Dinas Hidup	Lingkungan
		Persentase sungai yang Memenuhi baku mutu dan keamanan	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	Persen	60	100	166,67	Dinas Hidup	Lingkungan
		Tingkat penurunan emisi GRK	Persen	2			Dinas Hidup	Lingkungan
		Persentase luas lahan kritis	Persen	7,98			Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase cakupan titik pantau air dan udara	Persen	85	81,25	95,59	Dinas Hidup	Lingkungan
		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		Persentase kendaraan bermotor lulus uji emisi	Persen	50	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<i>Persentase sungai yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	7	87,72	Dinas	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
							Hidup	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pengolahan limbah		<i>Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL</i>	Persen	35	16,13	46,09	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS LB3</i>	Persen	22	8,06	36,64	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup</i>	Persen	35	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<i>Persentase usaha / kegiatan yg memenuhi baku mutu</i>	Persen	35	48,13	137,51	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	<i>Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup</i>	Persen	35	48,13	137,51	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase pencemaran emisi tidak bergerak</i>	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3)	<i>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap kebijakan B3 dan LB3</i>	Persen	22	8,06	36,64	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS limbah B3</i>	Persen	22	8,06	36,64	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase air tanah yang</i>	Persen	60	100	166,67	Dinas	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
		<i>memenuhi baku mutu</i>					Hidup	
		<i>Tingkat penurunan emisi GRK</i>	Persen	2	-	#VALUE!	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	-	#VALUE!	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	<i>Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL</i>	Persen	35	16	46,09	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	Persen	100	100	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	Pengaduan	8	8	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya validitas informasi data bidang sumber daya air		<i>Persentase ketersediaan data bidang sumber daya air ter-update</i>	Persen	30	13,85	46,17	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program perencanaan lingkungan hidup	<i>Persentase data/dokumen LH</i>	Persen	100	100	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota	<i>Persentase ketersediaan data bidang sumber daya air ter-update</i>	Persen	30	13,85	46,17	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	<i>Persentase ketersediaan data KLHS</i>	Persen	30	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<i>Persentase air permukaan yg memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
	hidup							
		<i>Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	60	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Tingkat penurunan emisi GRK</i>	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<i>Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL</i>	Persen	35	16,13	46,09	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya kualitas udara		Tingkat penurunan emisi GRK	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Menurunnya sumber emisi tidak bergerak		Tingkat pencemaran emisi tidak bergerak	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya aksi mitigasi perubahan iklim		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	Persen	1	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Menurunnya gas buang kendaraan bermotor		Jumlah kendaraan lulus uji emisi	kendaraan	50	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	<i>Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	60	100	166,67	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Tingkat penurunan emisi GRK</i>	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<i>Persentase cakupan titik pantau air dan udara</i>	Persen	85	81,25	95,59	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>RAD aksi mitigasi yang</i>	Kegiatan	1	0	0,00	Dinas	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
		<i>dilaksanakan</i>					Hidup	
		<i>Persentase kendaraan bermotor lulus uji emisi</i>	Persen	50	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya tutupan lahan		<i>Persentase luas tutupan lahan</i>	Persen	80	72	90,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya ruang terbuka hijau		<i>Persentase luasan RTH</i>	Persen	30	22	73,33	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	<i>Persentase luas tutupan lahan</i>	Persen	80	72	90,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	<i>Persentase luasan RTH</i>	Persen	30	22	73,33	Dinas Hidup	Lingkungan
Menurunnya luas lahan kritis		<i>Luas lahan kritis</i>	Ha	3201	3201	100	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	<i>Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	60	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Tingkat penurunan emisi GRK</i>	Persen	2	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<i>Persentase sungai yang memenuhi baku mutu</i>	Persen	61	81,25	133,20	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase luas lahan kritis</i>	Persen	7,98	7,98	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Menurunnya volume timbulan sampah		<i>Persentase timbulan sampah</i>	Persen	77	77	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan		<i>Persentase luas area yang terlayani</i>	Persen	75	65	86,67	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pengelolaan	<i>Persentase luas area yang</i>	Persen	75	65	86,67	Dinas	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
	sampah	<i>terlayani</i>					Hidup	
		<i>Persentase volume sampah yang di reuse</i>	Persen	0,1	0,1	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase volume sampah yang direcycle</i>	Persen	1	1	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat</i>	Kegiatan	1	1	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya nilai guna sampah		<i>Persentase volume sampah yang di Reuse</i>	Persen	0,1	0,1	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
		<i>Persentase volume sampah yang di Recycle</i>	Persen	1	1	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru		<i>Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat</i>	Kegiatan	1	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		<i>Persentase komunitas / penggiat lingkungan hidup yang aktif</i>	Persen	46	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya komunitas sadar lingkungan		<i>Jumlah Komunitas lingkungan</i>	Komunitas	40	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	<i>Persentase komunitas/penggiat lingkungan hidup yang aktif</i>	Persen	46	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	<i>Persentase komunitas/penggiat lingkungan hidup</i>	Persen	46	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	Persen	100	100	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
	Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	Pengaduan	8	8	100,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<i>Persentase jumlah masyarakat hukum adat yang aktif</i>	Persen	100	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<i>Persentase jumlah masyarakat hukum adat yang ada</i>	Persen	100	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat		<i>Jumlah media edukasi dan komunikasi</i>	Media edukasi dan komunikasi	43	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	<i>Persentase penghargaan lingkungan hidup</i>	Persen	100	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
	Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	<i>Persentase media edukasi dan komunikasi</i>	Persen	28	0	0,00	Dinas Hidup	Lingkungan
Meningkatnya kualitas sumber daya dan kinerja aparatur bidang lingkungan hidup yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan good governance							Dinas Hidup	Lingkungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	<i>Tingkat pelayanan administrasi perkantoran</i>					Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>					Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	<i>Rata-rata jasa transaksi keuangan</i>					Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah						Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah						Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						Dinas Lingkungan Hidup
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	jenis layanan	11	11	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penataan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah penataan pendaftaran penduduk</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran	<i>jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran sesuai dengan Kebutuhan</i>	item	2	0	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Penduduk sesuai dengan Kebutuhan						
	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah jenis layanan pencatatan sipil</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil</i>	Orang/bln	1	0	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kab/Kota dalam penertiban pengelolaan info administrasi kependudukan	<i>Jumlah Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kab/Kota dalam penertiban pengelolaan info administrasi kependudukan</i>	kali	40	4	10,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah fasilitasi terkait informasi administrasi kependudukan</i>	item	5		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	<i>Jumlah penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan</i>	Orang /bln	21/6	21/02	99,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah peserta sosialisasi terkait pengelolaan informasi adm kependudukan</i>	orang	80		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	<i>Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat</i>	item	5	5	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	<i>Jumlah penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	Orang /bln	20/12	20/12	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi adm kependudukan	<i>Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi adm kependudukan</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi adm kependudukan</i>	semstr	2	0	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Profil Kependudukan	<i>Jumlah penyusunan buku profil kependudukan</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	<i>Jumlah penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain</i>	buku	100	0	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase pemenuhan layanan administrasi keuangan</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PD</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan	Rasio angka harapan hidup perempuan dengan laki-laki	Nilai	1,06	1,06	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	perempuan						dan Pemberdayaan Masyarakat
		Rasio harapan lama sekolah perempuan dengan laki-laki	Nilai	1,05	1,06	101,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Rasio rata-rata lama sekolah perempuan dengan laki-laki	Nilai	1	0,95	94,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Rasio pengeluaran per kapita perempuan dengan laki-laki	Nilai	1	0,74	74,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	50	48,95	97,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	50	53,06	106,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Keterlibatan perempuan di parlemen			10		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan yang mengalami kekerasan per 10.000 perempuan	Nilai	1,50			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya	Program Pemenuhan	Persentase komponen	%	50	42,86	85,71	Dinas Pemberdayaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
pemenuhan hak anak	hak Anak (PHA)	kelembagaan kota layak anak sesuai standar					Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase komponen pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sesuai standar	%	50	33,33	66,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase lingkungan keluarga sesuai standar	%	50	33,33	66,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase pengasuhan alternatif sesuai standar	%	50	44,44	88,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase pemenuhan kualitas kesehatan dasar dan kesejahteraan	%	50	40	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah dokumen profil anak update dan terpublikasi	Dok	1	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase layanan pengasuhan anak bagi orang/keluarga yang memperoleh layanan sesuai standar	%	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program perlindungan khusus anak	Rasio anak yang mengalami kekerasan per 1.000 jumlah anak	Nilai	0,3	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pemerintahan lebih dari 102	%	21	0	0	Masyarakat
		Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pengelolaan kewilayahan lebih dari 79	%	21	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pengelolaan kemasyarakatan lebih dari 170	%	21	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	50	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Rasio	2,19	1,784035328	81,46	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengendalian Penduduk	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	%	90	50	55,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan	%	90	50	55,56	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	Jenis	3	3	100,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Kabupaten/ Kota						
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	% <i>Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)</i>	%	79,5	57,30223124	72,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Kepesertaan BKR di Wilayahnya	%	55	45,96	83,56	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	50	50,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal , non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	<i>Sekolah</i>	3	3	100,00	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kelaurga Sejahtera	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	78	61,87924995	79,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	% Data KKBPk yang akurat dan tepat waktu	%	90	50	55,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50	50,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD	
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan	%	90	50	55,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya	Tingkat kedisiplinan aparatur					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daeah					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Layanan Sistem Transportasi Perkotaan		Tingkat Layanan Lalu Lintas Jalan Yang Menghubungkan Pusat - Pusat Kegiatan	Ratio	0,4	0,44			
		Tingkat Layanan Angkutan Yang Menghubungkan Pusat - Pusat Kegiatan	Ratio	0,53	0,4			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		Kecepatan Rata - Rata Kendaraan	Km/Jam	40	41,92	105%	Dinas Perhubungan
			Jumlah Angka Kecelakaan Angkutan Jalan	Laka	40	-	0%	Dinas Perhubungan
			IKM Layanan Transportasi Angkutan Perkotaan	Indeks	85	81,20	96%	Dinas Perhubungan
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum	Wilayah	4			Dinas Perhubungan	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	%	81	58,00	71,60	Dinas Perhubungan	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe C	%	25	38,00	152,00	Dinas Perhubungan	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Ruang Parkir Sesuai Standar Perparkiran	%	19	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	IKM Layanan PBKB	Indeks	85	81,20	95,53	Dinas Perhubungan
		Jumlah KBWU Lulus Uji	Unit	4200	1539,00	36,64	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas	%	1,13	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
		Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum	%	14	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kelengkapan Keselamatan Berkendara	Kend	25	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Angkutan Jalan	%	13	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Umum	Dokumen	1	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dengan Kualitas Baik	%	100	50,00	50,00	Dinas Perhubungan
		Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	%	100	25,00	25,00	Dinas Perhubungan
		Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	25,00	25,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Sarana dan	%	100	0,00	0,00	Dinas Perhubungan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Prasarana Dalam Kondisi Baik					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Terpenuhi	%	100	50,00	50,00	Dinas Perhubungan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	56,52	56,52	Dinas Perhubungan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	100	9,04	9,04	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	12,22	12,22	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<i>Nilai Self Assesment SPBE</i>	Indeks	3	2,75	91,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Sarana Aksesibilitas Data dan Informasi</i>	%	100	46,14	46,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	<i>Nilai Layanan Mandiri SPBE</i>	Nilai	1,2			Dinas Komunikasi dan Informatika

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Kabupaten/Kota						
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Infomasi	<i>Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kategori Sistem Elektronik</i>	Nilai	14	13	92,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Indeks Keamanan Informasi (KAMI) kategori status Kesiapan</i>	Nilai	100	80	80,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rasio data dan informasi yang diamankan</i>	Rasio	0,45	0,35	77,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Sarana dan Prasarana Persandian</i>	%	35	0	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Ketrebukaan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<i>Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan Data dan Informasi</i>	Nilai	90	81,25	90,28	Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Persentase Data dan Informasi Publik yang dipublikasikan</i>	%	75,00	70,00	93,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Rasio Sentimen Positif dan Negatif</i>	Rasio	2:1	1,35:1	67,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Sarana Aksesibilitas Data dan Informasi</i>	%	100	20	20,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<i>Data Statistik yang dipublikasikan</i>	%	75	20	26,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Data dan Informasi Siap dipublikasikan</i>	%	100	31,15	31,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	Nilai	AA	A	#VALUE!	Dinas Komunikasi

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						dan Informatika
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu</i>	%	100	0	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	%	100	25	25,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase Pakian Dinas yang terpenuhi</i>	%	100	92,75	92,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum/Perkantoran</i>	%	100	31,61	31,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi</i>	%	100	63,48	63,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	37,18	37,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara</i>	%	100	17,4	17,40	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang di nilai kesehatannya	25 Koperasi	25	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase dokumen pendirian dan perizinan koperasi yang di verifikasi	100%	100			Dinas Koperasi dan UKM
		Rata - rata bobot skor penilaian manajemen kelembagaan	1,8%				Dinas Koperasi dan UKM
	Pengawas dan	Jumlah Koperasi yang di nilai	30 Koperasi	30	-	-	Dinas Koperasi dan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	pemeriksaan koperasi						UKM
		Koperasi binaan yang sehat dan mandiri	30 Orang	30	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Tersedianya tenaga pendamping koperasi dan UKM	2 Orang	2	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Tingkat kelengkapan Data Koperasi	85,00%				Dinas Koperasi dan UKM
	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi yang RAT	56%				Dinas Koperasi dan UKM
	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi dengan pengurus sertifikasi profesi	15 Koperasi	15	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Tingkat Partisipasi dalam RAT	90,00%				Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi binaan yang memiliki keterampilan mengelola keuangan	30 Orang	30	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Pemahaman pembiayaan Koperasi	30 Orang	30	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Promosi Usaha Koperasi	1 Kali	1	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya Daya Saing UKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Wirasaha Pemula	2%				Dinas Koperasi dan UKM
	Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di fasilitasi untuk naik kelas	50 UMKM	50	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		Pelaku Usaha dapat bersaing di tengah pasar global	30 UMKM	30	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
		UMKM yang memiliki keahlian dalam manajemen usaha	30 UMKM	30	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase OKP yang aktif	%	85	75	88	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Wirasaha Muda	%	12	18	147	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Pemuda yang Aktif dalam OKP	%	43	20	47	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Persentase Pemuda Sukarelawan	%	3	3	111	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang dibina	org	70		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		sertifikat, kategori KLP	srtfkt	1	-	#VALUE!	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda dan masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Upaya pencegahan Narkoba	org	80	-	#VALUE!	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Partisipasi Pemuda dalam kegiatan jambore TK. Provinsi dan Nasional	org	30	-	#VALUE!	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pemuda Pelopor	org	6	6	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kapabilitas Pemuda dalam OKP		Persentase Pemuda Kader yang Berprestasi	%	37,0	30,0	81,08	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kapasitas Pemuda Sukarelawan		Persentase Pemuda yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Sukarelawan	%	5,8	5,4	93,10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Komunitas Pemuda Sukarelawan		Jumlah Komunitas Pemuda Sukarelawan	kom	5,0	5,0	100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Akses Permodalan Wirausaha		Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Akses Permodalan	org	155,0	148,0	95,48	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan wirausaha	org	20,0	20,0	100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang telah mendapatkan pembinaan	okp	31	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		% OKP yang mempunyai legalitas kelembagaan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pemuda Kader Berprestasi					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Tenaga Konsuler					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Tata Kelola Lembaga OKP		% OKP yang mempunyai legalitas kelembagaan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kapabilitas Pemuda dalam OKP		Persentase Pemuda Kader yang Berprestasi					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase pramuka aktif	%	10	7	69	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka Aktif	org	250	220	88	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kapasitas Pemuda Sukarelawan		Persentase Pemuda yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Sukarelawan	%	5,80	5,40	93	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Komunitas Pemuda Sukarelawan		Jumlah Komunitas Pemuda Sukarelawan	kom	5,00	5,00	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Cabang Olahraga		Jumlah Cabor Unggulan Daerah	cabor	5,00	4,00	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Minat Olahraga Masyarakat		Jumlah Komunitas Olahraga yang Aktif	kom	20,00	22,00	110	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Kompetisi yang diikuti	kom	38	80	211	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat Kecukupan Sarana dan	%	73	49	66	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Prasarana Olahraga publik					
Meningkatnya Kompetensi SDM Keolahragaan		Jumlah Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikasi.	org	30,00	25,00	83,33	dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Aksesibilitas Olahraga Masyarakat		Tingkat Kecukupan Sarana Olahraga Publik/Kec	%	73,33	66,70	90,96	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Keikutsertaan Kompetisi		Jumlah Kompetisi Olahraga yang Diikuti					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Aksesibilitas Olahraga Bagi Masyarakat		Tingkat Kecukupan Sarana Olahraga Publik/Kec					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit Muda	org	200	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Cabor Olahraga Prestasi yg dibina	cabor	10	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Pembibitan Atlit		Jumlah Atlit Muda	org	200	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Atlit Berprestasi					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah atlit	atlit	100	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Cabang Olahraga	cabor	10	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi.					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Masyarakat		Jumlah Komunitas Olahraga Rekreasi					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah yang Mengikuti Olahraga					Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
		Tradisional					dan Olahraga
		Jumlah Atlit Disabilitas					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pemasalan Olahraga Bagi Masyarakat		Tingkat Pertumbuhan Ruang Publik Olahraga Massal					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah OPD yang mengikuti senam Kesegaran Jasmani	OPD	55	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Keikutsertaan OPD, FKPD, BUMD dan Pelajar dan Masyarakat dalam Olahraga rekreasi	org	350	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan olahraga	cabor	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Masyarakat		Jumlah Komunitas Olahraga Rekreasi					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	95			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah					dan Olahraga
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Aksesibilitas Membaca Masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Ruang Baca Publik		100	7,00	7,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Layanan Perpustakaan		100	70	70,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lomba Kegemaran Membaca		100	20	20,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Tata Kelola Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Inaktif yang dialihmediakan	%	40	8,3	20,83	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase PD yang mengimplementasikan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi		40	25	62,50	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	44,00	44,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi		100	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	78,00	78,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	43,00	43,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	39,00	39,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	25,00	25,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Tercukupinya Kebutuhan Pangan Asal Ikan		Persentase Peningkatan Ketersediaan Ikan	%	5			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	Kg	4.331.059	1.286.868,0	29,713	Dinas Perikanan
		Persentase Kelompok Budidaya yang Naik Kelas	%	93,75	87,4	93,180	Dinas Perikanan
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil						
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg.Kap/tahun	43	19	45,235	Dinas Perikanan
Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah		%	12,18	-45,26	7,688	Dinas Perikanan	
		Persentase produk perikanan yang memenuhi standarisasi	%	70,00			Dinas Perikanan
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil						Dinas Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Dinas Perikanan
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan						Dinas Perikanan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat terlaksananya penunjang kinerja perangkat daerah					Dinas Perikanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi a Perangkat Daerah	Dokumen				Dinas Perikanan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Jasa Keuangan Perangkat Daerah (%)					Dinas Perikanan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Kepegawaian (%)					Dinas Perikanan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Umum Perkantoran (%)					Dinas Perikanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik Daerah yang disediakan					Dinas Perikanan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					Dinas Perikanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Miik Daerah yang dipelihara					Dinas Perikanan
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	115.000	36.600	31,83	Dinas Pariwisata
		Jumlah pengunjung hotel			15.160		Dinas Pariwisata
		Jumlah pengunjung destinasi			21.440		Dinas Pariwisata
Meningkatnya Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase potensi wisata menjadi destinasi wisata	%	30	20	66,67	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Fasilitas Daya Tarik	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yg memiliki fasilitas layak fungsi	Destinasi	3	2	66,67	Dinas Pariwisata

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
Pariwisata							
Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat Kepuasan Wisatawan	Skor	85	79,95	94,06	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Produk Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk wisata unggulan daerah	Produk	2	1	50,00	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Usaha Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah usaha pariwisata	Usaha	315	303	96,19	Dinas Pariwisata
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah KEL.tani yang menerapkan tehnologi	KLP	62	24	38,71	Dinas Pertanian
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya produktifitas tanaman utama	Ton	15,3	5	32,68	Dinas Pertanian
		Produktifitas Tanaman Holtikultura	Ton	56,6	2	3,53	Dinas Pertanian
		Produktifitas Perkebunan	Ton	6,1	2	32,79	Dinas Pertanian
		Produktifitas Tanaman Biofarmika	Ton	11,3	4	35,40	Dinas Pertanian
		Produktifitas Peternakan	Ton	1980	300	15,15	Dinas Pertanian
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Ratio Kecukupan Bibit Benih Unggul Pertanian Perkebunan	Persen	70	70	100,00	Dinas Pertanian
		Tingkat Ketersediaan Benih Tanaman Hortikultura	btg	5000	5000	100,00	Dinas Pertanian
		Luas Lahan Penelitian Pertanian	HA	2	2	100,00	Dinas Pertanian
		Jumlah Pestisida dan Herbisida	Jenis	10	10	100,00	Dinas Pertanian
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Tingkat Ketersediaan Bibit/Benih Pertanian/Perkebunan	Persen	80	80	100,00	Dinas Pertanian

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan Bibit Benih Pertanian	Btg	7000	7000	100,00	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Pertanian Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pertanian berkualitas	Persen	80	80	100,00	Dinas Pertanian
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Pertanian Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pertanian berkualitas					Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi irigasi Tanah dangkal per tahun	Unit	1	1	100,00	Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Irigasi Embung per tahun	Unit	2	2	100,00	Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani per tahun	Unit	3	3	100,00	Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Srana Prasarana Di RPH Yang Terpelihara	Unit	1	1	100,00	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio cakupan binaan kelompok tani	Org	65	65	100,00	Dinas Pertanian
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Terhadap Jumlah Kelompok tani	Org	65	65	100,00	Dinas Pertanian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Perencanaan,	Jumlah Laporan Kinerja yang	Jenis	4	4	100,00	Dinas Pertanian

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Baik					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Bulan	14	3	21,43	Dinas Pertanian
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Dinas Pertanian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Persen	100	50	50,00	Dinas Pertanian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Jasa Pendukung Urusan Pemerintah	Persen	100	100	100,00	Dinas Pertanian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Persen	80	80	100,00	Dinas Pertanian
		% Pertumbuhan Neraca Perdagangan	%	1.933	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Perumbuhan Sektor Perdagangan		Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	16,77	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perentase Sarana dan Prasarana Pasar yang dalam Kondisi Baik	%	100	100,00	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana yang di bangun dan Jumlah Sarana yang di kelola	%	100	100,00	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Transaksi Komoditi Perdagangan Lokal	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya promosi produk unggulan daerah					Dinas Perdagangan dan Perindustrian

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP (Unit Takat Timbang dan Perlengkapan lainnya) yang Tertib Ukur	%	100	100	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pengawasan dan UTTP yang ditera/tera ulang	%	100	100	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang Mengikuti Pameran	%	100	100	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pameran yang di ikuti	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Terciptanya Kesiapan Kawasan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Kesiapan Lahan Kawasan Industri dan Pergudangan	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan kawasan Industri					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.51	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Pengembangan IKM		Jumlah Indutri Naik Kelas	IKM	12			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang Mengikuti Pameran	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pameran yang di ikuti	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase ketersediaan dokumen Pendukung teknis Pengembang Kawasan	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penyusunan dan	Tersedianya dokumen	%	100			Dinas Perdagangan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan Pembangunan kawasan Industri					dan Perindustrian
		Indeks Pengeluaran	Indeks	0,803		0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting		Tingkat inflasi harga pokok dan penting	%	2,25			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Kecukupan Barang Pokok dan Penting	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Termonitornya dan terkendalinya harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	%	100	0	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Termonitornya dan terkendalinya Penyimpanan, Distribusi, dan Pelebelan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Layanan Adminstrasi Perkantoran	%	100	27,67	28%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelyanan Administrasi Keuangan	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Administrasi	Terpenuhinya Pelayanan	%	98			Dinas Perdagangan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian					dan Perindustrian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	%	98			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penguasaan Barang Milik Daerah	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok / lembaga masyarakat yang Aktif	%	90	83,70	93,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sosial / kegamaan masyarakat yang terlaksana	%	80			Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		Persentase kelompok masyarakat aktif yang melaksanakan program pembangunan	%	80			Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		Persentase komunitas masyarakat yang aktif terlibat dalam musyawarah pembangunan	%	80			Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	%	100	100,00	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pelayanan Kelurahan					Kecamatan Lubuklinggau Barat I

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	%	80	80,00	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	%	85,0	25,00	29%	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase Kelurahan yang menerapkan Standart Pelayanan	%	100	100,00	100%	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	%	100	100,00	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	%	85,0	25,00	29%	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase Kelurahan yang menerapkan Standart Pelayanan	%	100	100,00	100%	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	%	100	100,00	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelompok/ lembaga masyarakat yang aktif	%	80,00%	50,00%	63%	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Meningkatnya Profesionalitas	Program Penyelenggaraan	Prosentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	%	100,00%	100,00%	100%	Kecamatan Lubuklinggau Utara I

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
Penyelenggara Pelayanan	Pemerintah dan Pelayanan Publik						
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	%	100	79,82	79,10	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	% Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan	%	100	100,00	79,07	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	%	100	70,00	70,00	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	25,00	79,07	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	%	85,0	25,00	29%	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase Kelurahan yang menerapkan Standart Pelayanan	%	100	100,00	100%	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	%	100	100,00	100,00	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	20,63	20,63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan bendahara penerimaan tepat waktu	%	85	62,5	73,53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan bendahara pengeluaran tepat waktu	%	85	50,00	58,82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
							Daerah
		Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penerapan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi	%	75	75	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu	%	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Aset Daerah dikelola dengan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Penambahan Nilai Aset Daerah	%	9	8,19	91,0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	71,43	71,43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan OPD	Persentase	80	74,34	92,93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kepatuhan ASN terhadap Pencegahan Korupsi		Indeks Kompetensi ASN	indeks	15	10,48	69,87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	Persentase	100		0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya profesionalisme aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Indeks Pengembangan ASN	%	46,15	36,55	79,20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks Kualifikasi bobot tertinggi	Indeks	25	25		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mengoptimalkan	Program Penunjang	Persentase Pemenuhan Layanan	100%	100%	21,78%	22%	Badan Pengelola

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
Pelayanan Administrasi	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintah daerah					Pajak dan Retribusi Darah
Mengoptimalkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	94,41%	94%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Meningkatnya kinerja OPD Pemungut retribusi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pencapaian target retribusi perangkat daerah	100%	100%	10,35%	10%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Meningkatnya peranan masing-masing stakeholder dalam laporan realisasi			100%	100%	40,96%	41%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Meningkatnya Regulasi tentang retribusi daerah yang disempurnakan			100%	100%	20,00%	20%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Mengoptimalkan Kedisiplinan Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0,00%	0%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Aparatur yang Telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PIM	100%	100%	0,00%	0%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
		Presentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	100%	100%	0,00%	0%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
Meningkatnya kualitas tata kelola pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Efisiensi PAD	%	2,5	0,45	18%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
		Biaya yang dikeluarkan untuk Pemungutan PAD			93.353.750		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
		Realisasi Penerimaan PAD			20.817.684.113		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah
		Persentase WP membayar pajak Tepat waktu	%	75	24,73	33%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		Tahun 2021			OPD
		INDIKATOR	SATUAN	Target 2021	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d. TW II	
							Darah
		Realisasi WP membayar pajak tepat waktu			12.768.145.493		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Target Realisasi WP membayar pajak tepat waktu			51.631.946.287		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Realisasi Pajak Daerah	rupiah	51.631.946.287	12.768.145.493	25%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Jumlah Realisasi Pajak Daerah			12.768.145.493		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Target Realisasi Pajak			51.631.946.287		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Realisasi pendapatan baru	%	75	16,81	22%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Realisasi Pendapatan Baru			3.285.634.131		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Target Pendapatan Baru			19.550.000.000		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Rata-rata peningkatan WP baru perwilayah	%	75	16,80	22%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Jumlah WP baru perwilayah			1.157		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Jumlah WP baru perwilayah Tahun N-1			6.886		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2019			2020			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat												
1	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,693	0,696	0,698	>100	0,7	0,701	>100	0,711	98,59	Meningkat	Belum tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas												
2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,749	0,749	0,754	>100	0,75	0,758	>100	0,751	>100	Meningkat	Telah tercapai
3	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>												
3	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	72,19	80,86	60,6	74,94	82,85	75,77	91,45	89,07	85,07	Menurun	Belum tercapai
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif												
4	Nilai ICOR	Nilai	8,02	8,3	8,61	96,27	7,62	8,61	87,01	6,95	76,12	Menurun	Belum tercapai
5	Meningkatnya neraca perdagangan daerah												
5	Neraca Perdagangan (ekspor-impor)	%	1,923	1,926	-1,805	-93,72	1,93	-1,805	-93,52	1,94	-93,04	Menurun	Belum tercapai
6	Meningkatnya pengembangan wilayah												
6	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	Kawasan	0	0	0	100	1	0	0,00	3	0,00	Tetap	Belum tercapai
7	Terbentuknya sektor industri												
7	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	Kluster	0	0	0	100	1	0	0,00	2	0,00	Tetap	Belum tercapai
8	Meningkatnya pengembangan pariwisata												
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	11,79	13,15	4,42	33,61	13,97	14,22	>100	16,84	84,44	Meningkat	Belum tercapai

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2019			2020			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
9	Menurunnya pengangguran												
9	Tingkat pengangguran	%	4,5	4,3	4,66	91,63	4,1	7,41	19,27	3,5	-11,71	Menurun	Belum Tercapai
10	Meningkatnya daya beli masyarakat												
10	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,786	0,792	0,795	>100	0,797	0,787	98,75	0,814	96,68	Meningkat	Belum tercapai
11	Meningkatnya kualitas perlindungan social												
11	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	2,09	2,05	2,21	92,20	2,00	2,20	90,00	1,87	82,35	Menurun	Belum tercapai
12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,55	0,54	0,59	90,74	0,53	0,54	98,11	0,49	89,80	Menurun	Belum tercapai
12	Menguatnya ketahanan pangan daerah												
13	Rasio kecukupan pangan	Rasio	0,8	0,95	0,79	83,16	1,00	1,00	100,00	1,14	87,72	Meningkat	Belum tercapai
13	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman												
14	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	%	0	3,76	18,38	>100	7,52	8,74	>100	18,79	46,51	Meningkat	Belum tercapai
14	Meningkatnya infrastruktur dasar												
15	Persentase insfrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	%	60	63	36,05	57,22	66	59,83	90,65	75	79,77	Menurun	Belum tercapai
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan												
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	75	80,4	>100	75,00	80,40	>100	75	>100	Meningkat	Telah tercapai
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik												
17	Indeks Pelayanan	Indeks	2,57	2,86	3,36	>100	3,14	3,36	>100	3,98	96,48	Menurun	Belum

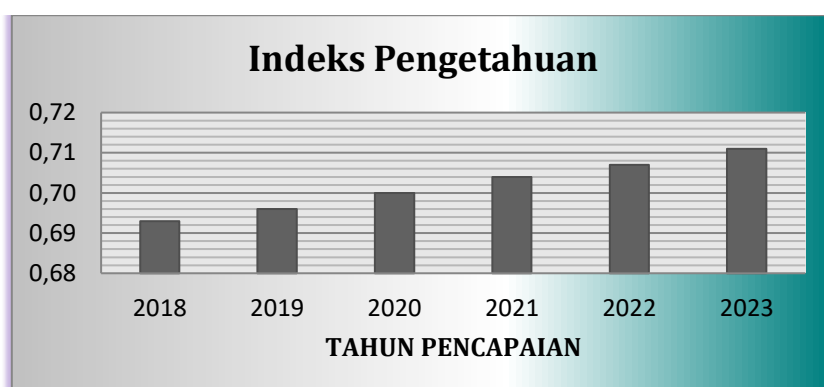
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2019			2020			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Publik (IPP)												tercapai
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	73	76	76,17	>100	79,00	78,76	99,70	82	93,63	Meningkat	Belum tercapai
17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel												
19	Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	BB	BB	BB	100	BB	BB	100	A	-	Tetap	Belum tercapai
18	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi												
20	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	40,6	48,6	50,46	>100	50,70	55,40	>100	61,7	89,79	Meningkat	Belum tercapai

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan melalui indikator Indeks Pengetahuan. Indikator ini merupakan indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana hasil pembangunan pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Mengacu pada realisasi tahun 2020, pada triwulan II tahun 2021 Realisasi Indeks Pengetahuan mencapai 0,701 dari target yang ditetapkan sebesar 0,704 sehingga didapat capaian di atas 99,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan, dimana meningkatnya keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adanya intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gambar 2.1. Target Indikator Indeks Pengetahuan



Sumber: BPS Kota Lubuklinggau; Bappedalitbang Kota Lubuklinggau

2. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, yang menggambarkan angka harapan hidup waktu lahir setiap penduduk di Kota Lubuklinggau. Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan program prioritas Kepala Daerah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Lubuklinggau. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan sehingga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada triwulan II tahun 2021 Indeks Kesehatan berhasil tercapai di atas 100 persen dimana dari target sebesar 0,750 telah terealisasi sebesar 0.758. Realiasi dan

capaian Sasaran 1 dan 2 di atas diharapkan mampu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Kota Lubuklinggau. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM), dimana realisasi Indeks SDM tahun 2019 mencapai 72,574.

3. Meningkatnya Kesadaran *Civil Society*

Realisasi pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Demokrasi (ID), Indikator ini merupakan komposit indikator yang menggambarkan perkembangan demokrasi masyarakat dalam hal kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political right*) dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*).

Pada triwulan II tahun 2021 Indeks Demokrasi di Kota Lubuklinggau dari target yang ditetapkan sebesar 82,85 tidak berhasil tercapai. Mengacu pada realisasi tahun 2020 dimana tingkat ketercapaian Indeks Demokrasi sebesar 75,77 dari target capaian sebesar 91,45 persen.

4. Terwujudnya Iklim Usaha Yang Kondusif

Realisasi pencapaian sasaran ini dilakukan melalui indikator *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)*, hal ini menggambarkan rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya investasi pada tahun berjalan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap besarnya PDRB pada tahun berikutnya.

Pada triwulan II tahun 2021 dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, nilai ICOR di Kota Lubuklinggau dari target sebesar 7,62 mengacu pada realisasi tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 8,84 dengan capaian sebesar -12,05% dengan kata lain indikator ini tidak berhasil tercapai. Capaian indikator ini perlu untuk terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Lubuklinggau. Apabila dari APBD belum maksimal menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk memacu pertumbuhan.

5. Meningkatnya Neraca Perdagangan Daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator Neraca Perdagangan Daerah, hal ini menggambarkan kinerja perdagangan daerah dengan membandingkan seberapa besar nilai impor dan ekspor. Neraca Perdagangan Daerah dihitung dengan membandingkan seberapa besar Nilai Ekspor dan Impor Daerah atau membandingkan kebutuhan Daerah yang didatangkan dari luar daerah dengan seberapa besar produk daerah atau komoditi daerah yang dijual keluar daerah.

Mengacu pada realisasi tahun 2020, pada triwulan II tahun 2021 realisasi Neraca Perdagangan Daerah Kota Lubuklinggau sebesar -1,805 persen dari target 1,93 persen sehingga capaiannya adalah sebesar -93,52 persen. Tidak tercapainya sasaran ini dikarenakan Kota Lubuklinggau merupakan Kota industri dan perdagangan dimana kebutuhan akan sumber daya alamnya berasal dari wilayah di sekitar yang menyebabkan nilai impor menjadi lebih tinggi dari nilai ekspor di Kota Lubuklinggau.

Berbagai kebijakan akan dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau guna meningkatkan kinerja perdagangan daerah periode mendatang seperti pembangunan kawasan industri, revitalisasi pasar tradisional modern dan kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung kinerja perdagangan.

6. Meningkatnya Pengembangan Wilayah

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Jumlah Pusat-Pusat Ekonomi Baru. Indikator ini menggambarkan berapa banyak pusat ekonomi yang dibangun Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pada triwulan II tahun 2021 sasaran ini tidak berhasil tercapai hal ini dikarenakan dari target sebesar 1 kawasan Pusat ekonomi baru tidak dapat terealisasi pada tahun ini. Sejak tahun 2018-2019 telah dilakukan persiapan awal dalam rangka pencapaian sasaran ini seperti penyusunan dokumen kajian teknis, produk hukum dan persiapan pembebasan lahan.

7. Terbentuknya Kawasan Industri

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan. Indikator ini menggambarkan seberapa banyak kluster dalam kawasan industri. Sama halnya dengan Sasaran Pengembangan Wilayah, pada triwulan II tahun 2021 sasaran ini juga tidak berhasil terealisasi atau tidak berhasil tercapai.

8. Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

Kota Lubuklinggau merupakan kota yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa seperti umumnya daerah perkotaan maka potensi Sumber Daya Alam (SDA) tidak begitu signifikan menopang perekonomian daerah. Hal inilah yang menjadi peluang daerah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata baik berupa jenis pariwisata alam maupun pariwisata buatan sebagai hasil kreasi dan inovasi Pemerintah Daerah. Pengembangan pariwisata merupakan program prioritas

pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Lubuklinggau.

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD, ini menggambarkan seberapa besar sumbangsih sektor pariwisata pada struktur PAD Kota Lubuklinggau. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Lubuklinggau pada triwulan II tahun 2021 baru tercapai 21,61 persen dimana dari target yang ditetapkan sebesar 13,97 persen realisasinya adalah sebesar 3,21 persen.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll). Hal ini secara otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah maupun melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun untuk berwisata.

9. Menurunnya Pengangguran

Permasalahan pembangunan perkotaan yang sangat krusial dewasa ini adalah masih banyaknya pengangguran. Pemerintah daerah harus hadir dan mampu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk masyarakatnya. Kota Lubuklinggau yang letak geografisnya dikelilingi daerah Kabupaten/Kota sekitar dengan perkembangan pembangunan yang cukup baik menjadi magnet tersendiri bagi penduduk luar daerah untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kesempatan kerja penduduk Kota Lubuklinggau.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menghadapi permasalahan ini seperti kebijakan penerimaan tenaga kerja daerah yang mewajibkan seluruh investor untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen dari porsi karyawannya, pelaksanaan *job fair* dan juga peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran ini ditentukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hal ini menggambarkan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada dibandingkan dengan angkatan kerja. Pada

triwulan II tahun 2021 sasaran ini tidak berhasil tercapai dimana dari target yang ditetapkan sebesar 4,30 persen. Pada realisasi tahun 2020 dimana target capaian terealisasi sebesar 7,41 persen dari capaian yang seharusnya sebesar 19,27 persen.

10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, menggunakan indikator Indeks Pengeluaran, yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari meningkatnya perekonomiannya. Pada triwulan II tahun 2021 Indeks Pengeluaran penduduk Kota Lubuklinggau tidak berhasil tercapai dengan mengacu pada realisasi tahun 2020 terealisasi sebesar 0,787 dari target yang ditetapkan sebesar 0,797 sehingga capaiannya adalah 98,75 persen. Hal tersebut menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

11. Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 2 Indikator yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu, Tingkat Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang berarti Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Mengacu pada realisasi tahun 2020 pada triwulan II tahun 2021 realisasi Indikator Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) tidak berhasil tercapai. Realisasi 2 indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	2,00	2,20	90,00
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,53	0,54	98,11

Sumber : Bappedalitbang, Lubuklinggau 2021

Kondisi di atas merupakan kondisi kemiskinan sebelum terjadinya Covid-19. Penyebaran virus corona (Covid-19) telah menginfeksi jutaan orang di dunia, begitu pula kondisi di Kota Lubuklinggau jumlah pasien terinfeksi virus ini masih terus bertambah. Pandemi ini salah satunya berdampak pada perekonomian dan dampak riilnya adalah penambahan jumlah penduduk miskin.

12. Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Pemerintah Kota Lubuklinggau ingin memastikan bahwa daerah memiliki ketahanan pangan yang cukup untuk keberlangsungan pembangunan daerah dengan memantapkan sasaran penguatan ketahanan pangan daerah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan dengan indikator Rasio Kecukupan Pangan, hal ini menggambarkan rasio ketersediaan komoditas pangan dengan kebutuhan komoditas pangan.

Pada Triwulan II tahun 2021 Rasio Kecukupan Pangan di Kota Lubuklinggau dari target sebesar 1 berhasil terealisasi 1 sehingga sasaran ini berhasil tercapai dengan capaian sebesar 100 persen.

13. Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Keberhasilan sasaran ini dilakukan dengan indikator Persentase Penanganan Kawasan yang terindikasi Kumuh, hal ini menggambarkan luas kawasan terindikasi kumuh yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah luas kawasan yang terindikasi kumuh.

Pada triwulan II tahun 2021 sasaran ini berhasil tercapai dengan capaian di atas 100 persen dimana dari target sebesar 7,52 persen dapat terealisasi sebesar 8,74 persen.

14. Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau semakin menjadikan Kota Lubuklinggau berkembang. Sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau terus melakukan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Lubuklinggau. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan dengan indikator Persentase Infrastruktur sesuai SPP (Standar Pelayanan Perkotaan), hal ini menggambarkan seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun memenuhi standar pelayanan perkotaan.

Pada triwulan II tahun 2021 Persentase Infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Perkotaan tercapai dimana dari target sebesar 66 persen dan mengacu pada realisasi tahun 2020 realisasinya sebesar 59,83 persen sehingga diperoleh capaian sebesar 90,65 persen. Tentunya di tahun-tahun mendatang diperlukan upaya yang lebih masif lagi sehingga infrastruktur yang ada memenuhi standar pelayanan perkotaan.

15. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

Berbagai persoalan yang dihadapi Kota Lubuklinggau di masa datang yang menyangkut lingkungan hidup adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, dan persoalan limbah.

Pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan, kualitas lingkungan hidup harus tetap terjaga dan harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), indikator ini merupakan indikator komposit dari 3 komponen utama yaitu Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Mengacu pada realisasi tahun 2020 pada triwulan II tahun 2021 realisasi IKLH adalah sebesar 80,04 dari target sebesar 75 dengan kategori sangat berhasil dengan capaian di atas 100 persen, hal ini perlu dilakukan upaya-upaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana pelayanan publik dilakukan dan bagaimana kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat penerima layanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Lubuklingau, pemerintah daerah berupaya terus melakukan perbaikan mulai dari pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 2 indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Namun, pada triwulan II tahun 2021 evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) belum dilaksanakan.

Mengacu pada realisasi tahun 2020, realisasi indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2021 dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.5. Realisasi Triwulan II Tahun 2021 Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,14	0	0	-
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79	0	0	-

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklingau, 2021

17. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dewasa ini, kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terukur, berorientasi hasil dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah. Anggaran yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan saja harus mampu dipertanggungjawabkan secara benar tetapi harus memiliki hasil yang nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah Kepala Daerah diberbagai pelosok negeri yang tentu saja memiliki berbagai kendala baik dari luar maupun dari dalam pemerintahan itu sendiri. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui indikator Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang realisasi pada tahun 2019 sudah mendapatkan nilai 72.22 dengan kategori BB. Pencapaian ini sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan pada periode tahun kedepan.

Pencapaian ini dilakukan dengan upaya yang masif terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah.

Selain itu hal yang paling menentukan adalah Komitmen Kepala Daerah untuk menerapkan Manajemen Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Kota Lubuklinggau:

- 1) Peningkatan Kapasitas Tim SAKIP Daerah;
- 2) Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Petugas SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Publikasi Kinerja setiap Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan Kapasitas Evaluator Internal AKIP;
- 5) Perbaikan kualitas dokumen;
- 6) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran (Performance base Budgeting) melalui Integrasi E-Planning dan E-Budgeting.

18. Meningkatnya Kapasitas Birokrasi

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indikator Indeks Kapasitas Birokrasi, hal ini menggambarkan kinerja birokrasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indeks Komposit yang terdiri dari :

- 1) Indeks Profesionalitas;
- 2) Indeks Kelembagaan;
- 3) Indeks SPBE;
- 4) Indeks KIP;
- 5) Indeks Arsip;
- 6) Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada realisasi tahun 2020, pada triwulan II tahun 2021 realisasi Indeks Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil tercapai di atas 100 persen dengan realisasi sebesar 55,40 dari target 50,70 yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021 pada semester I terhadap beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 ditindaklanjuti dengan kebijakan *Work From Home* bagi aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana;
2. Berkurangnya pendapatan daerah baik yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana Transfer ke Daerah menjadikan berkurangnya sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan; dan

3. Percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas: penanganan kesehatan; penanganan dampak ekonomi; dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*; dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, adapun langkah-langkah yang diperlukan di semester berikutnya, sebagai berikut:

1. Agar masing-masing Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya maupun pendanaan sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target yang juga rasional;
2. Perlunya penataan kembali terhadap rancangan APBD 2021 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien; dan
3. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.

BAB III

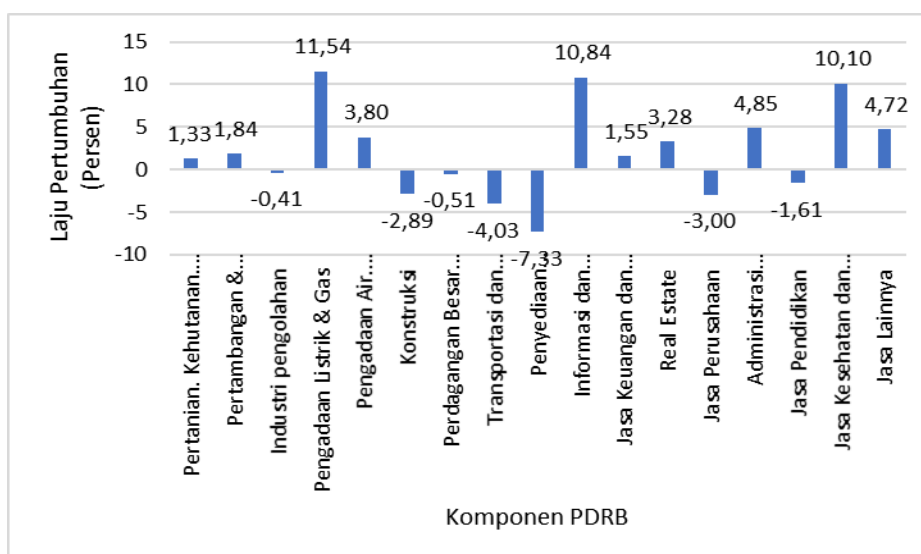
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menjelaskan tentang perubahan kerangka ekonomi, yang antara lain mencakup perubahan target kinerja makro pembangunan daerah, perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan. Perubahan ini berdampak pada kebijakan pemerintah daerah meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Secara umum, perekonomian Kota Lubuklinggau tahun 2020 mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi -0,13 persen. Beberapa lapangan usaha berkontraksi, namun ada lapangan usaha yang justru mengalami pertumbuhan yang cukup baik (Lihat Gambar 3.1.) Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa lapangan usaha saja, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 11,54 persen diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 10,84 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,10 persen. Sedangkan lapangan usaha yang berkontraksi cukup besar antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontraksi 7,33 persen, Transportasi dan Pegudangan berkontraksi 4,03 persen serta Jasa Perusahaan berkontraksi 3,00 persen.

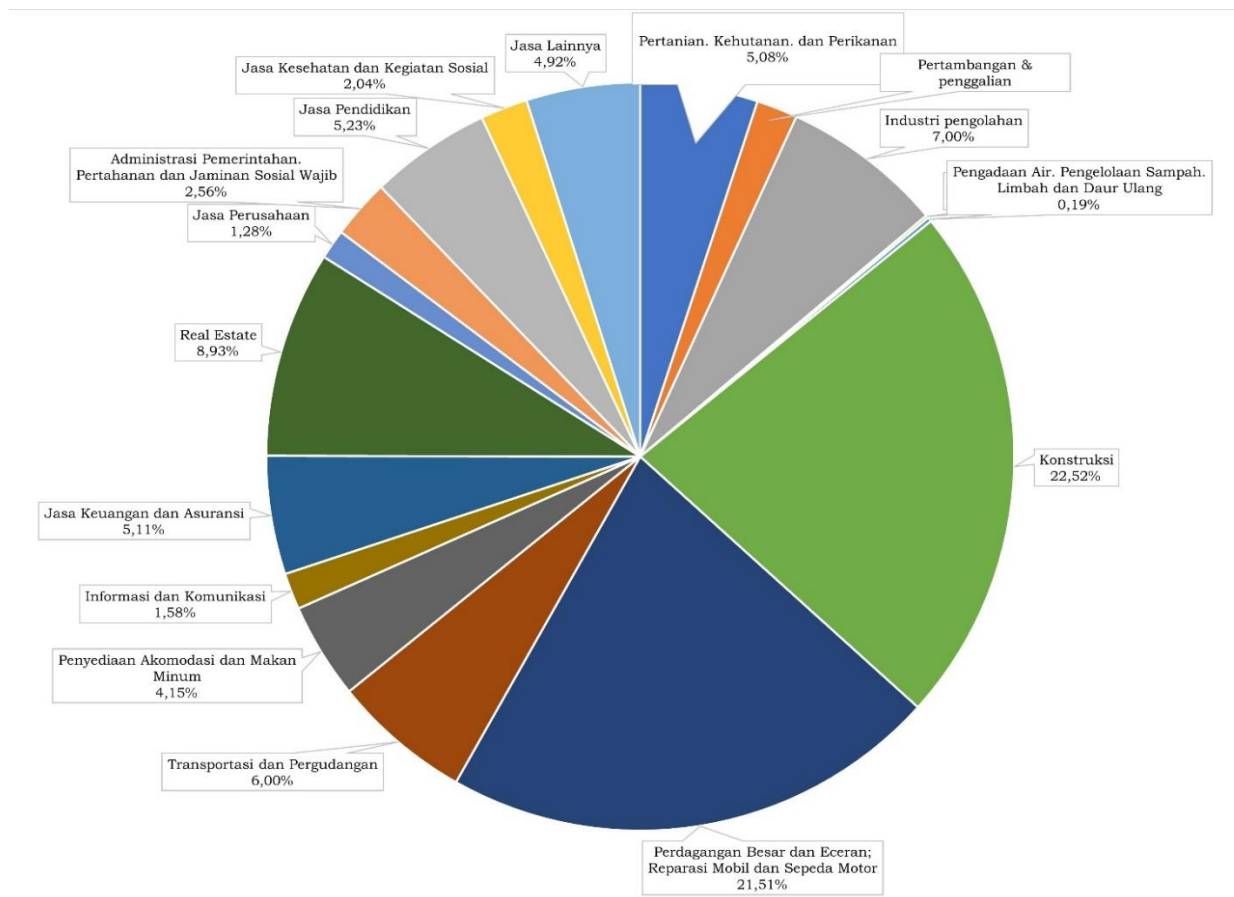
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Sementara itu, struktur ekonomi Kota Lubuklinggau, sesuai dengan ciri perekonomian daerah urban/perkotaan, didominasi oleh kategori konstruksi, perdagangan, dan jasa. Struktur Perekonomian Kota Lubuklinggau didominasi oleh lima lapangan usaha utama yaitu: Konstruksi (22,52%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,51%), Real Estat (8,93%), Industri Pengolahan (7,00%), serta Transportasi dan Pergudangan (6,00%).

Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Lubuklinggau 2020

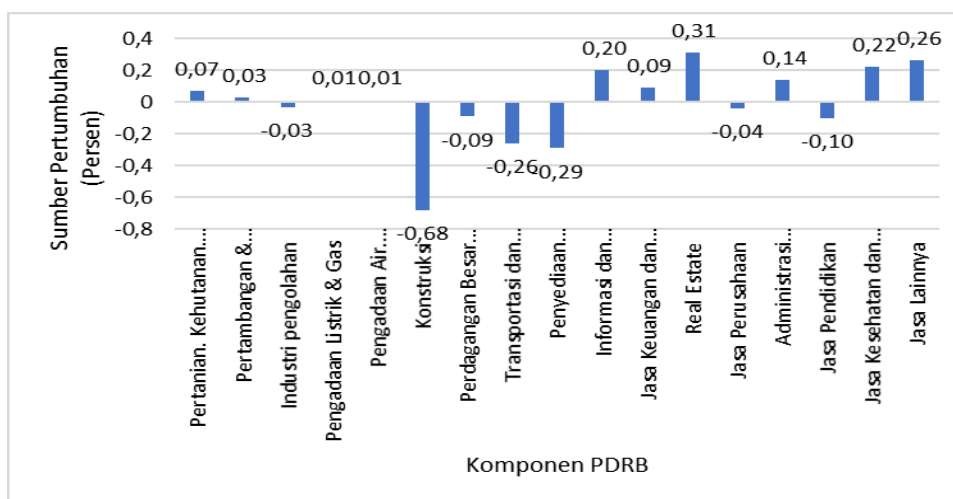


Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2020 (Lihat Gambar 3.3.), lapangan usaha Real Estat merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,31 persen, diikuti Jasa Lainnya dan Jasa Kesehatan masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,22 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2019

menciptakan sumber pertumbuhan cukup besar, namun pada 2020 ini sumber pertumbuhannya menjadi negatif.

Gambar 3.3. Sumber Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2021

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2021: “*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*” dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yakni “*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi dan Pelayanan Publik yang Prima*”, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 adalah “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Sosial**”, dengan indikator kinerja makro pembangunan daerah yang harus dicapai antara lain:

Tabel 3.1 Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,79 – 5,65 %	4,00 %
2	Pengangguran Terbuka	4,9 – 7,15 %	6,4%
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,12	75,12
4	Inflasi	2,58 – 3 %	1,43 %
5	Kemiskinan	13,11 – 13,56	12,37 %
6	Indeks Gini	-	0,305

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada target kinerja makro pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2021 memerlukan upaya antara lain:

- 1) Menyediakan infrastruktur (perekonomian dan sarana-prasarana diluar infrastruktur perekonomian yang secara tidak langsung mendukung perekonomian) secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah;
- 2) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong investasi padat modal maupun padat karya, program diarahkan pada:
 - (1) Simplifikasi regulasi dalam rangka memudahkan proses perizinan;
 - (2) Meningkatkan keamanan wilayah dengan menekan angka kriminalitas; dan
 - (3) Menciptakan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) kurang mampu.
- b) Penguatan Sektor Kesehatan. Program diarahkan pada:
 - (1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, dan
 - (2) Pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan terutama untuk menanggulangi kasus covid-19
- c) Optimalisasi pertumbuhan sektor perdagangan dengan peningkatan layanan jasa perdagangan. Program diarahkan pada:
 - (1) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - (2) Meningkatnya standarisasi Pasar Rakyat;
- d) Perluasan Program Perlindungan Sosial. Program diarahkan pada perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup

pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca COVID-19.

- e) Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka pertumbuhan kawasan ekonomi baru dan pemerataan persebaran penduduk, program diarahkan pada:
 - (1) Peningkatan infrastruktur dengan memprioritaskan terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi; dan
 - (2) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman di kawasan pertumbuhan baru;
- f) Penataan sistem transportasi perkotaan dengan mengedepankan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang. Program diarahkan pada:
 - (1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan; dan
 - (2) Penataan angkutan umum.
- g) Mengembangkan pariwisata dengan pembangunan destinasi wisata buatan yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan peran investor. Program diarahkan pada:
 - (1) Meningkatkan daya tarik wisata dengan peningkatan objek wisata;
 - (2) Peningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata, dengan menumbuhkan sektor informal; dan
 - (3) Peningkatan infrastruktur menuju kawasan wisata dengan memperhatikan aspek mobilitas.
- h) Penyiapan tenaga kerja disektor jasa, industri dan perdagangan yang produktif dan berdaya saing. Program diarahkan pada:
 - (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan; dan
 - (2) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
- i) Mengembangkan kapasitas produksi dan daya saing Koperasi dan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program diarahkan pada:
 - (1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM; dan
 - (2) Meningkatkan pengembangan IKM.
- j) Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis;
- k) Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi harga barang pokok dan penting; dan

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengingat keterbatasan keuangan daerah maka diperlukan instrument kebijakan keuangan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan target kinerja pembangunan yang akan dicapai. Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang kemudian terintegrasi ke dalam siklus APBD yang memuat rencana keuangan daerah meliputi kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sebagaimana arah kebijakan perumusannya selain mempertimbangkan *money follow function* juga memperhatikan *money follow program priority* dimana pendekatan anggaran lebih difokuskan pada program yang terkait langsung dengan prioritas dan memberi dampak langsung bagi masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumberpendapatan yang sah.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan Bagi Hasil Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
4. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung kebijakan dimaksud, diterapkan pula norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan persyaratan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab,
2. Disiplin anggaran, dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan era sebelumnya, pembangunan dan pelayanan umum. Karena itu, anggaran harus disusun berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan anggaran, yakni norma yang mewajibkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi; dan
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2021 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban; dan
4. Optimalisasi penggunaan *tapping box*.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut:

1. Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
2. Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Pendapatan Daerah ;
5. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan pendapatan daerah dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp. 961.390.120.295. Penerimaan pendapatan ini mengalami perubahan menjadi Rp. 969.146.417.552,32. Rincian perubahan pendapatan daerah tersebut dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 3.2. Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	APBD 2021	REALISASI PENDAPATAN TW II	PERUBAHAN 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	961,390,120,295.00	349,992,257,567.80	1,019,618,461,467.32	58,228,341,172.32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108,035,966,287.00	23,367,845,408.80	118,719,773,798.32	10,683,807,511.32
4.1.1	Pajak Daerah	51,631,946,287.00	15,247,373,156.00	54,172,380,000.00	2,540,433,713.00
4.1.2	Retribusi Daerah	7,529,020,000.00	2,588,170,700.00	8,705,624,000.00	1,176,604,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,850,000,000.00	2,230,523,344.23	1,850,000,000.00	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	47,025,000,000.00	3,301,778,208.57	53,991,769,798.32	6,966,769,798.32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	847,688,154,008.00	326,624,412,159.00	865,593,887,669.00	17,905,733,661.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683,594,168,750.00	307,522,616,850.00	683,613,050,100.00	18,881,350.00
	Dana Alokasi Umum	456,420,348,000.00	295,305,129,850.00	442,292,413,000.00	
	Dana Alokasi Khusus Fisik	76,992,622,000.00		59,974,406,000.00	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	62,366,988,000.00		62,366,988,000.00	
	Dana Bagi Hasil	63,379,235,750.00		94,544,268,100.00	
	Dana Insentif Daerah	24,434,975,000	12,217,487,000.00	24,434,975,000.00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164,093,985,258.00	19,101,795,309.00	181,980,837,569.00	17,886,852,311.00
	Pendapatan bagi hasil	54,093,985,258.00	19,101,795,309.00	92,939,081,484.00	38,845,096,226.00
	Bantuan Keuangan	110,000,000,000.00	-	89,041,756,085.00	(20,958,243,915.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,666,000,000.00	-	35,304,800,000.00	29,638,800,000.00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,666,000,000.00	-	35,304,800,000.00	29,638,800,000.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Dari table 3.1. dapat terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 58,228,341,172.32, tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam ABPD Kota Lubuklinggau tahun 2021. Meningkatnya pendapatan daerah disebabkan karena :

1. Bertambahnya Pajak Daerah
2. Bertambahnya Pajak Retribusi Daerah
3. Bertambahnya Lain-lain PAD yang Sah

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, serta *recovery* ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok perangkat daerah (PD)

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lubuklinggau yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip

efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Selanjutnya, dalam pengalokasian belanja, difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam penyusunan anggaran belanja daerah terdiri atas Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas

daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,

b) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, Pada APBD Tahun Anggaran 2021, anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi/kegiatan keagamaan, organisasi /kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan kependidikan dan bantuan organisasi profesi, Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, Selain itu, dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas, Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Dengan keterbatasan pendapatan daerah, maka diperlukan upaya berupa kebijakan belanja daerah sebagai instrument untuk lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan belanja daerah secara khusus yang perlu dilakukan adalah :

1. Menyesuaikan belanja daerah sesuai dengan kebijakan belanja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat diantaranya :
 - a. Mengalokasikan Dana Transfer Umum untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan PMK 17 Tahun 2021
 - b. Mengalokasikan Dana Insentif Daerah untuk penanganan Covid-19
 - c. Mengalokasikan dana hibah untuk penerimaan Polri
2. Menyusun program/kegiatan/subkegiatan dan anggaran secara efisien, efektif dalam rangka pencapaian sasaran makro yang akan dicapai pada tahun 2021
3. Mengurangi belanja daerah terutama untuk belanja yang bersifat rutin, perjalanan dinas dan anggaran rutin lainnya yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran
4. Mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi
5. Mengubah skema pembayaran kegiatan multiyears
6. Mengurangi belanja untuk Tambahan Penghasilan Pegawai
7. Menunda dan membatalkan kegiatan yang dananya tidak tersedia karena sumberdananya mengalami perubahan.

Perubahan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 3.3. Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	INDUK 2021	PERUBAHAN 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA DAERAH	1,158,890,120,295.00	1,221,764,727,164.96	62,874,606,869.96
5.1	Belanja Operasi	807,721,310,840.00	812,931,373,652.40	5,210,062,812.40
5.1.1	Belanja Pegawai	473,870,268,289.00	450,061,353,224.94	(23,808,915,064.06)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317,358,251,951.00	342,417,835,827.46	25,059,583,876.46
5.1.5	Belanja Hibah	15,907,790,600.00	18,096,584,600.00	2,188,794,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	585,000,000.00	2,355,600,000.00	1,770,600,000.00
5.2	BELANJA MODAL	348,668,809,455.00	406,440,552,776.24	57,771,743,321.24
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9,355,000,000.00	3,151,000,000.00	(6,394,000,000.00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,746,430,142.00	43,338,572,713.24	9,592,142,571.24
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68,951,859,838.00	80,005,925,786.00	11,054,065,948.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	233,452,271,095.00	273,299,976,235.00	39,847,705,140.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,973,248,380.00	6,645,078,042.00	3,671,829,662.00
5.3	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	2,392,800,736.32	(107,199,263.68)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	2,392,800,736.32	(107,199,263.68)
	Surplus / (Defisit)	(197,500,000,000.00)	(202,146,265,697.64)	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.3.3. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah, Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah bersumber dari perkiraan SiLPA tahun anggaran 2021.

Penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000 bersumber dari pinjaman daerah dialokasikan untuk membayar kegiatan multiyear dan membiayai kegiatan infrastruktur.

Sumber penerimaan daerah Kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya secara efektif dan efisien;
2. Pembiayaan pembangunan dengan menggunakan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah untuk penyertaan modal (investasi) ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dan PT. Lubuklinggau Bisa.

Tabel 3.4. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

KODE	URAIAN	INDUK 2021	REALISASI ANGGARAN TW II	PERUBAHAN 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	203,500,000,000.00	-	202,146,265,697.64	(1,353,734,302.36)
6 .1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200,500,000,000.00	-	202,146,265,697.64	1,646,265,697.64
6 .1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500,000,000.00	-	2,146,265,697.64	1,646,265,697.64
6 .1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00	-	200,000,000,000.00	-
6 .2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	-	-	(3,000,000,000.00)
	Angsuran Pengembalian Pinjaman	-	-	-	
6 .2 .2	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	-	-	(3,000,000,000.00)
	Pembiayaan Netto	197,500,000,000.00	-	202,146,265,697.64	4,646,265,697.64

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan berdasarkan sasaran pada Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuklinggau yang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi; dan
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

Prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2021 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Lebih lanjut, tertuang secara khusus dalam arahan dari presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan 2021 untuk:

1. Melakukan Reformulasi target kinerja pemda akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Tetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska pandemi Covid-19;
3. Meningkatkan ketahanan pangan;

4. Tetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja (pro-job);
5. Tetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya;
6. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial; dan
7. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	Pengembangan Pariwisata, perdagangan dan Industri Sebagai Pendorong Ekonomi				38,806,542,930
		Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih.	85 cabor	350,000,000
			Tingkat pertumbuhan komunitas olahraga	94.87%	-
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	153.000 orang	5,565,000,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	962,800,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	727,800,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	95%	661,348,862
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	436,175,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	1,026,709,461
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	363,897,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	934,600,000
			Persentase kelompok atau lembaga masyarakat yang aktif	80%	859,317,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Tersedianya konektivitas wilayah	% terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat - pusat produksi	44.00%	20,948,100,000
		Meningkatnya layanan sistem transportasi perkotaan	Tingkat Layanan Lalu Lintas Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan	0.65%	1,325,865,000
			Tingkatan Layanan Angkutan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan	0.80%	-
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	10,6	555,000,000
		Meningkatnya daya saing UKM	UKM Naik Kelas	146	250,000,000
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	16,58%	3,839,930,607
2	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi				15,568,648,400
		Meningkatnya pengembangan wilayah	Persentase penurunan pelanggaran K3	80%	1,714,942,400
			Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	6.27	179,800,000
		Terbentuknya kawasan industri	•Jumlah klaster yang terbangun di dalam kawasan		53,626,000
		Terselenggaranya infrastruktur pendukung kawasan industri	Rata-rata Cakupan Layanan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri	25,61%	10,000,000,000
		Meningkatnya sinkronisasi pembangunan yang mengacu kepada RTRW	% Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR		2,720,000,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	859,4 Milyar	900,280,000
3	Penyederhanaan Birokrasi untuk mendorong investasi				24,009,114,571
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. % Pelayanan per Jenis Layanan Selesai Tepat Waktu	80%	
			2. Nilai Rata-Rata Penerapan Kebijakan Pelayanan UPP	72.50%	222,147,000
			% penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	96%	68,116,000
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	1. Persentase Zona Integritas menjadi WBK	71.43%	900,800,060
			2. persentase WBK menjadi WBBM	71.43%	
			Persentase OPD yang mendapat nilai Sakip A	21%	623000060
			Nilai Perencanaan Kinerja pada Komponen SAKIP	26.42	
			Nilai SAKIP pada Aspek Pengukuran Kinerja	21.95	729,861,000
			Nilai SAKIP pada komponen capaian kinerja	14.81	126,878,500
			Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Komponen SAKIP	14.00	227,655,000
			OPINI BPK	WTP	1,639,708,950
		Meningkatnya kapasitas birokrasi	Tingkat harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	100%	276,135,800
			Rata-rata Peningkatan Indeks Profesionalisme OPD	60%	4,913,413,000
			IKM Pelayanan	84	3,376,800,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	3	8,361,222,000
		Terciptanya keamanan data dan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	14	382,982,201
		Terwujudnya keterbukaan informasi publik	Indeks KIP	75	2,160,395,000
4	Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas/ Berkarakter dan Merata				18,336,870,850
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Persentase Sekolah Terakreditasi A	40%	502,613,740
			% Sekolah Memiliki Sarana Lengkap (Sesuai Standar)	55%	17,587,762,610
			Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Ruang Baca Publik	409,200	246,494,500
5	Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Unggul				48,925,333,109
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	45	
			Angka Kematian Bayi per 1000 KH	4%	5,626,844,635
			Persentase UPTD yang terakreditasi	100%	
			Persentase UPTD Beroperasional BLUD	100%	
			Indeks kepuasan masyarakat	85%	3,841,846,849
			Persentase indeks keluarga sehat	40%	286,625,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi KLB	100%	
			Persentase peraturan/kebijakan penanggulangan penyakit	100%	
			Cakupan Puskesmas melaksanakan PTM Terpadu	100%	39,816,625
			Indikator kepuasan pasien	88%	39,130,200,000
6	Penguatan Jaringan Pengaman Sosial Daerah				26,117,686,903
		Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	Persentase PMKS yang mampu keluar dari Permasalahan Sosial	90.34%	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	217	Rp 897,441,971
			Persentase perlindungan sosial kesehatan bagi penduduk rentan dan kurang mampu	100%	4,922,335,435.49
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	1.3%	Rp 624,684,825
			Rata-Rata Lama Sekolah	12	
			Harapan Lama Sekolah	3	14,441,479,262.87
			Rata-Rata Jumlah Anak dalam keluarga	2.19	120,305,000
			Persentase penanganan penanggulangan bencana sesuai waktu tanggap darurat	75%	75,000,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Meningkatnya kualitas perumahan	% Rumah Layak Huni	95.31	3,556,060,000
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95,15%	1,480,380,409
7	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Penyehatan Lingkungan				133,569,258,500
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang di dukung PSU yang memadai (diatas 70%)		19,276,665,500
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan	% Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap sesuai Kebutuhan	43.07	49,755,950,000
			% Panjang Jembatan dalam kondisi mantap sesuai kebutuhan	56.23	
		Meningkatnya sarana dan prasarana keciptakaryaan	Rata - rata cakupan layanan sarana dan prsarana keciptakaryaan	89.44	40,832,550,000
		Terwujudnya usaha jasa konstruksi berkualitas	% badan usaha tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi (Jasa Konstruksi yang kompeten)	67.27	510,000,000
		Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	•1.Indeks Pencemaran Air	70,08	8,860,420,000
			•2.Indeks Pencemaran Udara	77,32	
			•3.Indeks Tutupan Lahan	88,64	
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar	% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	80%	1,980,000,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	80%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	80%	1,000,000,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	80%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	100%	1,664,550,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	100%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	85%	1,908,000,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	85%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	85%	1,963,750,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	85%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	80%	2,043,000,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	100%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	80%	2,045,000,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	80%	
			% Penyelesaian layanan sesuai Standar Pelayanan	80%	1,654,373,000
			% Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan	80%	
			Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan (2 milyar)	1.5 milyar	75,000,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8	Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah				12,172,575,000
		Terwujudnya SDA yang Handal	% Pengendalian Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik		6,800,000,000
			% Infrastruktur Irigasi dalam kondisi baik		
		Meningkatnya produksi perikanan	Rasio kecukupan pangan	1.05	1,612,575,000
			Jumlah produksi ikan	3172 ton	
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian	1. Produktifitas Pangan Utama	15,3 Ton/HA	2,270,000,000
			2. Produktifitas Tanaman Holtikultura	56,6 Ton / HA	
			3. Produktifitas Perkebunan	6,1 Ton HA	
		Terpenuhinya Pangan Masyarakat	1. Jumlah ketersediaan energi dan protein	2400 kkal/kap/hari dan 64 gram/kap/hari	1,490,000,000.00
			2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93	
			3. Stabilitas harga pangan	100%	

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, 2020

4.2. Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Sumsel dan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 telah melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi yang berdampak dan harus dipedomani daerah, hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana tersebut diatas memiliki makna dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tabel 4.2. Sinkronisasi RKPD Kota Lubuklinggau dengan RKP

RKPD KOTA LUBUKLINGGAU 2021	RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021	RKP 2021
T E M A		
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pariwisata, perdagangan dan Industri sebagai Pendorong Ekonomi; 2. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi; 3. Penyederhanaan Birokrasi untuk Mendorong Investasi; 4. Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan; 2. Penguatan Konektivitas, Kualitas Infrastruktur dan Energi; 3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan; 4. Peningkatan Kedaulatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; 2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan; 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; 4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan

RKPD KOTA LUBUKLINGGAU 2021	RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021	RKP 2021
Berkarakter dan Merata; 5. Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Unggul; 6. Penguatan Jaring Pengaman Sosial Daerah; 7. Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Penyehatan Lingkungan; dan 8. Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah	Pangan dan Kualitas Lingkungan Hidup; 5. Stabilitas Keamanan dan kehidupan Beragama.	Hidup; 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Daerah, antara lain:

A. Pengembangan Pariwisata, Perdagangan dan Industri sebagai Pendorong Ekonomi

Prioritas Pengembangan Pariwisata, perdagangan dan Industri Sebagai Pendorong Ekonomi dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, pendapatan masyarakat dan lapangan kerja pada sektor unggulan industri, pariwisata dan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik pariwisata, peningkatan pembudayaan olahraga, meningkatkan Konektivitas Wilayah, peningkatan Layanan Sistem Transportasi Perkotaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan.

B. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi

Prioritas Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur strategis untuk meningkatkan daya tarik Kota Lubuklinggau sebagai daerah tujuan investasi

dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara: Meningkatkan keamanan wilayah dan penciptaan K3, terbentuknya kawasan industri dan penyelenggaraan Infrastruktur Pendukung Kawasan, peningkatan sinkronisasi pembangunan yang mengacu kepada RTRW; dan perwujudan keterbukaan informasi publik.

C. Penyederhanaan Birokrasi untuk Mendorong Investasi

Prioritas ini ditetapkan untuk: a. mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal; b. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance; dan c. penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Fokus kerja dalam prioritas ini adalah meliputi peningkatan: Penerapan Teknologi Informasi Pendukung Pelayanan Publik; Penerapan Inovasi Layanan; Kualitas Data Kependudukan; dan OPD yang menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

D. Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas/Berkarakter dan Merata

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan (a) Mutu Pendidikan, (b) Sarana Pendidikan Berkualitas yang merata, dan (c) Aksesibilitas Membaca Masyarakat. Adapun fokus kerja dalam prioritas ini adalah meningkatkan Standar Mutu Pembelajaran; dan meningkatnya Keragaman Bahan Pustaka.

E. Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Unggul

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan (a) status kesehatan ibu dan anak, (b) mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat, (c) kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; pengendalian penyakit; (d) dan (e) kualitas layanan rumah sakit.

Fokus kerja dalam prioritas ini adalah meliputi meningkatnya perlindungan imunitas bayi dan ibu; meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar; meningkatnya pengendalian penyakit menular; dan meningkatnya jenis layanan unggulan rumah sakit.

F. Penguatan Jaring Pengaman Sosial Daerah

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan Perlindungan sosial dilakukan dengan tujuan menurunkannya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan melalui Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat; Meningkatnya gizi masyarakat; Meningkatnya Akses Pendidikan; Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran; Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana; Meningkatnya kualitas Perumahan; dan Meningkatnya Kesempatan kerja dengan fokus Pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, Bantuan Pangan Non Tunai Lokal dan Bantuan Sosial, Menurunkannya Stunting dan wasting pada balita; Meningkatnya Kepersertaan KB Masyarakat; dan Meningkatnya sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana.

G. Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Penyehatan Lingkungan

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Infrastruktur merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam infrastruktur.

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dengan tujuan Meningkatkan infrastruktur dasar melalui peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan; Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan Jembatan; Meningkatnya Sarana dan Prasarana keciptakarya; dan Menurunnya pencemaran lingkungan hidup.

H. Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan secara umum dapat dikatakan sedang terganggu. dikarenakan masa pandemi saat ini, dimana pemerintah telah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar masyarakat diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Hal ini mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satunya adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun.

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan penguatan ketahanan pangan di daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian; dan pemenuhan pangan masyarakat dengan fokus perwujudan Sumber Daya Air yang handal peningkatan pengelolaan *on farm* dan *off farm* pertanian. Ketahanan pangan memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi.

Tabel 4.3. Sinkronisasi RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan	
1	MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas, dan Berkarakter							
	1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas						
	1.1.1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Pemantapan pelayanan pendidikan yang mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas pengelolaanya.	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas pengelolaanya.	Prioritas 1		
				Pemberian beasiswa prestasi pada jenjang S1, S2, dan S3				
			Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan	Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Prioritas 1		
			Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu	Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal	Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal			
			Revitalisasi perpustakaan	Pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan kelurahan				
				Meningkatkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan				
	1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.	Prioritas 1		
					Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas 1		
				Peningkatan kesehatan dan kualitas gizi bayi, balita dan ibu melalui pendidikan dan pemberian makanan tambahan	Peningkatan kesehatan dan kualitas gizi bayi, balita dan ibu melalui pendidikan dan pemberian makanan tambahan	Prioritas 1		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan standarisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan standarisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan.	Prioritas 1
					Optimalisasi layanan kesehatan jemput bola/ OCC (On Call Center)		
					Meningkatnya kualitas layanan Rumah Sakit	Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit	Prioritas 1
				Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang kesehatan	Meningkatkan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui program promotif dan preventif	Meningkatkan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui program promotif dan preventif	Prioritas 1
					Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui program keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui program keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Prioritas 1
				Peningkatan minat dan pembiasaan olah raga dalam masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam "Pembudayaan Olahraga"		
1.2.		Mewujudkan masyarakat madani					
	1.2.1	Meningkatnya kesadaran civil society	Mengoptimalkan pembangunan karakter untuk menciptakan masyarakat yang beragama, beriman dan bertakwa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.	Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan			
				Pemasyarakatan hak dan kewajiban dalam			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
					pemilu		
					Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Prioritas 1
					Peningkatan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan	Prioritas 1
					Peningkatan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	Peningkatan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	Prioritas 1
					Peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		
					Peningkatan kelestarian nilai budaya		
					Meningkatkan harmonisasi kehidupan beragama dengan pemberdayaan tempat ibadah		
2	MISI 2: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial						
	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi					
	2.1.1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Mendorong investasi padat modal maupun padat karya		Simplifikasi regulasi dalam rangka memudahkan proses perizinan	Menyederhanakan regulasi perizinan	Prioritas 2
					Meningkatkan keamanan wilayah dengan menekan angka kriminalitas	Meningkatkan keamanan wilayah dengan menekan angka kriminalitas	Prioritas 2
					Menciptakan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Menciptakan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Prioritas 2
	2.1.2	Meningkatnya neraca perdagangan daerah	Optimalisasi pertumbuhan sektor perdagangan dengan peningkatan layanan		Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
				jasa perdagangan			
					Meningkatkan Kinerja Ekspor dan Perdagangan dalam Negeri	Meningkatkan Kinerja Ekspor dan Perdagangan dalam Negeri	Prioritas 2
					Meningkatnya standarisasi Pasar Rakyat	Meningkatnya standarisasi Pasar Rakyat	
		2.1.3	Meningkatnya pengembangan wilayah	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah	Memantapkan sistem perencanaan dan regulasi penataan ruang dalam rangka menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem perencanaan dan regulasi penataan ruang dalam rangka menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Prioritas 4
				Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka pertumbuhan kawasan ekonomi baru dan pemerataan persebaran penduduk	Peningkatan infrastruktur dengan memprioritaskan terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi	Peningkatan infrastruktur dengan memprioritaskan terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi	Prioritas 4
					Peningkatan infrasruktur perumahan dan permukiman di kawasan pertumbuhan baru	Peningkatan infrasruktur perumahan dan permukiman di kawasan pertumbuhan baru	Prioritas 4
				Penataan sistem transportasi perkotaan dengan mengedepankan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang	Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan	Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan	Prioritas 4
					Penataan angkutan umum	Penataan angkutan umum	Prioritas 4
		2.1.4	Terbentuknya kawasan industri	Mengembangkan kawasan industri pergudangan	Pembebasan lahan untuk kawasan industri dan pergudangan		
					Meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan industri	Meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan industri	Prioritas 4
					Mendorong pengembangan industri hilir/ pengolahan		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan	
					Penataan industri dan pergudangan dengan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan kawasan.			
		2.1.5	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Mengembangkan pariwisata dengan pembangunan destinasi wisata buatan yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan peran investor	Pengembangan destinasi wisata dengan pembangunan pantai /danau buatan	Pengembangan destinasi wisata buatan	Prioritas 2	
					Meningkatkan daya tarik wisata dengan peningkatan objek wisata	Meningkatkan daya tarik wisata dengan peningkatan objek wisata	Prioritas 2	
					Peningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata, dengan menumbuhkan sektor informal	Peningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata, dengan menumbuhkan sektor informal	Prioritas 2	
					Peningkatan infrastruktur menuju kawasan wisata dengan memperhatikan aspek mobilitas	Peningkatan infrastruktur menuju kawasan wisata dengan memperhatikan aspek mobilitas	Prioritas 4	
		2.2	Meningkatkan status kesejahteraan sosial					
		2.2.1	Menurunnya pengangguran	Penyiapan tenaga kerja disektor jasa, industri dan perdagangan yang handal dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenaga kerjaan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenaga kerjaan	Prioritas 1	
					Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2	
						Penurunan angka pengangguran dengan peningkatan perluasan kesempatan kerja	Prioritas 3	
				Mengembangkan kapasitas produksi dan daya saing Koperasi dan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Prioritas 2	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
					Meningkatkan pengembangan IKM	Meningkatkan pengembangan IKM	Prioritas 2
		2.2.2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan atau Upah Minimum Regional (UMR)	Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis	Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis	Prioritas 2
				Meningkatkan Stabilitas Harga Pokok dan Penting	Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi harga barang pokok dan penting		
				Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat	Membuat Lembaga Keuangan Berbasis di Masjid dengan manajemen pengelolaan keuangan syariah berbasis masyarakat	Meningkatkan kualitas lembaga keuangan berbasis masyarakat	Prioritas 2
		2.2.3	Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar tepat sasaran	Penyusunan mekanisme penyediaan data terpadu penerima program penanganan fakir miskin/kurang mampu		
				Meningkatkan jaminan pendidikan tepat sasaran	Sinergitas program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat	Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Berbasis Rumah Tangga dan Individu tepat sasaran	Prioritas 3
					Pengembangan Sekolah Gratis (perhatian khusus) tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA kepada penduduk yang kurang mampu.	Penyediaan sarana prasarana pendidikan siswa miskin	Prioritas 3
						Penyediaan beasiswa siswa miskin	Prioritas 3
				Meningkatkan jaminan kesehatan tepat sasaran	Penguatan perlindungan sosial kesehatan bagi penduduk rentan dan kurang mampu	Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin	Prioritas 3
						Peningkatan status gizi balita dan ibu hamil	Prioritas 3
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Prioritas 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPd 2021	Prioritas Pembangunan
				huni dan terjangkau			
				Optimalisasi penerapan Keluarga Berencana (KB), terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	Peningkatan Sarpras berbasis masyarakat	Prioritas 3
				Optimalisasi pencegahan kemiskinan akibat resiko bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran / bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran / bencana	Prioritas 4
		2.2.4	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan pangan strategis masyarakat	Meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	Meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	Prioritas 3
						Penanganan kerawanan pangan	Prioritas 3
					Mewujudkan penganeekaragaman dan keamanan pangan	Mewujudkan penganeekaragaman dan keamanan pangan	Prioritas 2
					Meningkatkan produktivitas pertanian	Meningkatkan produktivitas pertanian	Prioritas 2
					Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	Prioritas 2
3	MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan						
	3.1	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan					
	3.1.1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan infrastruktur sanitasi pada kawasan permukiman yang terindikasi kumuh.	Penyediaan infrastruktur sanitasi pada kawasan permukiman yang terindikasi kumuh.		Prioritas 4
				Peningkatan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai	Peningkatan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai		Prioritas 4
				Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman		Prioritas 4

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
					(jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan talud lingkungan)	(jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan talud lingkungan)	
					Penataan taman dan pemakaman kota	Penataan taman dan pemakaman kota	Prioritas 4
		3.1.2	Meningkatnya infrastruktur dasar	Meningkatkan infrastruktur dasar jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik sesuai standar	Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik sesuai standar	Prioritas 4
				Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Prioritas 4
					Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas publik melalui Pembangunan dan Pengembangan Taman Olah Raga di setiap kecamatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas publik	Prioritas 4
					Peningkatan kualitas dan cakupan layanan infrastruktur dasar perkotaan (drainase sekunder, infrastruktur TPA, IPLT, air minum perpipaan)	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan infrastruktur dasar perkotaan	Prioritas 4
				Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Prioritas 4
					Pengendalian dan pengamanan titik rawan daya rusak air sesuai standar	Pengendalian dan pengamanan titik rawan daya rusak air sesuai standar	Prioritas 4
		3.1.3	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup	Penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan	Penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan	Prioritas 4
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan hidup		
					Meningkatkan pemeliharaan Ruang		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
					Terbuka Hijau (RTH)		
				Meningkatkan pengelolaan persampahan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Prioritas 4
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Prioritas 4
4	MISI 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
	4.1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi					
	4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas pelayanan OPD	Peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggara layanan	Peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggara layanan		Prioritas 5
				Meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam pelaksanaan inovasi pelayanan	Meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam pelaksanaan inovasi pelayanan		Prioritas 5
				Menetapkan mekanisme pengendalian internal penyelenggara layanan			
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima			
	4.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Meningkatkan maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Peningkatan pengendalian intern Pemerintah yang intensif dan Pengawasan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengendalian intern Pemerintah yang intensif dan Pengawasan Sumber Daya Aparatur		Prioritas 5
			Meningkatkan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Mengoptimalkan Satgas peningkatan kapabilitas APIP			
			Meningkatkan pelaporan LHKASN sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang	Peningkatan kesadaran ASN untuk melapor			
			Meningkatkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi	Optimalnya satgas penerapan Zona			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
				Bersih dan Mekayani)	Integritas menuju WBK/WBBM		
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keakuratan data melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Peningkatan konsistensi, keakuratan, dan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah		Prioritas 5
				Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah melalui sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)	Peningkatan perencanaan dan pengendalian berbasis elektronik		Prioritas 5
				Peningkatan perencanaan yang partisipatif melalui koordinasi lintas sektoral			
				Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pusat-daerah melalui aplikasi DAK (KRISNA) & APBN (SIMLARAS)			
				Peningkatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah			
				Peningkatan pengendalian monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-monev)			
				Peningkatan kinerja keuangan dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah melalui perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja dan integrasi perencanaan - penganggaran dalam rangka pencegahan korupsi	Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah melalui perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja dan integrasi perencanaan - penganggaran dalam rangka pencegahan korupsi	
			Mempertahankan opini BPK : WTP				
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi				
			Optimalisasi Peran BUMD / Perusahaan Daerah (PT. Linggau Bisa) dalam peningkatan PAD				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Srategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Prioritas Pembangunan
					Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah		
		4.1.3	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Mengefektifkan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar	Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat, bimtek dan tugas belajar	Prioritas 5
					Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir		
					Tunjangan daerah berbasis kinerja		
				Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya layanan berbasis android	Peningkatan kualitas pelayanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prioritas 5
					Mendorong keterbukaan informasi publik		
				Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
				Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah	Optimalisasi penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran		
					Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah yang berkualitas	Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah yang berkualitas	Prioritas 5

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, 2021

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan yang berkesinambungan dalam pencapaian target sasaran.

Rencana program dan kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun penunjang pemerintahan daerah. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi komitmen pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada setiap OPD.

Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang di dalam dokumen RKPD ini bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021.

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021

Merujuk pada prioritas daerah RKPD Tahun 2021 yang terdiri dari 8 prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Prioritas Daerah RKPD Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pengembangan Pariwisata, perdagangan dan Industri Sebagai Pendorong Ekonomi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			59.615.330,00
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	59.615.330,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			313.235.140,00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	215.534.000,00
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	71.900.000,00
				1,900,000,000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	25.801.140,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		805.752.820,00
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	257.198.800,00
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	284.983.200,00

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	44.335.000,00
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	219.235.820,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		321.322.724,00
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	221.289.724,00
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100.033.000,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		34.432.486.285
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	4.898.052.565
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000
			Pembangunan Jalan	29.234.433.720
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota		34.525.244,00
			Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	34.525.244,00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota		624.878.069,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota	13.805.165,00
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	500.468.739,00
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	110.604.165,00
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		9.989.655,00
			Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	0,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	9.989.655,00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		184.344.298,00
			Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	136.382.425,00
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	47.961.873,00
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.175.773.735,00
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.170.185.400,00
			Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	5.588.335,00
		Pelaksanaan Manajemen		128.474.353,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota		
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	20.498.875,00
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	15.561.163,00
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kota	92.414.315,00
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		20.456.135,00
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	20.456.135,00
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.487.500,00
		Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		26.514.150,00
			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.619.660,00
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.894.490,00
	Program Pelayanan Izin			56.829.660,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Usaha Simpan Pinjam			
		Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Fasilitasi pemerintahan izin usaha simpan pinjam dan pembukuan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56.829.660,00
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			143.554.055,00
		Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi-koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Pengawasan kekuatan , kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	143.554.055,00
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi			59.595.385,00
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.595.385,00
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			146.718.420,00
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	146.718.420,00
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			110.855.350,00
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,	110.855.350,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		270.742.815
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60.414.375,00
	Program Pengembangan Umkm			210.328.440,00
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	210.328.440,00
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			0
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	0
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			602.200.000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan	10.000.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Saran distribusi Perdagangan	592.200.000,00
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			53.441.000,00
		Pemantauan harga dan stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu kabupaten/Kota	53.441.000,00
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pemeran Dagang Lokal	0
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			112.000.000,00
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera dan Tera Ulang	112.000.000,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			828.740.530,00
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	635.045.280,00
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	193.695.250,00
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.768.087.960

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kelurahan			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	602.703.325
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	420.378.105
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407.499.100
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	562.465.395
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	408.027.500
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	529.046.000
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	377.878.135
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	460.090.400
Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Untuk Mendukung Iklim Usaha dan Investasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			1.842.500.000
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.842.500.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			305.133.500
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	66.929.500

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	238.204.000
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			1.030.970.000
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.030.970.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			1.243.750.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.243.750.000
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			Peningkatan	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		34.132.486.285
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	4.898.052.565
			Pembangunan Jalan	29.234.433.720
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			596.086.000
		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	596.086.000
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota		196.997.325
			Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	196.997.325
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	28.549.775
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab /Kota		3.908.652.600
			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.908.652.600
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		96.001.200
			Koordinasi dan Sinkronisasi	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Perencanaan Penggunaan Tanah	96.001.200
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		88.000.000
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	88.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		52.500.000
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	52.500.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		118.192.000
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	69.742.000
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	48.450.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		326.122.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.300.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181.222.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000
Penyederhanaan Birokrasi untuk Mendorong Investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	79.663.700
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		384.000.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.539.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			1.019.448.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	806.776.750
			Reviu Laporan Keuangan	212.671.250
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		272,445,000
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	234.121.500,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			228.646.418,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.418.999,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	91.679.489,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.547.930,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	224.212.875,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.937.345,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.760.380,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.523.607,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			230.599.755,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	61.323.070,00
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan	169.276.685,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi		196.961.990
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	196.961.990
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.097.484.750
			Koordinasi dan Penyusunan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	137.916.450
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	417.441.600
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	185.875.100
			Penilaian Barang Milik Daerah	108.295.880
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	247.955.720
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	836539276
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			4,913,413,000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.435.647.045
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.390.147.545
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	45.499.500

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		2.132.880.000
			Pembahasan Rancangan Perda	1.832.880.000
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	300.000.000
	Program Aplikasi Informatika			12.379.753.728
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.263.425
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.689.200
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	91.851.718
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	74.569.849
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	267.322.950
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan	11.839.056.586

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kota Cerdas	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		111.133.616
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	111.133.616
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			230.375.037
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.395.115
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	70.804.323
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.165.054
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.010.545
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.669.353.218
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	55.526.318
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	256.736.150
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas	76.278.563

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Komunikasi Pemerintah Daerah	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	136.213.038
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72.784.816
			Pelayanan Informasi Publik	52.845.250
			Layanan Hubungan Media	699.197.753
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	299.995.860
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	19.775.470
Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas/ Berkarakter dan Merata	Program Pengelolaan Pendidikan			36.829.329.042
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.613.507.557
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.453.556.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.283.553.150
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.613.507.557
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.539.699.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	168.745.840
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	268.892.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7.093.901.938
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	500.000.000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.330.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.010.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	330.392.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	623.574.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		44.314.500
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	44.314.500
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		46.730.248.076
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	863.891.600
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.949.924.660
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	641.847.860
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.690.998.612
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	357.748.215
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.062.269.808
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.813.964.095

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	97.004.550
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	46.913.086
			Pengadaan Obat, Vaksin	1.199.685.590
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.603.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			339.366.102
		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	142.825.504
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	196.540.598
Penguatan Jaring Pengaman Sosial Daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		523.018.083
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	173.024.180
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	349.993.903
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,		204.928.830

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	130.648.830
			Penyediaan Alat Bantu	74.280.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		35.949.924.660
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.949.924.660
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3.005.356.730
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	252.088.310
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.062.269.808
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.690.998.612
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		47.200.150
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	47.200.150
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.739.706.900
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.539.699.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.007.900
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah		51.257.800

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kabupaten/Kota		
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.857.800
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	16.400.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	42.431.150
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	992.390.000
	Program Pengembangan Perumahan			2.026.363.830
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	196.663.496
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.829.700.334
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	71,169,000
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	802,762,200

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kompetensi	Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
	Program Penempatan Tenaga Kerja			262.248.565
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	65.104.365
			Job Fair/Bursa Kerja	197.144.200
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		115.699.190
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.980.015
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.719.175
Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Penyehatan Lingkungan	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		19,259,775,500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	19,259,775,500
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		25.224.819.901

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Utilitas Umum (PSU)			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.224.819.901
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		137.596.497.728
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	38.062.958.390
			Pemeliharaan Berkala Jalan	51.897.080.888
			Pemeliharaan Rutin Jalan	820.950.000
			Pembangunan Jembatan	46.128.176.550
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	687.331.900
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.243.750.000
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	0
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		35.377.370.852
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	14.658.440.852
			Peningkatan Saluran Drainase	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Perkotaan	20.618.930.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		53.590.501.072
			Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	93.435.000
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	53.398.284.134
			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	53.567.103
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	16.174.835
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	29.040.000
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		4.433.573.435
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4.433.573.435
	Program Pengembangan			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jasa Konstruksi			535.355.540
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Keterampilan Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	93.793.185
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	63.634.430
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab / Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	49.999.505
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	9.974.580
			Penyediaan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	50.000.670
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait penyelenggaraan IUJK Nasional di Kab/Kota	99.999.680
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatnya Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	117.953.785
			Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	49.999.705
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			288.062.924
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	56.112.525
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	28.132.399

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	195.229.375
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	-
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	8.588.625
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan LB3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	428.165.550
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		80.413.405
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	52.381.865
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	28.031.540
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	90,184,000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	23.562.250
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	-
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah		4.868.728.860
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota	4.753.056.000
			Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	36.692.960
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	78.979.900
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	49.836.051

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			20.558.819.483
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya.	311.200.000
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	8.625.000.000
			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	3.350.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	250.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	164.021.410
		Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Penyusunan rencana teknis dan lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	1.348.598.073
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.100.000.000
			Peningkatan jaringan irigasi permukaan	950.000.000
			Rehabilitas jaringan irigasi permukaan	2.210.000.000
			Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	250.000.000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			706.459.975
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	407.839.600
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.620.375
			'Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			209.854.082
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	162.238.082
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.776.000
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.840.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			756.181.896
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	606.181.952
		Pengendalian dan	Pengendalian Penyediaan	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	149.999.944
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	214.039.750
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	40.945.260
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.153.075.126
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	47.991.350
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	50.894.075
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	46.128.400
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	387.849.120
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	540.212.098
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	80.000.083

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.615.600
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.322.780

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2021

5.2.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja Operasi

Alokasi pendanaan program RKPD yang telah diuraikan diatas, khusus yang bersumber pada APBD Kota Lubuklinggau terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, satuan, lokasi, dan pagu indikatif. Adapun untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2.

5.2.2. Rencana Program dan Kegiatan pada Belanja Operasi

Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2021 dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Hibah. Belanja hibah dialokasikan pada kegiatan yang terkait dengan prioritas daerah RKPD Tahun 2021 seperti Program Pendidikan Gratis, serta organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

5.2.3. Usulan Pembangunan Nasional Tahun 2021 (DAK)

Pemerintah Kota Lubuklinggau juga mengajukan usulan-usulan kegiatan untuk tahun 2021 yang merupakan “kewenangan pusat” melalui aplikasi Krisna. Usulan APBN ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dengan berpedoman pada agenda Prioritas Nasional tahun 2021. Usulan ini mengadopsi proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan Holistik, Integratif Tematik dan Spasial (HITS) sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

5.2.4. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan umum belanja daerah adalah responsif terhadap arahan pemerintah untuk realokasi dan refocussing anggaran dalam rangka penanganan dampak Pandemi COVID-19. Sedangkan kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
5. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
8. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat Pandemi COVID-19.

Berikut ini dijelaskan Tabel 5.2 Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2021.

Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			800.331.601.022,00		813.804.289.853,00	13.472.688.831,00
1.01	Pendidikan			223.334.337.407,00		236.508.552.745,00	13.174.215.338,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			223.334.337.407,00		236.508.552.745,00	13.174.215.338,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			186.571.285.105,00		189.646.464.710,00	3.075.179.605,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			150.155.600,00		1.229.469.100,00	1.079.313.500,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan realisasi capaian / kinerja skpd (fisik dan keuangan)	5 laporan	150.155.600,00	5 laporan	1.229.469.100,00	1.079.313.500,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	184.383.901.442,00		186.967.101.442,00	2.583.200.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	183.637.045.442,00	12 bulan	186.417.045.442,00	2.780.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	17 orang	746.856.000,00	17 orang	550.056.000,00	-196.800.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			100.800.000,00		92.643.380,83	-8.156.619,17
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	85 orang	100.800.000,00	85 orang	92.643.380,83	-8.156.619,17
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			570.006.294,00		531.037.143,17	-38.969.150,83
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 item	20.711.794,00	8 item	20.711.794,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpakai	15 item	24.046.000,00	15 item	24.045.849,17	-150,83
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 item	128.641.000,00	100 item	78.641.000,00	-50.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	75 orang		75 orang		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11200 lembar	18.307.500,00	11200 lembar	29.297.500,00	10.990.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 bulan	13.800.000,00	12 bulan	39.600.000,00	25.800.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 kali	364.500.000,00	60 kali	338.741.000,00	-25.759.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			428.920.000,00		200.000.000,00	-228.920.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan kantor	50 item	428.920.000,00	50 item	200.000.000,00	-228.920.000,00
		Jumlah perlengkapan kantor	50 item		50 item		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174.683.644,00		163.693.644,00	-10.990.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	200 surat	25.990.000,00	200 surat	15.000.000,00	-10.990.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	3 rekening	106.693.644,00	3 rekening	106.693.644,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	2 orang	42.000.000,00	2 orang	42.000.000,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			762.818.125,00		462.520.000,00	-300.298.125,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	70 unit	412.520.000,00	70 unit	412.520.000,00	0,00
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	80 unit		80 unit		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	129 unit	350.298.125,00	129 unit	50.000.000,00	-300.298.125,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan			35.814.886.972,00		46.544.221.035,00	10.729.334.063,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			22.967.470.880,00		31.143.958.135,00	8.176.487.255,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru SD yang di rehab sedang/berat	1 ruang	0,00	1 ruang	240.000.000,00	240.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	4 sekolah	0,00	4 sekolah	1.453.556.000,00	1.453.556.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah kantor dan ruang guru sekolah yang direhab	4 Sekolah	13.448.553.150,00	4 Sekolah	14.283.553.150,00	835.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekola	3 Sekolah	630.000.000,00	3 Sekolah	510.000.000,00	-120.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	9 ruang	1.040.000.000,00	9 ruang	1.040.000.000,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa			0,00		3.613.507.557,00	3.613.507.557,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa miskin yang diberi bantuan	2 jenjang	1.539.699.000,00	2 jenjang	1.539.699.000,00	0,00
		Jumlah siswa miskin yang diberi bantuan seragam dan atribut	2 jenjang		2 jenjang		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktik/ peraga siswa	4 paket	3.449.469.100,00	4 paket	360.000.000,00	-3.089.469.100,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah LJUN yang diperiksa	4800 siswa/i	168.745.840,00	4800 siswa/i	168.745.840,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa/l yang dibina	240 Siswa/i	372.094.750,00	240 Siswa/i	372.094.750,00	0,00
		Jumlah Siswa/l yang dibina	250 Siswa/i		250 Siswa/i		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Tenaga Pendidik dan	250 guru	444.196.240,00	250 guru	268.892.000,00	-175.304.240,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	kependidikan yang lulus sertifikasi					
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.28	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	Jumlah Koordinasi yang diikuti dalam penyelenggaraan BOS	265 peserta	1.874.712.800,00	265 peserta	200.007.900,00	-1.674.704.900,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.29	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>			0,00		7.093.901.938,00	7.093.901.938,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>			8.219.793.090,00		9.180.325.750,00	960.532.660,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	Jumlah ruang kelas yang dibangun	20 Ruang	0,00	20 Ruang	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.03	<i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>	jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang di bangun	1 ruang	300.000.000,00	1 ruang	400.000.000,00	100.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.06	<i>Pembangunan Laboratorium</i>	Jumlah Laboratorium sekolah yang dibangun	2 sekolah	1.376.359.750,00	2 sekolah	546.359.750,00	-830.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.12	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	Jumlah bangunan sanitasi SMP yang dibangun	4 sekolah	553.556.000,00	4 sekolah	1.330.000.000,00	776.444.000,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	4 sekolah		4 sekolah		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.14	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	Jumlah ruang kelas SD yang direhab sedang/berat	7 sekolah	2.010.000.000,00	7 sekolah	2.010.000.000,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.15	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah</i>	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab sedang/berat	2 sekolah	880.000.000,00	2 sekolah	300.000.000,00	-580.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.17	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>			0,00		880.000.000,00	880.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.18	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</i>	Jumlah Laboratorium Sekolah yang d rehab	7 sekolah	400.000.000,00	7 sekolah	400.000.000,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.32	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>			0,00		0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.33	<i>Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik</i>	Jumlah exemplar buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	10 Eksemplar	2.300.000.000,00	10 Eksemplar	0,00	-2.300.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.35	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>			0,00		1.860.000.000,00	1.860.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.38	<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>			0,00		0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.40	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang di bina	55 Peserta	399.877.340,00	55 Peserta	330.392.000,00	-69.485.340,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.42	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>			0,00		623.574.000,00	623.574.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>			3.250.153.000,00		2.657.837.000,00	-592.316.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	Jumlah Lembaga yang memperoleh Bantuan bangunan	5 Lembaga	337.000.000,00	5 Lembaga	337.000.000,00	0,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.12	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</i>	jumlah lembaga PAUD yang memperoleh pengadaan alat praktik dan peraga siswa	4 Paket	17.711.000,00	4 Paket	17.711.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		paud					
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD Negeri	12 Lembaga TK	2.282.309.500,00	12 Lembaga TK	0,00	-2.282.309.500,00
		Jumlah lembaga PAUD swasta	2 Lembaga TK		2 Lembaga TK		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti pelatihan	100 Guru Paud	40.840.050,00	100 Guru Paud	92.526.000,00	51.685.950,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kegiatan Pengembangan PAUD yang dilaksanakan	2 Kegiatan	482.292.450,00	2 Kegiatan	0,00	-482.292.450,00
		Jumlah kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran yang di kembangkan	1 kurikulum		1 kurikulum		
		Jumlah Data dan informasi yang dibuat	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	20 Lembaga		20 Lembaga		
		Tersedianya Bantuan Operasional PAUD TK Negeri	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Tersedianya Bantuan Operasional PAUD TK Negeri	1 Lembaga		1 Lembaga		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Paud	100 Persen	90.000.000,00	100 Persen	2.210.600.000,00	2.120.600.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.377.470.002,00		3.562.100.150,00	2.184.630.148,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti ujian Paket A Setara SD	50 Warga Belajar	1.273.502.250,00	50 Warga Belajar	47.200.150,00	-1.226.302.100,00
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti ujian Paket B Setara SMP	150 Warga Belajar		150 Warga Belajar		
		Jumlah masyarakat yang mengikuti UNBK Paket C Setara SMA	150 Warga Belajar		150 Warga Belajar		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Laporan yang dibuat	6 Dokumen	31.524.500,00	6 Dokumen	2.300.000.000,00	2.268.475.500,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan kursus dan kelembagaan yang dibina	40 Lembaga	72.443.252,00	40 Lembaga	0,00	-72.443.252,00
		Jumlah Data dan informasi PNF yang tersedia	40 Lembaga		40 Lembaga		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	terlaksananya pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	100 Persen	0,00	100 Persen	1.214.900.000,00	1.214.900.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02	Program Pengembangan Kebudayaan			417.970.250,00		167.867.000,00	-250.103.250,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			171.997.250,00		67.875.000,00	-104.122.250,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Sistem informasi, database dan digitalisasi perekaman bahan pustaka bidang kebudayaan	6 dokumen	49.197.250,00	6 dokumen	67.875.000,00	18.677.750,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	Jumlah keragaman budaya daerah yang dikembangkan	2 buday	122.800.000,00	2 buday	0,00	-122.800.000,00
		Jumlah Pelaku Kesenian daerah yang dibina	400 orang		400 orang		
		Jumlah peserta penyelenggaraan kreativitas budaya daerah	100 peserta		100 peserta		
		Persentase kecukupan fasilitas kebudayaan daerah	5 persen		5 persen		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			245.973.000,00		99.992.000,00	-145.981.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	Tersedianya kajian adat budaya lokal daerah	1 Kebijakan	227.983.000,00	1 Kebijakan	99.992.000,00	-127.991.000,00
		Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		Jumlah Bahan Pustaka dan naskah kuno yang dilestarikan	2 Naskah		2 Naskah		
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	Jumlah pelaku kesenian daerah yang dibina	2 Kel/Org	17.990.000,00	2 Kel/Org	0,00	-17.990.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			166.995.000,00		150.000.000,00	-16.995.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			166.995.000,00		150.000.000,00	-16.995.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	50 persen	166.995.000,00	50 persen	150.000.000,00	-16.995.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03	Program Pengembangan Kurikulum			38.350.000,00		0,00	-38.350.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.02	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>			38.350.000,00		0,00	-38.350.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.02.01	<i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>	Jumlah lembaga yang mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	10 Lembaga	18.900.000,00	10 Lembaga	0,00	-18.900.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.02.02	<i>Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>	Jumlah lembaga yang mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	3 Silabus	9.450.000,00	3 Silabus	0,00	-9.450.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 03.2.02.03	<i>Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>	Jumlah lembaga yang mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	5 Exp	10.000.000,00	5 Exp	0,00	-10.000.000,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			225.451.280,00		0,00	-225.451.280,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan</i>			225.451.280,00		0,00	-225.451.280,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>						
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01.01	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	SDM Tenaga Pendidik Inklusif	100 Guru/Tendik	132.022.550,00	100 Guru/Tendik	0,00	-132.022.550,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 04.2.01.02	<i>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	Jumlah Guru yang Ter apresiasi	100 Orang/Guru	93.428.730,00	100 Orang/Guru	0,00	-93.428.730,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			99.398.800,00		0,00	-99.398.800,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.01	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>			99.398.800,00		0,00	-99.398.800,00
1.01 . 1-01.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	jumlah Data Dan Dokumentasi Cagar Budaya	1 Dokumen	99.398.800,00	1 Dokumen	0,00	-99.398.800,00
1.02	Kesehatan			186.044.797.078,00		193.980.629.282,00	7.935.832.204,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan			186.044.797.078,00		193.980.629.282,00	7.935.832.204,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			67.663.525.374,00		114.018.121.287,45	46.354.595.913,45
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			147.627.195,00		134.319.992,90	-13.307.202,10
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah RKA dan DPA OPD (dokumen)	4 Dokumen	99.886.152,00	4 Dokumen	86.851.152,00	-13.035.000,00
		Jumlah Renstra, Renja (dokumen) yang tersosialisasikan	4 Dokumen		4 Dokumen		
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (dokumen)	3 Dokumen	25.168.309,00	3 Dokumen	23.504.106,90	-1.664.202,10
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen informasi kesehatan (dokumen)	3 Dokumen	22.572.734,00	3 Dokumen	23.964.734,00	1.392.000,00
		Bahan komunikasi, informasi, edukasi monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan (peserta)	100 peserta		100 peserta		
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	60.249.224.869,00		66.006.350.869,00	5.757.126.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		60.115.688.444,00		65.880.408.444,00	5.764.720.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			126.186.000,00		118.592.000,00	-7.594.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan OPD (laporan)		7.350.425,00		7.350.425,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			0,00		0,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	6 Orang	0,00	6 Orang	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.101.330,00		190.507.220,00	-159.594.110,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 komponen	4.767.180,00	13 komponen	4.767.180,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga (item)	item	4.696.500,00	item	4.696.500,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	45 orang	29.594.400,00	45 orang	19.386.840,00	-10.207.560,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	7.620.250,00	10 jenis	7.608.700,00	-11.550,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (harian)	7 bulan	9.000.000,00	7 bulan	9.000.000,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	294.423.000,00	12 Bulan	145.048.000,00	-149.375.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			441.319.980,00		473.460.767,83	32.140.787,83
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, internet, air dan listrik (bulan)	12 kali	117.055.980,00	12 kali	156.960.767,83	39.904.787,83
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			324.264.000,00		316.500.000,00	-7.764.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180.252.000,00		215.894.926,40	35.642.926,40
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	roda 4	84.000.000,00	roda 4	87.694.926,40	3.694.926,40
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			96.252.000,00		128.200.000,00	31.948.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			6.295.000.000,00		46.997.587.511,32	40.702.587.511,32
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.295.000.000,00		46.997.587.511,32	40.702.587.511,32
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			116.327.219.912,00		76.591.025.892,55	-39.736.194.019,45
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			37.562.508.372,00		23.019.334.872,73	-14.543.173.499,27
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			6.178.920.000,00		0,00	-6.178.920.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan gedung	1 unit	7.312.984.360,00	1 unit	0,00	-7.312.984.360,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		puskesmas petanang					
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Pustu yang direhab/renovasi (unit)	1 unit	1.461.680.000,00	1 unit	0,00	-1.461.680.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas perkotaan (unit)	1 unit	5.319.471.200,00	1 unit	5.321.538.005,43	2.066.805,43
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00		233.548.615,25	233.548.615,25
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Item pengadaan sarana dan prasarana UPTD	5 unit	1.010.100.000,00	5 unit	1.357.573.000,00	347.473.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL yang disediakan	1 unit	46.913.086,00	1 unit	46.913.086,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			13.364.783.226,00		12.151.623.031,93	-1.213.160.194,07
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			96.838.150,00		97.004.550,00	166.400,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar perkapita)	1.5\$	1.047.987.350,00	1.5\$	1.199.685.590,12	151.698.240,12
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan ketersediaan BHP	1 unit	1.722.831.000,00	1 unit	2.611.448.994,00	888.617.994,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			78.741.767.840,00		53.556.347.319,82	-25.185.420.520,18
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			0,00		252.088.310,00	252.088.310,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan jaminan persalinan	2000 Orang	801.738.000,00	2000 Orang	863.891.600,00	62.153.600,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	66.673.800,00	100%	114.329.900,00	47.656.100,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bahan peningkatan balita sehat tingkat Kota	300	31.536.900,00	300	157.784.640,00	126.247.740,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Kelas 1 dan kelas 7 dan 9)	1	31.536.900,00	1	179.518.545,00	147.981.645,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan usia produktif (persen)	1	33.336.900,00	1	20.002.050,00	-13.334.850,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bahan pertemuan peningkatan kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan lansia (peserta)	1	31.536.900,00	1	173.182.140,00	141.645.240,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00		21.600.000,00	21.600.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00		22.800.000,00	22.800.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0,00		6.000.000,00	6.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang			0,00		71.700.000,00	71.700.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Terduga Tuberkulosis</i>						
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>			0,00		27.900.000,00	27.900.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>			0,00		2.492.781.022,60	2.492.781.022,60
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</i>			0,00		2.992.404.500,03	2.992.404.500,03
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>			0,00		328.432.938,00	328.432.938,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.16	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	Bahan KIE kesehatan kerja dan olahraga	100 Orang	58.246.650,00	100 Orang	76.760.880,00	18.514.230,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi penyehatan lingkungan (STBM) (peserta)	200 Orang	267.612.250,00	200 Orang	357.748.215,00	90.135.965,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18	<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>			0,00		690.813.940,00	690.813.940,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>			0,00		6.000.000,00	6.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ	1	13.915.000,00	1	0,00	-13.915.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>			0,00		58.200.000,00	58.200.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.23	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	Waktu penyediaan jasa petugas On Call Center And Mobile Clinic (bulan)	12 bulan	691.000.020,00	12 bulan	1.690.998.612,24	999.998.592,24
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	Cakupan Pelayanan Kesehatan penyakit menular zoonotik	1	286.541.350,00	1	1.062.269.808,00	775.728.458,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan kartu BPJS PBI bersumber APBD Kota Lubuklinggau (Jiwa)	93000 jiwa	35.199.924.660,00	93000 jiwa	35.949.924.660,00	750.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	Waktu penyediaan operasional (bulan)	12 bulan	35.289.964.831,00	12 bulan	4.813.964.094,97	-30.476.000.736,03
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	Waktu penyediaan operasional puskesmas mahaprana (bulan)	12 bulan	5.258.955.819,00	12 bulan	318.853.603,98	-4.940.102.215,02
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34	<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	Waktu Penyediaan operasional labkesda (Bulan)	12 bulan	37.400.000,00	12 bulan	144.900.000,00	107.500.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	Jumlah peserta pengembangan standar analisa jabatan Dinas Kesehatan (peserta)	30 peserta	641.847.860,00	30 peserta	641.847.860,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36	<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>			0,00		18.450.000,00	18.450.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon</i>			0,00		1.200.000,00	1.200.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wabah</i>						
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>			22.943.700,00		15.343.700,00	-7.600.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	100	22.943.700,00	100	15.343.700,00	-7.600.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			1.170.000.000,00		2.798.800.000,00	1.628.800.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>			1.170.000.000,00		2.603.000.000,00	1.433.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</i>	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1	1.170.000.000,00	1	2.603.000.000,00	1.433.000.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			0,00		195.800.000,00	195.800.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			0,00		195.800.000,00	195.800.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			528.866.800,00		233.316.000,00	-295.550.800,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>			91.917.750,00		92.242.000,00	324.250,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	10 puskesmas	91.917.750,00	10 puskesmas	72.927.000,00	-18.990.750,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>			0,00		19.315.000,00	19.315.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>			0,00		92.954.000,00	92.954.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat</i>			0,00		92.954.000,00	92.954.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>						
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.06	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>			436.949.050,00		48.120.000,00	-388.829.050,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.06.01	<i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</i>			0,00		48.120.000,00	48.120.000,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.06.02	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</i>	Bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi penyuluhan keamanan pangan (peserta)	100	436.949.050,00	100	0,00	-436.949.050,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			355.184.992,00		339.366.102,00	-15.818.890,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			117.142.223,00		196.540.598,00	79.398.375,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	Jumlah kader yang diberangkatkan ke jombore nasional (orang)	8	117.142.223,00	8	196.540.598,00	79.398.375,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.02	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			238.042.769,00		142.825.504,00	-95.217.265,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	Bahan pertemuan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan pemberdayaan masyarakat (Peserta)	30	238.042.769,00	30	142.825.504,00	-95.217.265,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			327.026.353.184,00		312.493.188.273,00	-14.533.164.911,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			327.026.353.184,00		312.493.188.273,00	-14.533.164.911,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.601.857.576,00		7.881.743.626,00	279.886.050,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			149.906.761,00		157.106.761,00	7.200.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	dokumen renstra	2 dok	74.907.913,00	2 dok	74.907.913,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang baik	5 dokumen	74.998.848,00	5 dokumen	82.198.848,00	7.200.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	5.589.253.304,00		5.775.911.904,00	186.658.600,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	14 bulan	4.848.979.304,00	14 bulan	5.020.469.904,00	171.490.600,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas</i>	jumlah pengadministrasi keuangan	12 bulan	740.274.000,00	12 bulan	755.442.000,00	15.168.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN						
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			181.380.000,00		226.380.000,00	45.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas ASN terpenuhi	100 set	44.880.000,00	100 set	89.880.000,00	45.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM4	3 orang	69.000.000,00	3 orang	69.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	40 orang	67.500.000,00	40 orang	67.500.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			865.023.162,00		879.398.162,00	14.375.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi	12 bulan	19.981.412,00	12 bulan	19.981.412,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	10 item	15.183.300,00	10 item	15.183.300,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang diadakan	12 bulan	249.944.750,00	12 bulan	114.319.750,00	-135.625.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 bulan	51.419.500,00	12 bulan	51.419.500,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	12 bulan	28.600.000,00	12 bulan	28.600.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	499.894.200,00	12 bulan	649.894.200,00	150.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			148.700.000,00		148.700.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional	5 unit	75.000.000,00	5 unit	75.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	5 unit	73.700.000,00	5 unit	73.700.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.184.874,00		288.837.324,00	26.652.450,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat yang ditanda tangani sesuai sop	5 jenis	9.900.000,00	5 jenis	9.900.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa listrik, air dan telekomunikasi	3 jenis	115.484.874,00	3 jenis	142.137.324,00	26.652.450,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	rata-rata pengeluaran jasa kebersihan	12 bulan	136.800.000,00	12 bulan	136.800.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			405.409.475,00		405.409.475,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	36 unit	269.384.475,00	36 unit	269.384.475,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	20 unit	36.025.000,00	20 unit	36.025.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	3 gedung	100.000.000,00	3 gedung	100.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02	Program Pengelolaan Izin Lokasi			157.467.325,00		196.997.325,00	39.530.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			157.467.325,00		196.997.325,00	39.530.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	15 kali	157.467.325,00	15 kali	196.997.325,00	39.530.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			9.982.798.043,00		20.558.819.483,00	10.576.021.440,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.699.199.970,00		12.700.221.410,00	7.001.021.440,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Data Base Bidang SDA	2 Dokumen	311.200.000,00	2 Dokumen	311.200.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	persen panjang turap terbangun sesuai standar	15 persen	2.975.000.000,00	15 persen	8.625.000.000,00	5.650.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	% Panjang Bronjong Terbangun sesuai standar	8 persen	2.000.000.000,00	8 persen	3.350.000.000,00	1.350.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	% bangunan tanggul sungai yang terpelihara	10 persen	250.000.000,00	10 persen	250.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perencanaan jaringan irigasi	2 dokumen	162.999.970,00	2 dokumen	164.021.410,00	1.021.440,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.283.598.073,00		7.858.598.073,00	3.575.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	jumlah dokumen data perencanaan	2 dokumen	1.348.598.073,00	2 dokumen	1.348.598.073,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi sesuai standar	1388 meter	675.000.000,00	1388 meter	3.100.000.000,00	2.425.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi terpelihara	1650 meter	200.000.000,00	1650 meter	950.000.000,00	750.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi terpelihara	1650 meter	1.810.000.000,00	1650 meter	2.210.000.000,00	400.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi terpelihara	500 meter	250.000.000,00	500 meter	250.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			1.243.750.000,00		1.243.750.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	dokumen perencanaan teknis infrastruktur air minum	2 dok	1.243.750.000,00	2 dok	1.243.750.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah sambungan rumah (SR)	300 SR	1.243.750.000,00	300 SR	1.243.750.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional			500.000.000,00		1.000.000.000,00	500.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04.2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			500.000.000,00		1.000.000.000,00	500.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04.2.01.05	<i>Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	jumlah bangunan pendukung TPA	1 ha	500.000.000,00	1 ha	1.000.000.000,00	500.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			88.099.775,00		28.549.775,00	-59.550.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04.2.01	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			88.099.775,00		28.549.775,00	-59.550.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 04.2.01.02	<i>Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Panjang Drainase Terbangun	2629 m1	88.099.775,00	2629 m1	28.549.775,00	-59.550.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			400.000.000,00		0,00	-400.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			400.000.000,00		0,00	-400.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.03	<i>Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota</i>	kapasitas layanan IPLT terbangun	19 M3/hari	400.000.000,00	19 M3/hari	0,00	-400.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			10.008.652.600,00		3.908.652.600,00	-6.100.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			10.008.652.600,00		3.908.652.600,00	-6.100.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan/ peningkatan gedung dan fasilitas publik	6 Dok	10.008.652.600,00	6 Dok	3.908.652.600,00	-6.100.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			40.280.938.500,00		35.377.370.852,00	-4.903.567.648,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			40.280.938.500,00		35.377.370.852,00	-4.903.567.648,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.05	<i>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	panjang drainase terbangun	2629 meter	12.062.008.500,00	2629 meter	14.658.440.852,00	2.596.432.352,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.06	<i>Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan</i>	panjang drainase dalam kondisi baik	2500 meter	28.118.930.000,00	2500 meter	20.618.930.000,00	-7.500.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.09	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</i>	panjang saluran drainase yang berfungsi baik	4091 meter	100.000.000,00	4091 meter	100.000.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08	Program Penataan Bangunan Gedung			37.935.138.143,00		53.590.501.072,00	15.655.362.929,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan</i>			37.935.138.143,00		53.590.501.072,00	15.655.362.929,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>						
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.01	<i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</i>	Rekomendasi IMB yg Dikeluarkan	100 persen	93.435.000,00	100 persen	93.435.000,00	0,00
		SLF yg Diterbitkan	100 persen		100 persen		
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.02	<i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dan fasilitas Publik Yang Terpelihara	1 kawasan	37.742.921.205,00	1 kawasan	53.398.284.134,00	15.655.362.929,00
		Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yg Terbangun	2 gedung		2 gedung		
		jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan/ peningkatan gedung dan fasilitas publik	2 dok		2 dok		
		Jumlah Fasilitas Publik Yang Terbangun	3 fasum		3 fasum		
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.03	<i>Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota</i>	jumlah NSPK yang disusun	1 dok	53.567.103,00	1 dok	53.567.103,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.04	<i>Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota</i>	bangunan gedung yang memiliki IMB	35 dok	16.174.835,00	35 dok	16.174.835,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.05	<i>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota</i>	bangunan gedung yang memiliki SLF	15 dok	29.040.000,00	15 dok	29.040.000,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			3.400.000.000,00		15.450.376.787,00	12.050.376.787,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 09.2.01	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.400.000.000,00		15.450.376.787,00	12.050.376.787,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 09.2.01.01	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota</i>	dokumen RTBL kawasan industri	1 dok	2.050.000.000,00	1 dok	4.433.573.435,00	2.383.573.435,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 09.2.01.03	<i>Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	jumlah bangunan fasilitas publik yang terbangun dan tertata	2 fasum	1.300.000.000,00	2 fasum	10.767.153.352,00	9.467.153.352,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 09.2.01.04	<i>Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</i>	jumlah bangunan fasilitas publik yang terpelihara	4 bangunan	50.000.000,00	4 bangunan	249.650.000,00	199.650.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10	Program Penatagunaan Tanah			96.001.200,00		96.001.200,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>			96.001.200,00		96.001.200,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>	% Ketersediaan Database Pertanahan yang update	1 kegiatan	96.001.200,00	1 kegiatan	96.001.200,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10	Program Penyelenggaraan Jalan			214.345.611.232,00		172.028.984.013,00	-42.316.627.219,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>			214.345.611.232,00		172.028.984.013,00	-42.316.627.219,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.01	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi</i>	Jumlah DED jalan dan Jembatan	6 dok	249.961.445,00	6 dok	4.898.052.565,00	4.648.091.120,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>						
		Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan	60 dok		60 dok		
		Jumlah Laporan Monev	12 dok		12 dok		
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.04	<i>Survei Kondisi Jalan/Jembatan</i>	% Ketersediaan Data Jalan Ter-Update	20 persen	100.000.000,00	20 persen	300.000.000,00	200.000.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.05	<i>Pembangunan Jalan</i>	Panjang Jalan Kota Memiliki Lebar Jalan Minimal 3 Meter	21 persen	42.065.522.012,00	21 persen	29.234.433.720,00	-12.831.088.292,00
		Panjang Jalan Kota Sesuai Standar Baku (Minimal 1 Lapis)	8 persen		8 persen		
		Panjang Jalan yg dilebarkan	14 persen		14 persen		
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.06	<i>Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	jalan memenuhi standar keselamatan jalan	23 persen	69.645.534.463,00	23 persen	38.062.958.390,00	-31.582.576.073,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.10	<i>Pemeliharaan Berkala Jalan</i>	panjang jalan yang terpelihara	7 persen	42.495.016.925,00	7 persen	51.897.080.888,00	9.402.063.963,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.11	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	panjang jalan yang terpelihara	7 persen	600.000.000,00	7 persen	820.950.000,00	220.950.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12	<i>Pembangunan Jembatan</i>	Persentase Ketersediaan Jembatan Kelas A Menuju Kawasan	24 persen	59.089.576.387,00	24 persen	46.128.176.550,00	-12.961.399.837,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.19	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	Panjang jembatan yang terpelihara	22 persen	100.000.000,00	22 persen	687.331.900,00	587.331.900,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			509.972.790,00		535.355.540,00	25.382.750,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.01	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>			149.999.115,00		157.427.615,00	7.428.500,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.01.04	<i>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	tersedianya tenaga terampil	20 orang	99.999.685,00	20 orang	93.793.185,00	-6.206.500,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.01.06	<i>Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi</i>	Tersedianya Pelatihan Sistem Manajemen Mutu	50 kegiatan	49.999.430,00	50 kegiatan	63.634.430,00	13.635.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			109.974.755,00		109.974.755,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.01	<i>Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi</i>	tersedianya Layanan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	7 layanan	49.999.505,00	7 layanan	49.999.505,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.02	<i>Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi</i>	Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung SIPJAKI	1 layanan	9.974.580,00	1 layanan	9.974.580,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.06	<i>Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha</i>	tersedianya Data 7 Layanan Dasar Informasi Jasa konstruksi	7 dokumen	50.000.670,00	7 dokumen	50.000.670,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.03	<i>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</i>			99.999.680,00		99.999.680,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.03.01	<i>Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Regulasi Jasa Konstruksi	1 hukum	99.999.680,00	1 hukum	99.999.680,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.04	<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>			149.999.240,00		167.953.490,00	17.954.250,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan Sosialisasi	1 kegiatan	99.999.535,00	1 kegiatan	117.953.785,00	17.954.250,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	tersedianya dokumen laporan money tertib administrasi jasa konstruksi	1 dok	49.999.705,00	1 dok	49.999.705,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			476.066.000,00		596.086.000,00	120.020.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			476.066.000,00		596.086.000,00	120.020.000,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	terupdatenya informasi penataan ruang	1 kegiatan	476.066.000,00	1 kegiatan	596.086.000,00	120.020.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			46.068.383.567,00		50.531.979.967,00	4.463.596.400,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			46.068.383.567,00		50.531.979.967,00	4.463.596.400,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.079.609.970,00		7.169.838.604,00	90.228.634,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.637.444,00		30.188.318,00	11.550.874,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	5 dokumen	18.637.444,00	5 dokumen	30.188.318,00	11.550.874,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.897.726.198,00		3.179.434.198,00	281.708.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	14 bulan	2.733.014.198,00	14 bulan	2.962.954.198,00	229.940.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan	22 OB	164.712.000,00	22 OB	216.480.000,00	51.768.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			227.824.300,00		244.182.800,00	16.358.500,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian batik	45 stel	126.624.300,00	45 stel	153.282.800,00	26.658.500,00
		Jumlah pakaian dinas siap pakai	45 stel		45 stel		
		Jumlah pakaian olahraga	30 stel		30 stel		
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	101.200.000,00	10 orang	90.900.000,00	-10.300.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.015.895.843,00		888.734.103,00	-127.161.740,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat kelistrikan	6 item	6.833.200,00	6 item	6.833.200,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	208.062.000,00	1 paket	164.917.500,00	-43.144.500,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	28 item	32.684.300,00	28 item	45.358.600,00	12.674.300,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor	40 item	310.151.028,00	40 item	213.459.488,00	-96.691.540,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	25000 lembar	21.746.835,00	25000 lembar	21.746.835,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar	5 surat kabar	14.000.000,00	5 surat kabar	14.000.000,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat - rapat koordinasi keluar daerah	60 kali	422.418.480,00	60 kali	422.418.480,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			757.185.000,00		661.970.000,00	-95.215.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas	4 unit	566.500.000,00	4 unit	489.500.000,00	-77.000.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler	1 paket	190.685.000,00	1 paket	172.470.000,00	-18.215.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.343.961.660,00		1.346.949.660,00	2.988.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1300 lembar	6.900.000,00	1300 lembar	6.000.000,00	-900.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening komunikasi	5 rekening	72.765.660,00	5 rekening	72.765.660,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pramubakti, PHL Listrik, Taman, Petugas Adm Kantor dan Penjaga Malam	70 OB	1.264.296.000,00	70 OB	1.268.184.000,00	3.888.000,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			818.379.525,00		818.379.525,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perpanjangan STNK	30 unit	16.200.525,00	30 unit	16.200.525,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	30 unit	582.014.000,00	30 unit	582.014.000,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 item	20.845.000,00	5 item	20.845.000,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang direhab.	1 gedung	199.320.000,00	1 gedung	199.320.000,00	0,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 02	Program Pengembangan Perumahan			2.224.745.785,00		2.026.363.830,00	-198.381.955,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			245.703.656,00		196.663.496,00	-49.040.160,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah rumah korban bencana (RTLH) yang dibantu	10 rumah	245.703.656,00	10 rumah	196.663.496,00	-49.040.160,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.979.042.129,00		1.829.700.334,00	-149.341.795,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Persentase PSU Perumahan yang	46 persen	1.979.042.129,00	46 persen	1.829.700.334,00	-149.341.795,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	diserahkan kepada Daerah					
		Persentase PSU sesuai Rencana Tapak (Siteplan)	46 persen		46 persen		
		Persentase Rumah Layan Huni	93 persen		93 persen		
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 03	Program Kawasan Permukiman			22.324.513.463,00		25.224.819.901,00	2.900.306.438,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>			22.324.513.463,00		25.224.819.901,00	2.900.306.438,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>	Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	8 Kecamatan	22.324.513.463,00	8 Kecamatan	25.224.819.901,00	2.900.306.438,00
		Cakupan panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	8 kecamatan		8 kecamatan		
		Cakupan talud lingkungan terbangun	8 kecamatan		8 kecamatan		
		Terfasilitasinya pembangunan rumah tangga berakses pembangunan limah dari sanimas idb	1 kegiatan		1 kegiatan		
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			14.439.514.349,00		16.110.957.632,00	1.671.443.283,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>			14.439.514.349,00		16.110.957.632,00	1.671.443.283,00
1.04 . 1-04.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	Cakupan layanan PJU Permukiman	86 persen	14.439.514.349,00	86 persen	16.110.957.632,00	1.671.443.283,00
		Jumlah makam pemerintahan yang aktif	3 lokasi		3 lokasi		
		Jumlah Taman Kondisi Baik	41 titik		41 titik		
		Jumlah titik penerangan Jalan Umum (JPU)	8 Kecamatan		8 Kecamatan		
		Persentase kecukupan luasan taman permukiman dalam kondisi baik	44 persen		44 persen		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			13.088.453.221,00		15.306.273.221,00	2.217.820.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja			6.755.286.979,00		7.421.766.979,00	666.480.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.793.244.767,00		5.405.712.959,00	612.468.192,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.162.719,00		4.773.109,00	610.390,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.162.719,00	2 dokumen	4.773.109,00	610.390,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.835.344.924,00		4.004.456.924,00	169.112.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		3.755.352.924,00		3.906.782.924,00	151.430.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			79.992.000,00		97.674.000,00	17.682.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00		22.713.500,00	2.713.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		6.663.500,00	6.663.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	20.000.000,00	1 Orang	16.050.000,00	-3.950.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			417.993.671,00		219.345.030,00	-198.648.641,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	10 Jenis	2.702.708,00	10 Jenis	2.100.000,00	-602.708,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpenuhi	3 Jenis	14.300.000,00	3 Jenis	22.320.000,00	8.020.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	36 Item	9.886.400,00	36 Item	10.598.500,00	712.100,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			94.064.103,00		55.622.760,00	-38.441.343,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis cetak, pengandaan dan penjiilidan dokumen	3 Jenis	9.566.700,00	3 Jenis	12.979.850,00	3.413.150,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	6 Koran	9.000.000,00	6 Koran	9.000.000,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas	12 Kali	278.473.760,00	12 Kali	106.723.920,00	-171.749.840,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		628.210.000,00	628.210.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah surat yang terpenuhi	600 Surat	0,00	600 Surat	506.850.000,00	506.850.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	0,00	12 bln	121.360.000,00	121.360.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.801.276,00		276.551.276,00	232.750.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.700.000,00		2.700.000,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perpanjangan izin kendaraan dinas/operasional	21 Unit	22.741.176,00	21 Unit	32.741.176,00	10.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perawatan peralatan gedung kantor	12 bln	18.360.100,00	12 bln	241.110.100,00	222.750.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			471.942.177,00		249.663.120,00	-222.279.057,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK kendaraan bermotor	12 unit	323.940.345,00	12 unit	236.075.000,00	-87.865.345,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	7 unit	144.474.000,00	7 unit	11.275.000,00	-133.199.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	9 jenis	3.527.832,00	9 jenis	2.313.120,00	-1.214.712,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan			1.962.042.212,00		2.016.054.020,00	54.011.808,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketertiban Umum						
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.962.042.212,00		1.991.054.020,00	29.011.808,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah</i>	Jumlah Patroli Perhari	3 x sehari	1.809.720.000,00	3 x sehari	1.842.500.000,00	32.780.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Rasio poskamling per jumlah RT	0,85	29.433.589,00	0,85	28.153.490,00	-1.280.099,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia</i>	Jumlah Tenaga pengendalian keamanan lingkungan yang terlatih	80 orang	77.676.946,00	80 orang	85.786.960,00	8.110.014,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	35.211.677,00	1	34.613.570,00	-598.107,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.09	<i>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i>	Persentase pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	10.000.000,00	1	0,00	-10.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>			0,00		25.000.000,00	25.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>			0,00		25.000.000,00	25.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana			6.333.166.242,00		7.884.506.242,00	1.551.340.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.621.988.242,00		3.889.722.442,00	267.734.200,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.833.167.135,00		2.937.557.135,00	104.390.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.833.167.135,00		2.937.557.135,00	104.390.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			416.503.761,00		407.739.611,00	-8.764.150,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah alat kelistrikan	9 Jenis Item	8.187.520,00	9 Jenis Item	7.578.985,00	-608.535,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 Unit	40.359.000,00	14 Unit	54.109.000,00	13.750.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	jumlah peralatan rumah tangga	26 Jenis Item	6.859.600,00	26 Jenis Item	11.390.300,00	4.530.700,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			100.320.011,00		84.821.011,00	-15.499.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis Item	17.727.550,00	7 Jenis Item	17.676.835,00	-50.715,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah langganan koran dan majalah	3600 Exm/ Th	9.000.000,00	3600 Exm/ Th	9.000.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	30 Kali	234.050.080,00	30 Kali	223.163.480,00	-10.886.600,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000,00		155.360.000,00	130.360.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	5 unit	25.000.000,00	5 unit	155.360.000,00	130.360.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			147.967.346,00		144.657.346,00	-3.310.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	600 Lembar	2.700.000,00	600 Lembar	2.750.000,00	50.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	60.835.346,00	12 bulan	60.835.346,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84.432.000,00		81.072.000,00	-3.360.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			199.350.000,00		244.408.350,00	45.058.350,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perpanjangan STNK	21 unit	187.404.000,00	21 unit	132.264.450,00	-55.139.550,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase cakupan logistik	1	11.946.000,00	1	10.065.000,00	-1.881.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	cakupan sarana dan prasarana	0,75	0,00	0,75	102.078.900,00	102.078.900,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03	Program Penanggulangan Bencana			0,00		1.063.649.800,00	1.063.649.800,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			0,00		71.259.800,00	71.259.800,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1 Pelayanan	0,00	1 Pelayanan	71.259.800,00	71.259.800,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0,00		992.390.000,00	992.390.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standart	106 J	0,00	106 J	992.390.000,00	992.390.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.711.178.000,00		2.931.134.000,00	219.956.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.711.178.000,00		2.931.134.000,00	219.956.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman yang dilakukan	50 kali	2.457.714.000,00	50 kali	2.485.214.000,00	27.500.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peralatan dalam kondisi baik	36 unit	253.464.000,00	36 unit	445.920.000,00	192.456.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>dan Alat Pelindung Diri</i>						
1.06	Sosial			4.769.276.565,00		4.983.666.365,00	214.389.800,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial			4.769.276.565,00		4.983.666.365,00	214.389.800,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.967.260.897,00		2.946.650.697,00	-20.610.200,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.289.918.396,00		2.380.428.396,00	90.510.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.219.277.461,00	12 bulan	2.309.787.461,00	90.510.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	60.696.000,00	12 bulan	60.696.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan	6 Laporan	4.946.755,00	6 Laporan	4.946.755,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Laporan CALK dan LRA yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	4.998.180,00	1 Laporan	4.998.180,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			25.520.000,00		25.520.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Pakaian olahraga pegawai kantor	30 Stel	25.520.000,00	30 Stel	25.520.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			250.192.115,00		181.421.915,00	-68.770.200,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah alat listrik dan elektronik	6 Item	6.985.170,00	6 Item	6.985.170,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 Item	5.720.000,00	20 Item	5.720.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			61.531.745,00		37.606.745,00	-23.925.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang cetak dan penggandaan	4 Item	9.979.200,00	4 Item	9.979.200,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah langganan surat kabar dan koran	15 Media	9.000.000,00	15 Media	9.000.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	70 Kali	156.976.000,00	70 Kali	112.130.800,00	-44.845.200,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			42.350.000,00		0,00	-42.350.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan Kantor	15 Item	42.350.000,00	15 Item	0,00	-42.350.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			88.723.096,00		88.723.096,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang terlayani	1500 Lembar	3.700.000,00	1500 Lembar	3.700.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah surat bermaterai yang terlayani	250 Lembar	37.023.096,00	250 Lembar	37.023.096,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah layanan jasa listrik, internet dan telepon	5 Rekening	48.000.000,00	5 Rekening	48.000.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>			270.557.290,00		270.557.290,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	28 Unit	207.596.000,00	28 Unit	207.596.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	28 Unit	6.563.190,00	28 Unit	6.563.190,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik	15 Item	12.650.000,00	15 Item	12.650.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Kantor, Makam Pahlawan, Posko Tagana, dan Rumah Singgah yang terpelihara	4 Unit	43.748.100,00	4 Unit	43.748.100,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02	Program Pemberdayaan Sosial			615.226.805,00		790.226.805,00	175.000.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>			615.226.805,00		790.226.805,00	175.000.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	8 Orang	57.600.000,00	8 Orang	57.600.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Sarana dan Prasarana	8 Orang	557.626.805,00	8 Orang	732.626.805,00	175.000.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			29.455.000,00		29.455.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>			29.455.000,00		29.455.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	Bantuan meneruskan perjalanan bagi orang terlantar	120 Orang	29.455.000,00	120 Orang	29.455.000,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04	Program Rehabilitasi Sosial			283.887.739,00		283.887.739,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>			283.887.739,00		283.887.739,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	Jumlah anak jalanan, anak nakal yang terampil dan siap kerja	20 Orang	74.280.000,00	20 Orang	74.280.000,00	0,00
		Penyandang disabilitas yang	75 Orang		75 Orang		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		mendapatkan alat bantu penyandang disabilitas					
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan dana stimulan Usaha Ekonomi Produktif	20 Orang	130.648.830,00	20 Orang	130.648.830,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 04.2.01.06	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	Eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan keterampilan	20 Orang	78.958.909,00	20 Orang	78.958.909,00	0,00
		Persentase perempuan dan anak korban sosial yang mendapatkan pendampingan sosial dan hukum	100 Orang		100 Orang		
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			619.037.293,00		619.037.293,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>			96.019.210,00		96.019.210,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	<i>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</i>			96.019.210,00		96.019.210,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			523.018.083,00		523.018.083,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01	<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang update	9000 Ruta	173.024.180,00	9000 Ruta	173.024.180,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 05.2.02.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Program Penanganan Kemiskinan yang Terfasilitasi	2 Program	349.993.903,00	2 Program	349.993.903,00	0,00
		Operasional bagi Unit Pelaksana PKH Kota Luubuklinggau	12 Bulan		12 Bulan		
		Jumlah masyarakat miskin dan kurang mampu yang memiliki keterampilan dan mendapat bantuan usaha ekonomi produktif	20 Ruta		20 Ruta		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendataan Program Perlindungan Sosial (DAK)	6 item		6 item		
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06	Program Penanganan Bencana			254.408.831,00		314.408.831,00	60.000.000,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>			61.408.831,00		61.408.831,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Penyediaan Makanan</i>	Jumlah barang bantuan / buffer stock untuk korban bencana yang tersedia	80 Paket	24.997.500,00	80 Paket	24.997.500,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03	<i>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</i>	Persentase kegiatan tanggap darurat bencana yang terfasilitasi	100 persen	36.411.331,00	100 persen	36.411.331,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan</i>			193.000.000,00		253.000.000,00	60.000.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Bencana Kabupaten/Kota</i>						
1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 . 06.2.02.02	<i>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</i>	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	42 Orang	193.000.000,00	42 Orang	253.000.000,00	60.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			83.361.814.238,00		86.007.272.629,10	2.645.458.391,10
2.07	Tenaga Kerja			4.377.824.805,00		4.373.809.805,00	-4.015.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01	Dinas Ketenagakerjaan			4.377.824.805,00		4.373.809.805,00	-4.015.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.820.600.430,00		3.816.585.430,00	-4.015.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			10.571.715,00		10.571.715,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang baik	9 Jenis	10.571.715,00	9 Jenis	10.571.715,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.660.552.846,00		2.782.537.846,00	121.985.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.577.824.846,00		2.681.809.846,00	103.985.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			82.728.000,00		100.728.000,00	18.000.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			59.400.000,00		36.000.000,00	-23.400.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 stell	37.400.000,00	40 stell	36.000.000,00	-1.400.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	1 orang	22.000.000,00	1 orang	0,00	-22.000.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			469.360.748,00		370.417.948,00	-98.942.800,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen instalasi	9 Komponen	9.394.000,00	9 Komponen	14.234.000,00	4.840.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah peralatan rumah tangga	17 Item	4.378.000,00	17 Item	4.378.000,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			172.479.748,00		50.841.748,00	-121.638.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 buah	22.462.000,00	12 buah	28.814.500,00	6.352.500,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan	2 Ekslampar	9.000.000,00	2 Ekslampar	9.000.000,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	50 Kali	251.647.000,00	50 Kali	263.149.700,00	11.502.700,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			156.090.000,00		155.640.000,00	-450.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan Gedung kantor	15 Buah	156.090.000,00	15 Buah	155.640.000,00	-450.000,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			126.340.651,00		126.340.651,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Persentase surat yang ditanda tangani sesuai SOP	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik, air dan Telekomunikasi	3 Jenis	87.340.651,00	3 Jenis	87.340.651,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.000.000,00		36.000.000,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338.284.470,00		335.077.270,00	-3.207.200,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	1	191.623.170,00	1	191.623.170,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor	15 Buah	146.661.300,00	15 Buah	143.454.100,00	-3.207.200,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			179.276.620,00		179.276.620,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			179.276.620,00		179.276.620,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang lulus kompetensi	400 Orang	179.276.620,00	400 Orang	179.276.620,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 04	Program Penempatan Tenaga Kerja			262.248.565,00		262.248.565,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			262.248.565,00		262.248.565,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			65.104.365,00		65.104.365,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	500 Lowongan	197.144.200,00	500 Lowongan	197.144.200,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 05	Program Hubungan Industrial			115.699.190,00		115.699.190,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			115.699.190,00		115.699.190,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Perusahaan yang telah mendapatkan Pembinaan Hubungan Industrial	0,1	42.980.015,00	0,1	42.980.015,00	0,00
2.07 . 2-07.0-00.0-00.01 . 05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan Pembinaan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	72.719.175,00	40 Perusahaan	72.719.175,00	0,00
2.09	Pangan			3.854.651.718,00		3.874.946.718,00	20.295.000,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan			3.854.651.718,00		3.874.946.718,00	20.295.000,00
2.09 . 2-09.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.502.906.952,00		2.579.987.952,00	77.081.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.383.605,00		10.383.605,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.383.605,00		10.383.605,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.033.983.719,00		2.114.278.719,00	80.295.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.954.651.719,00	12 bulan	2.034.946.719,00	80.295.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			79.332.000,00		79.332.000,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.256.628,00		235.256.628,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi/ Penerangan Kantor	13	9.978.800,00	13	9.978.800,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pelatan Rumah Tangga dan Kebersihan	22	6.785.900,00	22	6.785.900,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			89.203.609,00		89.203.609,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7	12.827.119,00	7	12.827.119,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100	9.900.000,00	100	9.900.000,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	106.561.200,00	100	106.561.200,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			169.620.000,00		155.220.000,00	-14.400.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang ditangani sesuai SOP	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	66.420.000,00	100	66.420.000,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			97.200.000,00		82.800.000,00	-14.400.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.663.000,00		64.849.000,00	11.186.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik/layak pakai	100	53.663.000,00	100	53.663.000,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen peralatan gedung dalam kondisi baik	100	0,00	100	11.186.000,00	11.186.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			47.519.260,00		40.945.260,00	-6.574.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			47.519.260,00		40.945.260,00	-6.574.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.2-09.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	% pemenuhan infrastruktur pangan	8 (delapan) kecamatan	47.519.260,00	8 (delapan) kecamatan	40.945.260,00	-6.574.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1.201.407.126,00		1.153.075.126,00	-48.332.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			98.885.425,00		98.885.425,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat ketersediaan informasi pangan up-to-date	100	47.991.350,00	100	47.991.350,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yg diberdayakan	4	50.894.075,00	4	50.894.075,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			452.309.520,00		433.977.520,00	-18.332.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan	92	51.210.400,00	92	46.128.400,00	-5.082.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			401.099.120,00		387.849.120,00	-13.250.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			650.212.181,00		620.212.181,00	-30.000.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rerata Angka Kecukupan Gizi(AKG) energi dan protein	2150 & 57	540.212.098,00	2150 & 57	540.212.098,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	% Kebutuhan kebun Bibit yang Terpenuhi	100	110.000.083,00	100	80.000.083,00	-30.000.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan			53.495.600,00		51.615.600,00	-1.880.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			53.495.600,00		51.615.600,00	-1.880.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan	2	53.495.600,00	2	51.615.600,00	-1.880.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan			49.322.780,00		49.322.780,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			49.322.780,00		49.322.780,00	0,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pangan	0	49.322.780,00	0	49.322.780,00	0,00
2.11	Lingkungan Hidup			12.492.937.357,00		13.353.676.401,00	860.739.044,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup			12.492.937.357,00		13.353.676.401,00	860.739.044,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.205.052.955,00		7.651.891.982,00	446.839.027,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			71.921.960,00		31.722.860,00	-40.199.100,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kinerja Perangkat Daerah</i>						
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		71.921.960,00		31.722.860,00	-40.199.100,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.913.645.375,00		4.048.184.375,00	134.539.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.792.937.375,00	12 bulan	3.931.172.375,00	138.235.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			120.708.000,00		117.012.000,00	-3.696.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			47.000.000,00		0,00	-47.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			47.000.000,00		0,00	-47.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			557.680.774,00		479.966.209,00	-77.714.565,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya Instalasi/ Penerangan Kantor	8 item	7.419.856,00	8 item	7.419.856,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Tersedianya Pelatan Rumah Tangga dan Kebersihan	29 item	9.245.500,00	29 item	9.245.500,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			243.799.628,00		192.810.728,00	-50.988.900,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13 item	87.318.990,00	13 item	122.115.125,00	34.796.135,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 surat kabar	9.000.000,00	3 surat kabar	9.000.000,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terlaksananya perjalanan dinas kedalam dan luar daerah	36 kali	200.896.800,00	36 kali	139.375.000,00	-61.521.800,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			360.800.000,00		143.706.200,00	-217.093.800,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Tersedianya kendaraan dinas operasional persampahan	1 unit	165.000.000,00	1 unit	0,00	-165.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 item	195.800.000,00	2 item	143.706.200,00	-52.093.800,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			375.094.016,00		474.897.464,00	99.803.448,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Terpenuhinya kelengkapan surat menyurat	675 lembar	4.130.000,00	675 lembar	4.130.000,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Terpenuhinya jasa sumber daya air listrik	12 bln	104.564.016,00	12 bln	204.367.464,00	99.803.448,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			266.400.000,00		266.400.000,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			1.878.910.830,00		2.473.414.874,00	594.504.044,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	12 unit	187.612.000,00	12 unit	187.612.000,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya</i>			1.459.849.750,00		2.016.353.794,00	556.504.044,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>						
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja	48 unit	33.325.000,00	48 unit	43.325.000,00	10.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			198.124.080,00		226.124.080,00	28.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			37.348.420,00		23.562.250,00	-13.786.170,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Persentase ketersediaan data bidang sumber daya air terupdate	0,3	37.348.420,00	0,3	23.562.250,00	-13.786.170,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.01.01	<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen IKLH Jumlah Dokumen IKPDLH	1 Dokumen 1 Dokumen	37.348.420,00	1 Dokumen 1 Dokumen	23.562.250,00	-13.786.170,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase air permukaan yang memenuhi baku mutu	0,8135	226.833.888,00	0,8135	288.062.924,00	61.229.036,00
		Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	1		1		
		Tingkat penurunan emisi GRK	0,1545		0,1545		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Cakupan titik pantau air dan udara	0,6675	59.180.725,00	0,6675	84.244.924,00	25.064.199,00
		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan		
		Persentase kendaraan bermotor lulus uji emisi	0,6		0,6		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	Jumlah pengambilan sample data kualitas air dan udara	29 Titik	32.752.925,00	29 Titik	56.112.525,00	23.359.600,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	Jumlah Kampung Iklim Jumlah kendaraan bermotor lulus uji emisi Tersedianya data GRK	1 Kelurahan 60 Kendaraan 1 Dokumen	26.427.800,00	1 Kelurahan 60 Kendaraan 1 Dokumen	28.132.399,00	1.704.599,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL	0,6155	150.030.788,00	0,6155	195.229.375,00	45.198.587,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02.01	<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</i>	Jumlah Parameter yang terakreditasi	6 Parameter	150.030.788,00	6 Parameter	195.229.375,00	45.198.587,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.03	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Persentase sungai yang memenuhi baku mutu	0,8135	17.622.375,00	0,8135	8.588.625,00	-9.033.750,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	Jumlah Sungai Yang Memenuhi Baku Mutu	1 Sungai	9.033.750,00	1 Sungai	0,00	-9.033.750,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 03.2.03.04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	8.588.625,00	1 Kegiatan	8.588.625,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas tutupan lahan	0,72	432.716.500,00	0,72	428.165.550,00	-4.550.950,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Persentase luasan RTH	0,2435	432.716.500,00	0,2435	428.165.550,00	-4.550.950,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 04.2.01.04	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	Jumlah Luasan RTH yang Terkelola	21805 Ha	432.716.500,00	21805 Ha	428.165.550,00	-4.550.950,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			18.335.990,00		0,00	-18.335.990,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS Limbah B3	0,185	18.335.990,00	0,185	0,00	-18.335.990,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki sistem Pengelolaan LB3	14 Pelaku Usaha	18.335.990,00	14 Pelaku Usaha	0,00	-18.335.990,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha / kegiatan yg memenuhi baku mutu	35,55%	152.667.905,00	35,55%	80.413.405,00	-72.254.500,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	29,33%	152.667.905,00	29,33%	80.413.405,00	-72.254.500,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup Yang Dikeluarkan	35 Pelaku Usaha 100 persen	116.145.865,00	35 Pelaku Usaha 100 persen	52.381.865,00	-63.764.000,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap dokumen lingkungan hidup	100 Pelaku usaha	36.522.040,00	100 Pelaku usaha	28.031.540,00	-8.490.500,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			27.433.825,00		0,00	-27.433.825,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.01 . 08.2.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</i>	Persentase komunitas/penggiat lingkungan hidup	0,46	27.433.825,00	0,46	0,00	-27.433.825,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kabupaten/Kota</i>						
2.11.2-11.0-00.0-00.01.08.2.01.01	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>	Jumlah Event Promosi Sadar Lingkungan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	27.433.825,00	1 Kegiatan	0,00	-27.433.825,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			20.928.875,00		0,00	-20.928.875,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase media edukasi dan komunikasi	0,43	20.928.875,00	0,43	0,00	-20.928.875,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01.01	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah Sekolah Adiwiyata Persentase Titik Pantau Yang Memenuhi Kriteria Penilaian Adipura	5 Sekolah 94 persen	20.928.875,00	5 Sekolah 94 persen	0,00	-20.928.875,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	1	33.531.430,00	1	12.851.430,00	-20.680.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10 pengaduan	33.531.430,00	10 pengaduan	12.851.430,00	-20.680.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pengaduan yang masuk	10 pengaduan	33.531.430,00	10 pengaduan	12.851.430,00	-20.680.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	0,8442	4.338.087.569,00	0,8442	4.868.728.860,00	530.641.291,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Persentase luas area yang terlayani	0,7443	4.338.087.569,00	0,7443	4.868.728.860,00	530.641.291,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.01	<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	36.692.960,00	1 Dokumen	36.692.960,00	0,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.03	<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pemenuhan Jasa PHL Terlaksananya Pembinaan PHL	293 Orang 1 Kegiatan	4.152.800.000,00	293 Orang 1 Kegiatan	4.753.056.000,00	600.256.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>	Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	18 item	148.594.609,00	18 item	78.979.900,00	-69.614.709,00
2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil			5.521.636.601,00		5.524.746.601,00	3.110.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			5.521.636.601,00		5.524.746.601,00	3.110.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.115.823.601,00		4.118.933.601,00	3.110.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.830.200,00		3.830.200,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya dokumen perencanaan dinas	3 dokumen	1.916.200,00	3 dokumen	1.916.200,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersedianya laporan capaian kinerja yang baik	5 laporan	1.914.000,00	5 laporan	1.914.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.501.960.644,00		2.625.070.644,00	123.110.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	12 bulan	2.500.130.244,00	12 bulan	2.623.240.244,00	123.110.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	terlaksananya jasa admin keuangan	10 orang	1.830.400,00	10 orang	1.830.400,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	52.800.000,00	1 laporan	52.800.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu	25 stel	52.800.000,00	25 stel	52.800.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			761.991.005,00		641.991.005,00	-120.000.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat - alat listrik kantor	8 item	11.000.000,00	8 item	11.000.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	20 item	156.816.000,00	20 item	156.816.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	32 item	24.965.600,00	32 item	24.965.600,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum sesuai kebutuhan	57 orang	370.211.710,00	57 orang	224.711.710,00	-145.500.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	20 item	23.320.000,00	20 item	48.820.000,00	25.500.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan	5 jenis	9.900.000,00	5 jenis	9.900.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya perjalanan dinas pegawai keluar daerah	46 kali	162.982.320,00	46 kali	162.982.320,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.795.375,00		2.795.375,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			255.200.000,00		255.200.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	1 unit	255.200.000,00	1 unit	255.200.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292.983.332,00		292.983.332,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diperolehnya pelayanan jasa surat	500 lembar	4.920.000,00	500 lembar	4.920.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedia jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	123.039.332,00	12 bulan	123.039.332,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata - rata pengeluaran jasa kebersihan kantor	2 orang	165.024.000,00	2 orang	165.024.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			247.058.420,00		247.058.420,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya kendaraan dinas operasional yang memiliki STNK Aktif	24 unit	156.679.170,00	24 unit	156.679.170,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan			44.192.950,00		44.192.950,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>						
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 jenis	36.679.000,00	6 jenis	36.679.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	9.507.300,00	1 paket	9.507.300,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02	Program Pendaftaran Penduduk			532.315.000,00		532.315.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.01.04	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	jumlah layanan pendaftaran penduduk	11 jenis	69.600.000,00	11 jenis	69.600.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>			462.715.000,00		462.715.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.02.02	<i>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan</i>	jumlah pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI, formulir dan buku	2 item	462.715.000,00	2 item	462.715.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03	Program Pencatatan Sipil			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>			69.600.000,00		69.600.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03.2.01.02	<i>Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	jumlah pelayanan pencatatan sipil	11 jenis	69.600.000,00	11 jenis	69.600.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			782.570.000,00		782.570.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>			735.800.000,00		735.800.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.01	<i>Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota	40 kali	186.426.000,00	40 kali	186.426.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.03	<i>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Jumlah fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	5 item	23.076.000,00	5 item	23.076.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.04	<i>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	jumlah pemanfaatan data kependudukan	2 kali	67.200.000,00	2 kali	67.200.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.05	<i>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	jumlah sosialisasi administrasi kependudukan	200 orang	52.262.000,00	200 orang	52.262.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.07	<i>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 item	22.836.000,00	5 item	22.836.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.08	<i>Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</i>	jumlah penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	2 semester	384.000.000,00	2 semester	384.000.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>			46.770.000,00		46.770.000,00	0,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.04.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan terkait</i>	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	2 semester	46.770.000,00	2 semester	46.770.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			21.328.000,00		21.328.000,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>			21.328.000,00		21.328.000,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	100 buku	21.328.000,00	100 buku	21.328.000,00	0,00
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa			5.538.803.099,00		5.508.977.826,00	-29.825.273,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			5.538.803.099,00		5.508.977.826,00	-29.825.273,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.704.442.825,00		2.753.031.950,00	48.589.125,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			61.475.333,00		59.999.958,00	-1.475.375,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (LKjIP, LKPJ, LPPD, Monev)	4 Dokumen	60.475.433,00	4 Dokumen	59.000.058,00	-1.475.375,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu (laporan fisik keuangan)	12 Dokumen	999.900,00	12 Dokumen	999.900,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1.895.768.267,00		1.973.943.267,00	78.175.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	jumlah gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.894.768.367,00	14 Bulan	1.972.943.367,00	78.175.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan Keuangan)	1 Dokumen	999.900,00	1 Dokumen	999.900,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			38.050.000,00		38.050.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	27 stel	28.050.000,00	27 stel	28.050.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	5 Orang	10.000.000,00	5 Orang	10.000.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			231.519.637,00		203.409.136,50	-28.110.500,50
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	238.656,00	1 Paket	238.656,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	691 Item	16.278.900,00	691 Item	16.278.900,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1865 Item	90.699.296,00	1865 Item	58.936.795,50	-31.762.500,50
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman	4840 Porsi		4840 Porsi		
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7634 Item	11.299.585,00	7634 Item	11.299.585,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	8.250.000,00	12 Bulan	8.250.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	104.753.200,00	12 Bulan	108.405.200,00	3.652.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			1.584.000,00		1.584.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah penyediaan mebeleur	32 Unit	825.000,00	32 Unit	825.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	6 Unit	759.000,00	6 Unit	759.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			238.739.088,00		238.739.088,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	100 persen	2.700.000,00	100 persen	2.700.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening Komunikasi, Air dan Listrik	5 Rekening/Bulan	33.239.088,00	5 Rekening/Bulan	33.239.088,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah cleaning service yang dibayarkan honornya	2 Oranng/Bulan	202.800.000,00	2 Oranng/Bulan	202.800.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			237.306.500,00		237.306.500,50	0,50
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajaknya	14 Unit	217.891.500,00	14 Unit	217.891.500,50	0,50
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah perbaikan peralatan kerja	31 Unit	19.415.000,00	31 Unit	19.415.000,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 02	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			99.999.800,00		519.999.800,00	420.000.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			99.999.800,00		99.999.800,00	0,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 02.2.01.03	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	Jumlah aturan perundang-undangan daerah tentang PUG bidang kesehatan	1 dokumen	99.999.800,00	1 dokumen	99.999.800,00	0,00
		Jumlah dokumen informasi dan data sebaran implementasi PUG di bidang kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lembaga PUG bidang kesehatan	25 Persen		25 Persen		
		Persentase ketersediaan SDM PUG bidang kesehatan	100 Persen		100 Persen		
		Jumlah aturan perundang-undangan daerah tentang PUG bidang pendidikan	1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah dokumen informasi dan data	1 dokumen		1 dokumen		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebaran implementasi PUG di bidang pendidikan					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lembaga PUG bidang pendidikan	25 Persen		25 Persen		
		Persentase ketersediaan SDM PUG bidang pendidikan	100 Persen		100 Persen		
		Jumlah aturan perundang-undangan daerah tentang PUG bidang ekonomi	1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah dokumen informasi dan data sebaran implementasi PUG di bidang ekonomi	1 dokumen		1 dokumen		
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			0,00		420.000.000,00	420.000.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Jumlah PKIE (komunikasi, informasi, edukasi) kampanye yang disebarluaskan kepada masyarakat (perempuan)	100 Persen	0,00	100 Persen	420.000.000,00	420.000.000,00
		Persentase ketersediaan SDM lembaga masyarakat dalam edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	65.33 Persen		65.33 Persen		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lembaga masyarakat dalam edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	25 Persen		25 Persen		
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03	Program Perlindungan Perempuan			619.825.690,00		176.424.284,00	-443.401.406,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			10.000.100,00		29.390.000,00	19.389.900,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah aturan perundang-undangan daerah tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1 dokumen	10.000.100,00	1 dokumen	22.350.000,00	12.349.900,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.01.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase ketersediaan SDM satuan tugas di setiap anggota gugus tugas yang memiliki sertifikat pelatihan KHA	20 Persen	0,00	20 Persen	7.040.000,00	7.040.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</i>			0,00		109.967.000,00	109.967.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kabupaten/Kota</i>						
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase hasil kesepakatan (gugus tugas) yang diselesaikan	70 Persen	0,00	70 Persen	109.967.000,00	109.967.000,00
		Persentase ketersediaan SDM gugus tugas kota layak anak	100 Persen		100 Persen		
		Jumlah aturan perundang-undangan daerah tentang data terpilah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Persentase ketersediaan SDM kelompok kerja data terpilah	100 Persen		100 Persen		
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			609.825.590,00		37.067.284,00	-572.758.306,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.03.02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase ketersediaan SDM penyedia layanan perlindungan anak	100 Persen	0,00	100 Persen	37.067.284,00	37.067.284,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 03.2.03.04	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase jenis layanan yang terstandar	70 Persen	609.825.590,00	70 Persen	0,00	-609.825.590,00
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	50 Persen		50 Persen		
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			1.299.905.309,00		1.247.490.635,00	-52.414.674,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.299.905.309,00		1.247.490.635,00	-52.414.674,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Persentase sarana dan prasarana gotong-royong yang dipenuhi	25 persen	49.952.686,00	25 persen	49.836.050,50	-116.635,50
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05.2.01.03	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</i>	Persentase sarana dan prasarana	25 persen	199.953.013,00	25 persen	200.097.212,50	144.199,50

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	lembaga masyarakat dalam musrenbang yang dipenuhi					
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05.2.01.04	<i>Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Persentase kader PKK memiliki sertifikat	25 persen	999.999.765,00	25 persen	947.344.065,00	-52.655.700,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 05.2.01.06	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	Persentase sarana dan prasarana posyantek yang dipenuhi	25 persen	49.999.845,00	25 persen	50.213.307,00	213.462,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			305.849.375,00		291.769.665,00	-14.079.710,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			305.849.375,00		291.769.665,00	-14.079.710,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			305.849.375,00		291.769.665,00	-14.079.710,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07	Program Perlindungan Khusus Anak			508.780.100,00		520.261.492,00	11.481.392,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			10.000.100,00		38.454.005,00	28.453.905,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah PKIE (komunikasi, informasi, edukasi) kampanye yang disebarakan kepada masyarakat (anak)	100 Lembar	10.000.100,00	100 Lembar	7.040.000,00	-2.960.100,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			0,00		31.414.005,00	31.414.005,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</i>			498.780.000,00		441.304.592,00	-57.475.408,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			0,00		258.734.000,00	258.734.000,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.02.04	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase jenis layanan yang terstandar	70 persen	498.780.000,00	70 persen	182.570.592,00	-316.209.408,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			0,00		40.502.895,00	40.502.895,00
2.13 . 2-08.2-13.0-00.01 . 07.2.03.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			0,00		40.502.895,00	40.502.895,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			5.938.810.798,00		5.932.000.798,00	-6.810.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			5.938.810.798,00		5.932.000.798,00	-6.810.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.504.210.138,00		2.565.029.498,00	60.819.360,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1.871.400.959,00		1.944.590.959,00	73.190.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1.871.400.959,00		1.944.590.959,00	73.190.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			5.000.000,00		0,00	-5.000.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			5.000.000,00		0,00	-5.000.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			285.551.135,00		326.603.391,00	41.052.256,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Peralatan rumah tangga	10 Jns	4.158.000,00	10 Jns	30.256.341,00	26.098.341,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			49.415.135,00		70.345.450,00	20.930.315,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Barang cetakan dan penggandaan	600 Lembar	24.860.000,00	600 Lembar	15.270.000,00	-9.590.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 bacaan	9.000.000,00	20 bacaan	9.000.000,00	0,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1	198.118.000,00	1	201.731.600,00	3.613.600,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			165.500.304,00		162.827.148,00	-2.673.156,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah materai yang terpenuhi	50	2.850.000,00	50	2.850.000,00	0,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	33.290.304,00	100	24.617.148,00	-8.673.156,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			129.360.000,00		135.360.000,00	6.000.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			176.757.740,00		131.008.000,00	-45.749.740,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	STNK dan KIR Kendaraan dinas	8 ,55 mobil,motor	18.604.740,00	8 ,55 mobil,motor	10.300.000,00	-8.304.740,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Jabatan</i>						
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	63 Unit	145.063.000,00	63 Unit	107.618.000,00	-37.445.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	16 Unit	13.090.000,00	16 Unit	13.090.000,00	0,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02	Program Pengendalian Penduduk			664.923.059,00		656.610.900,00	-8.312.159,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>			2.641.309,00		0,00	-2.641.309,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Dokumen GDPK Kota lubuklinggau	1 Dokumen	2.641.309,00	1 Dokumen	0,00	-2.641.309,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			662.281.750,00		656.610.900,00	-5.670.850,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	72 Data	567.683.780,00	72 Data	567.814.400,00	130.620,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12	<i>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan	0,9	89.700.000,00	0,9	88.796.500,00	-903.500,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	72 Data	4.897.970,00	72 Data	0,00	-4.897.970,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			2.701.118.671,00		2.667.929.250,00	-33.189.421,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>			2.149.881.302,00		2.126.853.150,00	-23.028.152,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	Jumlah Stakeholder aktif dalam promosi BKR	25 Orang	77.760.000,00	25 Orang	59.934.000,00	-17.826.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	Jumlah Kecamatan yang terlayani KIE	8 Kec	5.000.000,00	8 Kec	0,00	-5.000.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.01.07	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	Jumlah Kegiatan Harganas yang diikuti	2 Kegiatan	2.067.121.302,00	2 Kegiatan	2.066.919.150,00	-202.152,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>			3.882.420,00		12.065.300,00	8.182.880,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	<i>Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	Cakupan anggota BKL yang ber KB	0,74	1.170.590,00	0,74	0,00	-1.170.590,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan	5 Sektor	2.711.830,00	5 Sektor	12.065.300,00	9.353.470,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan pelaksanaan program pembangunan					
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah institusi masyarakat peduli KB aktif	72 PPKBD	509.647.949,00	72 PPKBD	505.667.800,00	-3.980.149,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Rasio PKB/PLKB	0,026	16.885.180,00	0,026	34.857.800,00	17.972.620,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>			22.480.000,00		21.500.000,00	-980.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.06	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	0,255	432.899.419,00	0,255	432.910.000,00	10.581,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.07	<i>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>	Cakupan Kecamatan yang tersosialisasi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak	8 Kali	4.897.970,00	8 Kali	0,00	-4.897.970,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.08	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Jumlah Sarana & Prasarana pelayanan KIE (BKL KIT, BKB KIT, KIE KIT, GENRE KIT REMOVAL IMPLANT KIT)	5 Jenis	3.603.380,00	5 Jenis	0,00	-3.603.380,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.03.09	<i>Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</i>	Jumlah Kelompok yang terlayani PIK Remaja Tumbuh/Tegak	21 Kelompok	28.882.000,00	21 Kelompok	16.400.000,00	-12.482.000,00
		Jumlah peserta KB DO	2800 Dropout		2800 Dropout		
		Jumlah Akseptor KB baru yang mendapatkan pelayanan	100 Akseptor MO		100 Akseptor MO		
		% Ketersediaan Petugas pelayanan KB	0,96		0,96		
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>			37.707.000,00		23.343.000,00	-14.364.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 03.2.04.03	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	Jumlah Kampung KB yang aktif	10 Kampung KB	37.707.000,00	10 Kampung KB	23.343.000,00	-14.364.000,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			68.558.930,00		42.431.150,00	-26.127.780,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			68.558.930,00		42.431.150,00	-26.127.780,00
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-</i>	Keluarga Pra KS/KS 1 yang ikut kelompok UPPKS	0,73	21.386.215,00	0,73	42.431.150,00	21.044.935,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</i>						
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 04.2.01.08	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	% Data KKBP yang akurat dan tepat waktu	0,9	47.172.715,00	0,9	0,00	-47.172.715,00
2.15	Perhubungan			8.654.854.425,00		9.116.904.925,00	462.050.500,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	Keluarga Pra KS/KS 1 yang ikut kelompok UPPKS	0,73	8.654.854.425,00	0,73	9.116.904.925,00	462.050.500,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Data KKBP yang akurat dan tepat waktu	0,9	5.616.306.136,00	0,9	5.855.461.786,00	239.155.650,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			46.169.338,00		46.169.338,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu	1	29.999.640,00	1	29.999.640,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Yang Baik	5 Laporan	16.169.698,00	5 Laporan	16.169.698,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.846.797.661,00		3.974.412.661,00	127.615.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3.754.895.942,00	1 Laporan	3.882.510.942,00	127.615.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			87.552.000,00		87.552.000,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersedianya Pakaian Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	25 Stel	4.349.719,00	25 Stel	4.349.719,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			80.343.350,00		27.951.350,00	-52.392.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			14.960.000,00		14.960.000,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			65.383.350,00		12.991.350,00	-52.392.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			447.879.576,00		449.022.826,00	1.143.250,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya Alat - Alat Listrik Kantor	8 Item	12.990.736,00	8 Item	12.990.736,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	20 Item	14.499.650,00	20 Item	15.642.900,00	1.143.250,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			163.996.690,00		163.996.690,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	20 Item	45.490.500,00	20 Item	45.490.500,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dapat Dimanfaatkan	5 Jenis Koran	9.000.000,00	5 Jenis Koran	9.000.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas Pegawai Ke Luar Daerah	46 Kali	201.902.000,00	46 Kali	201.902.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			338.855.000,00		468.855.000,00	130.000.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			255.200.000,00		385.200.000,00	130.000.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler Kantor	4 Jenis	20.735.000,00	4 Jenis	20.735.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	62.920.000,00	5 Jenis	62.920.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338.988.461,00		346.150.861,00	7.162.400,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diperolehnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	2.400.000,00	500 Lembar	2.600.000,00	200.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa, Komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan	74.988.461,00	12 Bulan	81.950.861,00	6.962.400,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			261.600.000,00		261.600.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			517.272.750,00		542.899.750,00	25.627.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Yang Memiliki STNK Aktif	24 Unit	299.422.750,00	24 Unit	325.049.750,00	25.627.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	47.850.000,00	6 Jenis	47.850.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	170.000.000,00	1 Paket	170.000.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			3.038.548.289,00		3.261.443.139,00	222.894.850,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tatralok dan Rencana Jaringan Induk LLAJ	1 Dokumen	44.459.244,00	1 Dokumen	34.525.244,00	-9.934.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			44.459.244,00		34.525.244,00	-9.934.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Teknologi Informasi Yang Diterapkan	1 Teknologi Informasi	400.562.569,00	1 Teknologi Informasi	624.878.069,00	224.315.500,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			23.739.665,00		13.805.165,00	-9.934.500,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			266.218.739,00		500.468.739,00	234.250.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			110.604.165,00		110.604.165,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			9.989.655,00		9.989.655,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola	Jumlah Terminal	4 Terminal	9.989.655,00	4 Terminal	9.989.655,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Terminal Tipe C</i>						
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>			65.667.748,00		184.344.298,00	118.676.550,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.04.01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Persentase Parkir Memiliki sarana&Prasarana Sesuai Standar	0,28	17.705.875,00	0,28	136.382.425,00	118.676.550,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.04.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase Petugas Parkir Terlatih	0,58	47.961.873,00	0,58	47.961.873,00	0,00
		Jumlah Titik Kemacetan Akibat Pelanggaran Parkir	5 Titik		5 Titik		
		Jumlah Ruang Parkir Illegal	18 Titik		18 Titik		
		Persentase Ruang Parkir Tertib Pengelolaan	0,81		0,81		
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>			2.175.773.735,00		2.175.773.735,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.04	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah KBWU Lulus Uji	4.250 Unit	2.170.185.400,00	4.250 Unit	2.170.185.400,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.07	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Persentase Prasarana PKB Layak Fungsi	1 Gedung	5.588.335,00	1 Gedung	5.588.335,00	0,00
		Persentase Sarana Utama Laik Fungsi	0,3		0,3		
		Persentase Penunjang PKB Laik Fungsi	0,5		0,5		
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.06	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>			236.036.053,00		173.474.353,00	-62.561.700,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.06.01	<i>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Pelaksanaan Kajian dan Forum Lalu Lintas	3 Kajian	20.498.875,00	3 Kajian	20.498.875,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.06.02	<i>Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>			45.000.000,00		45.000.000,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.06.03	<i>Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Program Edukasi Sadar Lalu Lintas	3 Program	20.499.163,00	3 Program	15.561.163,00	-4.938.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.06.04	<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengendalian Lalu Lintas	390 Kali	150.038.015,00	390 Kali	92.414.315,00	-57.623.700,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.08	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>			20.456.135,00		20.456.135,00	0,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.08.03	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	Jumlah data Inspeksi Sarana & Prasarana Transportasi Laik Jalan	1 Laporan	20.456.135,00	1 Laporan	20.456.135,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat kelengkapan Keselamatan Berkendara	25 Kend		25 Kend		
		Persentase Kendaraan Laik Jalan	0,13		0,13		
		Persentase Awak Kendaraan Laik Jalan	0,35		0,35		
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			34.604.000,00		11.487.500,00	-23.116.500,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.01	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	IKM Layanan Transportasi Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	34.604.000,00	1 Dokumen	11.487.500,00	-23.116.500,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.10	<i>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			50.999.150,00		26.514.150,00	-24.485.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.10.01	<i>Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	IKM Layanan Transportasi Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	24.999.660,00	1 Dokumen	17.619.660,00	-7.380.000,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.10.02	<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum	11 Kali	25.999.490,00	11 Kali	8.894.490,00	-17.105.000,00
2.16	Komunikasi dan Informatika			16.438.728.550,00		17.747.586.050,00	1.308.857.500,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika			16.438.728.550,00		17.747.586.050,00	1.308.857.500,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.210.454.466,00		3.356.970.451,00	146.515.985,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			6.604.098,00		6.604.098,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.604.098,00	5 Laporan	6.604.098,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.131.765.838,00		2.222.460.838,00	90.695.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1.938.727.838,00		2.026.912.838,00	88.185.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			193.038.000,00		195.548.000,00	2.510.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			69.575.000,00		70.455.000,00	880.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51 Stell	69.575.000,00	51 Stell	70.455.000,00	880.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			457.755.716,00		441.940.776,00	-15.814.940,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat	12 bulan	14.556.975,00	12 bulan	14.556.975,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Elektronik/Penerangan Kantor					
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	18.320.500,00	16 jenis	24.069.500,00	5.749.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			164.840.446,00		72.179.506,00	-92.660.940,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			22.052.195,00		22.052.195,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	9.900.000,00	12 bulan	9.900.000,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	228.085.600,00	12 bulan	299.182.600,00	71.097.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			107.778.000,00		219.068.925,00	111.290.925,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	4 unit	107.778.000,00	4 unit	219.068.925,00	111.290.925,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			228.871.660,00		230.521.660,00	1.650.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Materai	3.350.000,00	1200 Materai	5.000.000,00	1.650.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	163.121.660,00	12 bulan	163.121.660,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			62.400.000,00		62.400.000,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.104.154,00		165.919.154,00	-42.185.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	9 unit	136.823.010,00	9 unit	136.823.010,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Peralatan Mabeleur yang siap pakai	23 unit	42.185.000,00	23 unit	0,00	-42.185.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.600.000,00		17.600.000,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	11.496.144,00	10 unit	11.496.144,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			712.783.653,00		1.669.353.218,00	956.569.565,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			712.783.653,00		1.669.353.218,00	956.569.565,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	2 kebijakan	73.614.318,00	2 kebijakan	55.526.318,00	-18.088.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prosentase Opini Negatif yang di klarifikasi	1 persen	56.736.150,00	1 persen	256.736.150,00	200.000.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	Tingkat Kepuasan Publik terhadap	Sangat	76.278.563,00	Sangat	76.278.563,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Pengelolaan dan pelayanan Informasi	Memuaskan		Memuaskan		
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.04	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Liputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan daerah	60 liputan	136.213.038,00	60 liputan	136.213.038,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.05	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah media yang disebarluaskan	38000 media	72.784.816,00	38000 media	72.784.816,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.06	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	Rasio Layanan Pemberian Informasi terhadap Permintaan Informasi	1 persen	52.845.250,00	1 persen	52.845.250,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.07	<i>Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Publikasi melalui media massa	1600 media	199.997.753,00	1600 media	699.197.753,00	499.200.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.08	<i>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah partisipasi dalam forum	3 forum	24.538.295,00	3 forum	299.995.860,00	275.457.565,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.10	<i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	Jumlah sosialisasi	6 sosialisasi	19.775.470,00	6 sosialisasi	19.775.470,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			225.992.587,00		230.375.037,00	4.382.450,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			189.266.642,00		194.364.492,00	5.097.850,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.02	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase PD yang menerapkan persandian	20 persen	24.920.465,00	20 persen	24.395.115,00	-525.350,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.03	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Persentase perlindungan informasi PD melalui persandian	17 persen	65.174.923,00	17 persen	70.804.323,00	5.629.400,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.04	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase penyelenggaraan persandian	20 persen	99.171.254,00	20 persen	99.165.054,00	-6.200,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.02	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			36.725.945,00		36.010.545,00	-715.400,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.02.01	<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase kecukupan peralatan persandian	60 persen	36.725.945,00	60 persen	36.010.545,00	-715.400,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			111.133.616,00		111.133.616,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek	200 peserta	111.133.616,00	200 peserta	111.133.616,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Prosentase Data Statistik dasar yang di kelola Bersama BPS	1	111.133.616,00	1	111.133.616,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			12.178.364.228,00		12.379.753.728,00	201.389.500,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			56.263.425,00		56.263.425,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.02	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama</i>	Presentase Informasi Publik yang	95 persen	56.263.425,00	95 persen	56.263.425,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	dipublikasikan					
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			12.122.100.803,00		12.323.490.303,00	201.389.500,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.01	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>			31.044.200,00		50.689.200,00	19.645.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.03	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>			76.851.718,00		91.851.718,00	15.000.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan diintegrasikan	4 Aplikasi	74.569.849,00	4 Aplikasi	74.569.849,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.08	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	Jumlah OPD yang terlayani Internet terintegrasi	10 OPD	202.250.950,00	10 OPD	267.322.950,00	65.072.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.09	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i>	Jumlah peralatan yang tersedia dan dipelihara	3 unit	11.737.384.086,00	3 unit	11.839.056.586,00	101.672.500,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4.575.772.329,00		4.560.702.324,00	-15.070.005,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			4.575.772.329,00		4.560.702.324,00	-15.070.005,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.801.599.879,00		3.772.406.639,00	-29.193.240,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.856.329.019,00		2.949.259.019,00	92.930.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.777.321.019,00		2.870.251.019,00	92.930.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			79.008.000,00		79.008.000,00	0,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			462.375.730,00		413.672.490,00	-48.703.240,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	5 Komponen	20.740.000,00	5 Komponen	10.740.000,00	-10.000.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	31 item	22.207.000,00	31 item	21.747.000,00	-460.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			127.700.530,00		64.500.530,00	-63.200.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			24.990.000,00		24.990.000,00	0,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan	1.460 Eksemplar	9.000.000,00	1.460 Eksemplar	9.000.000,00	0,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	jumlah perjalanan dinas	40 kali	257.738.200,00	40 kali	282.694.960,00	24.956.760,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			137.280.000,00		63.860.000,00	-73.420.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor	6 unit	137.280.000,00	6 unit	63.860.000,00	-73.420.000,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			180.335.000,00		180.335.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat yang ditangani sesuai SOP	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata - ratapengeluaran jasa komunikasi, air dan listrik	Rp. 3.400.000/bln	51.935.000,00	Rp. 3.400.000/bln	51.935.000,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			123.600.000,00		123.600.000,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165.280.130,00		165.280.130,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	1	140.380.130,00	1	140.380.130,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit	24.900.000,00	0 unit	24.900.000,00	0,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			47.134.700,00		56.829.660,00	9.694.960,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			47.134.700,00		56.829.660,00	9.694.960,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata - rata bobot skor penilaian manajemen kelembagaan	0,018	47.134.700,00	0,018	56.829.660,00	9.694.960,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			144.326.585,00		143.554.055,00	-772.530,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			144.326.585,00		143.554.055,00	-772.530,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	25 kop	144.326.585,00	25 kop	143.554.055,00	-772.530,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			50.735.190,00		59.595.385,00	8.860.195,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.735.190,00		59.595.385,00	8.860.195,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Fasilitasi penyusunan laporan tahunan koperasi	Koperasi yang RAT	50.735.190,00	Koperasi yang RAT	59.595.385,00	8.860.195,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			148.517.965,00		146.718.420,00	-1.799.545,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			148.517.965,00		146.718.420,00	-1.799.545,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>			148.517.965,00		146.718.420,00	-1.799.545,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			125.345.075,00		110.855.350,00	-14.489.725,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			125.345.075,00		110.855.350,00	-14.489.725,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- penyelenggaraan promosi produk usaha koperasi	2 kali	125.345.075,00	2 kali	110.855.350,00	-14.489.725,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			60.401.155,00		60.414.375,00	13.220,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			60.401.155,00		60.414.375,00	13.220,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 07.2.01.04	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	- peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	24 UKM	60.401.155,00	24 UKM	60.414.375,00	13.220,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08	Program Pengembangan UMKM			197.711.780,00		210.328.440,00	12.616.660,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</i>			197.711.780,00		210.328.440,00	12.616.660,00
2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 . 08.2.01.01	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	- Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1 Sentra	197.711.780,00	1 Sentra	210.328.440,00	12.616.660,00
2.18	Penanaman Modal			4.693.439.945,00		4.697.404.945,00	3.965.000,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.693.439.945,00		4.697.404.945,00	3.965.000,00
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.897.779.345,00		4.112.590.945,00	214.811.600,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.650.391.952,00		2.762.356.952,00	111.965.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.567.711.952,00	14 bulan	2.679.676.952,00	111.965.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa administrasi keuangan	7 orang	82.680.000,00	7 orang	82.680.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.375.000,00		0,00	-34.375.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	53 stel	34.375.000,00	53 stel	0,00	-34.375.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			541.480.353,00		796.809.965,00	255.329.612,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik	11 jenis	10.351.000,00	11 jenis	34.001.000,00	23.650.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	11 jenis	6.396.500,00	11 jenis	35.490.500,00	29.094.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi	50 jenis	149.612.403,00	50 jenis	131.953.208,00	-17.659.195,00
		tersedianya makan minum kantor	153 orang		153 orang		
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis cetak, penggandaan dan penjiilidan dokumen	9 jenis	57.060.850,00	9 jenis	134.550.900,00	77.490.050,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	22 jenis	108.000.000,00	22 jenis	229.500.000,00	121.500.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya dana untuk perjalanan dinas	40 kali	210.059.600,00	40 kali	231.314.357,00	21.254.757,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56.320.000,00		56.320.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	10 unit	56.320.000,00	10 unit	56.320.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			425.858.000,00		409.400.000,00	-16.458.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terpenuhi	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	5.000.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 jenis	214.458.000,00	5 jenis	198.000.000,00	-16.458.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pendukung adm/teknis perkantoran	10 orang	206.400.000,00	10 orang	206.400.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.354.040,00		87.704.028,00	-101.650.012,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas	13 stnk	149.754.040,00	13 stnk	67.464.028,00	-82.290.012,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	39.600.000,00	100 persen	20.240.000,00	-19.360.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			147.444.000,00		88.000.000,00	-59.444.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			147.444.000,00		88.000.000,00	-59.444.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	persentase pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	60 persen	147.444.000,00	60 persen	88.000.000,00	-59.444.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03	Program Promosi Penanaman Modal			117.455.000,00		52.500.000,00	-64.955.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			117.455.000,00		52.500.000,00	-64.955.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi	4 promosi	117.455.000,00	4 promosi	52.500.000,00	-64.955.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04	Program Pelayanan Penanaman Modal			204.639.600,00		118.192.000,00	-86.447.600,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			204.639.600,00		118.192.000,00	-86.447.600,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tersedianya sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	3 sistel layanan	127.890.000,00	3 sistel layanan	69.742.000,00	-58.148.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	persentase pemenuhan perizinan	80 persen	76.749.600,00	80 persen	48.450.000,00	-28.299.600,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			326.122.000,00		326.122.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			326.122.000,00		326.122.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pelaku usaha yang terkoordinasi	140 pelaku usaha	96.600.000,00	140 pelaku usaha	48.300.000,00	-48.300.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah koordinasi dan pembinaan	4 kali	181.222.000,00	4 kali	181.222.000,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25 persen	48.300.000,00	25 persen	96.600.000,00	48.300.000,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga			6.551.249.333,00		6.492.909.333,00	-58.340.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			6.551.249.333,00		6.492.909.333,00	-58.340.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.308.452.318,00		3.451.392.318,00	142.940.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.716.079,00		5.716.079,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	2.209.444,00	4 dokumen	2.209.444,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun tepat waktu (Renja, RA,	4 Lap	1.835.460,00	4 Lap	1.835.460,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kinerja SKPD</i>	RKA,DPA)					
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (LKjIP, LKPJ, LPPD, Monev)	4 Lap	1.671.175,00	4 Lap	1.671.175,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.403.553.332,00		2.495.213.332,00	91.660.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.401.249.437,00		2.492.909.437,00	91.660.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat wktu (laporan fisik keuangan)	5 Lap	1.577.895,00	5 Lap	1.577.895,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK, LRA)	2 Lap	726.000,00	2 Lap	726.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			39.270.000,00		39.270.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	jml pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	41 Stel	39.270.000,00	41 Stel	39.270.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			336.651.041,00		388.067.041,00	51.416.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Item	8.387.126,00	4 Item	8.387.126,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpakai	10 Item	5.445.000,00	10 Item	5.445.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			106.702.195,00		106.702.195,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12100 Lembar	14.575.000,00	12100 Lembar	40.755.000,00	26.180.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Koran	9.900.000,00	5 Koran	9.900.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	35 Kali	191.641.720,00	35 Kali	216.877.720,00	25.236.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			16.500.000,00		16.500.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya perlengkapan kantor	1	16.500.000,00	1	16.500.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			356.087.316,00		347.351.316,00	-8.736.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat keluar	1500 Surat	900.000,00	1500 Surat	900.000,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	3 Rek	40.651.316,00	3 Rek	40.651.316,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	19 Unit	314.536.000,00	19 Unit	305.800.000,00	-8.736.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Gedung kantor yang terpelihara	1	150.674.550,00	1	159.274.550,00	8.600.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 Unit	96.233.075,00	12 Unit	96.233.075,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	yang terpelihara					
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			34.971.475,00		34.971.475,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			19.470.000,00		28.070.000,00	8.600.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			1.056.142.515,00		1.673.893.800,00	617.751.285,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>			86.488.115,00		1.073.893.800,00	987.405.685,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>	Jumlah Pemuda yang di bina	70 Orang	42.867.200,00	70 Orang	42.867.200,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.05	<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pemuda dan masyarakat mengikuti sosialisasi	200 Orang	43.620.915,00	200 Orang	0,00	-43.620.915,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.08	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	Jumlah OKP yang telah mendapatkan pembinaan	31 OKP	0,00	31 OKP	61.372.200,00	61.372.200,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.09	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>			0,00		969.654.400,00	969.654.400,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			969.654.400,00		600.000.000,00	-369.654.400,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02.02	<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>			969.654.400,00		600.000.000,00	-369.654.400,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			1.987.331.218,00		1.168.299.933,00	-819.031.285,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			103.974.000,00		78.234.000,00	-25.740.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Atlet Muda	200 Orang	103.974.000,00	200 Orang	78.234.000,00	-25.740.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>			165.994.415,00		59.615.330,00	-106.379.085,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			165.994.415,00		59.615.330,00	-106.379.085,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.575.124.985,00		975.124.985,00	-600.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlit dan cabor bagi kaum disabilitas	100 Atlit	1.575.124.985,00	100 Atlit	975.124.985,00	-600.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			142.237.818,00		55.325.618,00	-86.912.200,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah OPD yang mengikuti senam Kesegaran Jasmani	55 OPD	142.237.818,00	55 OPD	55.325.618,00	-86.912.200,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			199.323.282,00		199.323.282,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			199.323.282,00		199.323.282,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			199.323.282,00		199.323.282,00	0,00
2.23	Perpustakaan			4.723.105.278,00		4.823.606.903,10	100.501.625,10
2.23.2-23.2-24.0-00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			4.723.105.278,00		4.823.606.903,10	100.501.625,10
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.874.871.763,00		3.955.443.963,10	80.572.200,10
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.970.100,00		114.904.700,00	89.934.600,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan realisasi capaian / kinerja skpd (fisik dan keuangan)	10 Laporan	24.970.100,00	10 Laporan	114.904.700,00	89.934.600,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.533.105.293,00		2.638.655.293,10	105.550.000,10
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.533.105.293,00		2.638.655.293,10	105.550.000,10
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			92.050.000,00		85.455.000,00	-6.595.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	12 bulan	72.050.000,00	12 bulan	85.455.000,00	13.405.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN pendidikan dan pelatihan formal (orang)	1	20.000.000,00	1	0,00	-20.000.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			512.716.682,00		473.495.322,00	-39.221.360,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan komponen listrik yang diadakan	12 bulan	9.989.267,00	12 bulan	9.989.267,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang diadakan	12 bulan	19.697.700,00	12 bulan	21.697.700,00	2.000.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			231.844.135,00		104.068.135,00	-127.776.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	5	30.999.100,00	5	30.999.100,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	220.186.480,00	12 bulan	306.741.120,00	86.554.640,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Konsultasi SKPD</i>						
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			447.962.528,00		406.352.528,00	-41.610.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Persentase surat yang ditangani sesuai dengan SOP	10 dokumen	3.750.000,00	10 dokumen	3.200.000,00	-550.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rata-rata pembayaran jasa komunikasi dan listrik	dokumen	169.892.528,00	dokumen	105.480.528,00	-64.412.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			274.320.000,00		297.672.000,00	23.352.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			264.067.160,00		236.581.120,00	-27.486.040,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK yang aktif		157.853.260,00		112.763.010,00	-45.090.250,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			106.213.900,00		123.818.110,00	17.604.210,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02	Program Pembinaan Perpustakaan			798.233.575,00		818.163.000,00	19.929.425,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			56.689.875,00		85.164.500,00	28.474.625,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.01	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</i>	Jumlah layanan perpustakaan berbasis IT	6 Layanan	6.000.000,00	6 Layanan	6.000.000,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.04	<i>Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</i>	Persentase ruang publik memiliki pojok baca	0,75	7.130.000,00	0,75	18.530.000,00	11.400.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.06	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase ketersediaan SDM pengelola ruang baca publik	0,6	7.877.000,00	0,6	0,00	-7.877.000,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.09	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	Jumlah koleksi buku	105000 Buku	19.362.875,00	105000 Buku	44.314.500,00	24.951.625,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.01.10	<i>Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			16.320.000,00		16.320.000,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			741.543.700,00		732.998.500,00	-8.545.200,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.01	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	Persentase ketersediaan sarana ruang baca publik	0,75	17.044.500,00	0,75	17.044.500,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.02.02	<i>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			724.499.200,00		715.954.000,00	-8.545.200,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02	Program Pengelolaan Arsip			49.999.940,00		49.999.940,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.03	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>			49.999.940,00		49.999.940,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.02 . 02.2.03.02	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase PD yang memiliki SDM pengelola kearsipan	1	49.999.940,00	1	49.999.940,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			28.236.985.499,00		30.224.390.377,50	1.987.404.878,50
3.25	Kelautan dan Perikanan			4.003.089.986,00		3.956.879.945,50	-46.210.040,50
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan			4.003.089.986,00		3.956.879.945,50	-46.210.040,50
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.984.892.991,00		3.040.565.888,50	55.672.897,50
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			11.336.050,00		7.125.250,00	-4.210.800,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laopran Kinerja dan Laporan Keuangan disusun (Dokumen)	10 dokumen	11.336.050,00	10 dokumen	7.125.250,00	-4.210.800,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.207.656.178,00		2.302.718.178,00	95.062.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.051.680.178,00		2.133.470.178,00	81.790.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			155.976.000,00		169.248.000,00	13.272.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			27.472.500,00		27.472.500,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pengadaan pakaian dinas	12 bulan	27.472.500,00	12 bulan	27.472.500,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			399.667.828,00		366.479.445,50	-33.188.382,50
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Pengadaan komponen listrik yang diadakan	12 bulan	8.147.810,00	12 bulan	8.147.810,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang diadakan	12 bulan	8.817.600,00	12 bulan	8.817.600,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			106.983.463,00		42.372.460,50	-64.611.002,50
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang dicetak	5	9.296.815,00	5	9.313.755,00	16.940,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan yang disedia	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	9.000.000,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			257.422.140,00		288.827.820,00	31.405.680,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			35.640.000,00		19.140.000,00	-16.500.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			35.640.000,00		19.140.000,00	-16.500.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			76.947.600,00		91.457.680,00	14.510.080,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Persentase surat yang ditangani sesuai dengan SOP	10 dokumen	3.000.000,00	10 dokumen	2.800.000,00	-200.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya</i>	Rata-rata pembayaran jasa komunikasi	dokumen	45.147.600,00	dokumen	49.057.680,00	3.910.080,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Air dan Listrik</i>	dan listrik					
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			28.800.000,00		39.600.000,00	10.800.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			226.172.835,00		226.172.835,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			163.373.835,00		163.373.835,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			14.190.000,00		14.190.000,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			48.609.000,00		48.609.000,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			779.497.895,00		706.459.975,00	-73.037.920,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			779.497.895,00		706.459.975,00	-73.037.920,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.02	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan	0,57142857	407.839.600,00	0,57142857	407.839.600,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.03	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase induk ikan bersertifikat di Kelompok/UPR	0,05	336.658.295,00	0,05	263.620.375,00	-73.037.920,00
		Persentase UPR/Kelompok Budidaya yang menerapkan teknologi pembenihan	0,7333		0,7333		
		Persentase unit pembenihan memiliki kemampuan teknis pebesaran calon induk	1		1		
		Persentase pemenuhan kebutuhan pakan ikan	0,1585		0,1585		
		Jumlah benih ikan yang ditebar/disalurkan	71111 ekor		71111 ekor		
		Jumlah induk/calon induk ikan nila di UPT PBAT (400 ekor/paket)	15 paket		15 paket		
		Jumlah induk/calon induk ikan mas di UPT PBAT (60 kg =15 kg jantan dan 45 kg betina 1:3)	200 kg		200 kg		
		Jumlah induk/calon induk ikan lele di UPT PBAT (15 ekor/paket)	15 paket		15 paket		
		Jumlah benih ikan unggul yang dihasilkan di UPT PBAT	600000 ekor		600000 ekor		
		Jumlah benih ikan yang dikeluarkan/disalurkan di UPT PBAT	500000 ekor		500000 ekor		
		Jumlah benih ikan yang dikeluarkan/disalurkan di UPT PBAT	500000 ekor		500000 ekor		
		Persentase UPT yang miliki petugas pembenihan terlatih	0,33333333		0,33333333		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 04.2.04.04	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase kecukupan obat ikan	0,75614367	35.000.000,00	0,75614367	35.000.000,00	0,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			238.699.100,00		209.854.082,00	-28.845.018,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.01	<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>			139.139.100,00		162.238.082,00	23.098.982,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase produk hasil perikanan yang difasilitasi pemasarannya	0,5	139.139.100,00	0,5	162.238.082,00	23.098.982,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.02	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>			29.820.000,00		20.776.000,00	-9.044.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.02.01	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Rata-rata omset penjualan hasil perikanan kelompok binaan	10000000 Rupiah/klp/bulan	29.820.000,00	10000000 Rupiah/klp/bulan	20.776.000,00	-9.044.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>			69.740.000,00		26.840.000,00	-42.900.000,00
3.25 . 3-25.0-00.0-00.01 . 06.2.03.02	<i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase kelompok pengolahan ikan memiliki sarana lengkap	0,6	69.740.000,00	0,6	26.840.000,00	-42.900.000,00
3.26	Pariwisata			5.230.906.568,00		5.296.236.568,00	65.330.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata			5.230.906.568,00		5.296.236.568,00	65.330.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.359.594.436,00		3.648.651.309,00	289.056.873,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.230.906.781,00		2.314.836.781,00	83.930.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.230.906.781,00		2.314.836.781,00	83.930.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			30.800.000,00		30.800.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	35 stel	30.800.000,00	35 stel	30.800.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			518.406.031,00		547.506.831,00	29.100.800,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya komponen dan alat listrik	12 jenis	18.735.671,00	12 jenis	18.735.671,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	87.450.000,00	10 unit	116.550.800,00	29.100.800,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Tersedianya peralatan rumah tangga	25 jenis	20.003.500,00	25 jenis	20.003.500,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			119.999.660,00		119.999.660,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan</i>	Tersedianya barang cetakan dan	10 jenis	20.050.800,00	10 jenis	20.050.800,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Penggandaan</i>	penggandaan					
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Tersedianya bahan bacaan	2 jenis	9.000.000,00	2 jenis	9.000.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Tingkat pemenuhan undangan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	243.166.400,00	20 kali	243.166.400,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			52.800.000,00		214.200.000,00	161.400.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			52.800.000,00		52.800.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>			0,00		161.400.000,00	161.400.000,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			311.315.744,00		311.315.744,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Tersedianya jasa surat menyurat	4 jenis	7.495.400,00	4 jenis	7.495.400,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rek/kwh	62.428.344,00	3 rek/kwh	62.428.344,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			241.392.000,00		241.392.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			215.365.880,00		229.991.953,00	14.626.073,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas dalam komdisi baik	14 unit	171.813.580,00	14 unit	171.813.580,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	peralatan kantor yang diperbaiki	4 jenis	17.627.500,00	4 jenis	17.627.500,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah gedung kantor yg dipelihara/direhab	2 unit	25.924.800,00	2 unit	40.550.873,00	14.626.073,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			630.520.563,00		520.509.715,00	-110.010.848,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			604.719.423,00		494.708.575,00	-110.010.848,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	tersusunnya dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 dokumen	368.257.615,00	1 dokumen	207.274.575,00	-160.983.040,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	jumlah objek wisata yang dikembangkan	5 objek wisata	215.534.000,00	5 objek wisata	215.534.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	jumlah destinasi dengan sarpras pariwisata yang terpelihara	4 destinasi	20.927.808,00	4 destinasi	71.900.000,00	50.972.192,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.04	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>			25.801.140,00		25.801.140,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	<i>Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	persentase jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP	43 persen	25.801.140,00	43 persen	25.801.140,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03	Program Pemasaran Pariwisata			840.758.800,00		805.752.820,00	-35.005.980,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar</i>			840.758.800,00		805.752.820,00	-35.005.980,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	jenis layanan informasi wisata	5 jenis	257.198.800,00	5 jenis	257.198.800,00	0,00
		jumlah organisasi kesenian yang mendapatkan bantuan	15 organisasi		15 organisasi		
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	jumlah event/lomba/atraksi wisata	3 event	304.234.000,00	3 event	284.983.200,00	-19.250.800,00
		terlaksananya promosi pariwisata	5 kali		5 kali		
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	jumlah data base yang terupdate	1 dokumen	44.335.000,00	1 dokumen	44.335.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	terlaksananya kerjasama di bidang pariwisata	5 kali	234.991.000,00	5 kali	219.235.820,00	-15.755.180,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			400.032.769,00		321.322.724,00	-78.710.045,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>			400.032.769,00		321.322.724,00	-78.710.045,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	jumlah SDM pariwisata yang profesional	50 orang	200.000.174,00	50 orang	221.289.724,00	21.289.550,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	jumlah partisipasi mitra pariwisata dalam kegiatan pemerintah daerah	20 kali	100.033.000,00	20 kali	100.033.000,00	0,00
3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 05.2.01.06	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan	5 jenis	99.999.595,00	5 jenis	0,00	-99.999.595,00
3.27	Pertanian			11.955.994.439,00		12.324.554.439,00	368.560.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian			11.955.994.439,00		12.324.554.439,00	368.560.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.732.499.523,00		9.966.419.723,00	233.920.200,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			29.999.688,00		29.999.688,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Kinerja yang Baik	4 jenis	29.999.688,00	4 jenis	29.999.688,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	7.743.572.193,00		8.007.332.193,00	263.760.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bln	7.466.108.218,00	12 bln	7.734.668.218,00	268.560.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Adm Pelaksana Asn Yang Di tanggung	10 orang	277.463.975,00	10 orang	272.663.975,00	-4.800.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			360.000.000,00		0,00	-360.000.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	70.000.000,00	40 Stel	0,00	-70.000.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	9 Org	290.000.000,00	9 Org	0,00	-290.000.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Terlaksananya Pengadministrasian umum perangkat daerah		819.670.011,00		884.792.261,00	65.122.250,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	jumlah komponen instalasi	8 komponen	24.000.000,00	8 komponen	24.000.000,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	jumlah peralatan rumah tangga	16 Item	19.570.100,00	16 Item	19.570.100,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	jumlah alat tulis kantor yang diadakan jumlah makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan	27 item 120 orang	470.800.161,00	27 item 120 orang	182.932.240,00	-287.867.921,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	10 item	29.999.750,00	10 item	78.898.921,00	48.899.171,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan	4 iter perbulan	25.300.000,00	4 iter perbulan	11.170.000,00	-14.130.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	60 kali	250.000.000,00	60 kali	568.221.000,00	318.221.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jum;ah Barang Milik Negara yang diadakan		106.000.000,00		112.965.000,00	6.965.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas	3 unit	106.000.000,00	3 unit	112.965.000,00	6.965.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	tersedianya peralatan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedng kantor	3 unit 20 unit	235.397.631,00	3 unit 20 unit	235.397.631,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		14.881.874,00		14.881.874,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Persentase surat yang ditangani sesuai dengan SOP	10 Dokumen	146.595.757,00	10 Dokumen	146.595.757,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Rata-Rata pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik	0 Dokumen	73.920.000,00	0 Dokumen	73.920.000,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase barang Miik darah yang dipelihara	1	437.860.000,00	1	695.932.950,00	258.072.950,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Persentase kendaraan Dinas/Operasional yang memiliki STNK yang Aktif dan dalam Kodisi Baik	1	395.760.000,00	1	397.865.000,00	2.105.000,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Persentase peralatan/mesin yang dirawat/dipelihara	1	24.500.000,00	1	24.500.000,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Persentase peralatan/mesin yang dirawat/dipelihara	1	17.600.000,00	1	273.567.950,00	255.967.950,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi	67 Kelompok Tani	749.972.096,00	67 Kelompok Tani	756.181.896,00	6.209.800,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Meningkatnya produktifitas tanaman utama	13 Ton/Ha	599.972.152,00	13 Ton/Ha	606.181.952,00	6.209.800,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	<i>Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan teknologi Tepat GunaJumlah Pestisida dan HerbisidaLuas Lahan Penelitian PertanianMeningkatnya produktifitas tanaman utama Ratio Kecukupan Bibit Benin Unggul Pertanian Perkebunan Tingkat Ketersediaan Benih Tanaman Hortikultura	62 Kelompok 10 Jenis 2 Ha 13 Ton/Ha 70 persen 5000 Batang	599.972.152,00	62 Kelompok 10 Jenis 2 Ha 13 Ton/Ha 70 persen 5000 Batang	606.181.952,00	6.209.800,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.05	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan teknologi Tepat Guna		149.999.944,00		149.999.944,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.05.05	<i>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>	Jumlah Pembibitan Dan Perawatan ternak Jumlah Populasi Ternak termasuk unggas Jumlah Produk Peternakan Unggulan Daerah Pelaksanaan / Pemberian Vaksin Penyakit Hewan	5 Ekor 190943 Ekor/Tahun 3 Jenis 1000 Dosis/Tahun	149.999.944,00	5 Ekor 190943 Ekor/Tahun 3 Jenis 1000 Dosis/Tahun	149.999.944,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Srana Dan Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		1.270.599.570,00		1.387.913.070,00	117.313.500,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	Jumlah Sarana Dan Prasarana P		1.270.599.570,00		1.387.913.070,00	117.313.500,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	Jumlah pembangunan/rehabilitasi irigasi Tanah dangkal per tahun	1Unit	200.000.000,00	1Unit	200.000.000,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Irigasi Embung per tahun	2 Unit	240.000.000,00	2 Unit	298.935.250,00	58.935.250,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	umlah pembangunan/rehabilitasi Jalan Produksi per tahun Jumlah pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani per tahun	1 Unit 2 Unit	700.000.000,00	1 Unit 2 Unit	758.378.250,00	58.378.250,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.09	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	Jumlah Peningkatan Sarana Dan Prasaran peternakan	3 Unit	130.599.570,00	3 Unit	130.599.570,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio cakupan binaan kelompok tani	75 Klj	202.923.250,00	75 Klj	214.039.750,00	11.116.500,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	Rasio Penyuluh Terhadap Jumlah Kelompok tani	65 Org	202.923.250,00	65 Org	214.039.750,00	11.116.500,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan Rasio cakupan binaan kelompok tani Rasio Penyuluh Terhadap Jumlah Kelompok tani	75 persen 72 Kelompok 56 Orang	202.923.250,00	75 persen 72 Kelompok 56 Orang	214.039.750,00	11.116.500,00
3.30	Perdagangan			7.046.994.506,00		8.646.719.425,00	1.599.724.919,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			7.046.994.506,00		8.646.719.425,00	1.599.724.919,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen, Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan dengan Kondisi Baik, Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran.	3 Dokumen	5.532.594.506,00	3 Dokumen	6.019.367.895,00	486.773.389,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen, Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan dengan Kondisi Baik	3 Dokumen	25.326.250,00	3 Dokumen	25.326.250,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen, Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan dengan Kondisi Baik	3 Dokumen	25.326.250,00	3 Dokumen	25.326.250,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen, Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Keuangan dengan Kondisi Baik		4.146.464.836,00		4.290.434.836,00	143.970.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase gaji tunjangan ASN yang dibayarkan	100 persen	4.046.994.836,00	100 persen	4.190.564.836,00	143.570.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pembyaraan honor pengelola administrasi keuangan dan panitia pengadaan barang dan jasa	7 Orang	99.470.000,00	7 Orang	99.870.000,00	400.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian		94.105.000,00		94.105.000,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian olahraga jumlah pakaian seragam	65 stell 65 stell	94.105.000,00	65 stell 65 stell	94.105.000,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493.828.665,00		600.074.879,00	106.246.214,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan listrik	1 Kantor	5.995.000,00	1 Kantor	8.342.789,00	2.347.789,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perangkat kantor	0	0,00	0	17.500.000,00	17.500.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	12 Bulan	12.848.000,00	12 Bulan	15.994.000,00	3.146.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah pembayaran makan dan minum jumlah penyediaan alat tulis kantor	11 bulan 24 item	134.959.000,00	11 bulan 24 item	96.171.625,00	-38.787.375,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	30.066.465,00	12 Bulan	35.456.465,00	5.390.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran	2 Surat Kabar	11.550.000,00	2 Surat Kabar	11.550.000,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	298.410.200,00	12 Bulan	415.060.000,00	116.649.800,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pembelian kendaraan dum truk sampah persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 unit 98 persen	64.042.000,00	1 unit 98 persen	164.302.000,00	100.260.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	5 Unit	64.042.000,00	5 Unit	164.302.000,00	100.260.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		363.764.295,00		384.664.870,00	20.900.575,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	1	5.000.000,00	1	9.000.000,00	4.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telpon/fax, internet, PDAM dan Listrik PLN	12 Bulan	118.764.295,00	12 Bulan	123.664.870,00	4.900.575,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	240.000.000,00	12 bulan	252.000.000,00	12.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pembayaran honor clening service Jumlah pembayaran honor pramubakti, pramuniaga dan petugas jaga malam	12 bulan 9 orang	345.063.460,00	12 bulan 9 orang	460.460.060,00	115.396.600,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		327.463.460,00		282.303.060,00	-45.160.400,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di bayar pajaknya dan Jumlah Servis kendaraan dinas/operasional	23 unit 23 unit	17.600.000,00	23 unit 23 unit	17.600.000,00	0,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	0,00	12 bulan	160.557.000,00	160.557.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Klaster Industri		365.400.000,00		1.030.970.000,00	665.570.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Perda		365.400.000,00		1.030.970.000,00	665.570.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah lokasi lahan untuk pusat industri dan pergudangan Persentase cakupan pengembangan sentra klaster industri	50 Ha 1 kawasan	365.400.000,00	50 Ha 1 kawasan	1.030.970.000,00	665.570.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar rakyat yang Mengalami Peningkatan Standar	1	1.149.000.000,00	1	602.200.000,00	-546.800.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana pendukung perdagangan		1.149.000.000,00		602.200.000,00	-546.800.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas kebersihan keamanan dan penagihan retribusi pasar Tingkat ketersediaan sarana pendukung perdagangan	9 pasar 3 UPTD	0,00	9 pasar 3 UPTD	10.000.000,00	10.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar rakyat yang Mengalami Peningkatan Standar	2 Pasar	1.149.000.000,00	2 Pasar	592.200.000,00	-556.800.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			0,00		53.441.000,00	53.441.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang			0,00		53.441.000,00	53.441.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>						
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 04.2.02.01	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>			0,00		53.441.000,00	53.441.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang tertib ukur dan tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	0,9	0,00	0,9	112.000.000,00	112.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Jumlah UTTP yang ditera		0,00		112.000.000,00	112.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 06.2.01.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</i>	jumlah alat standar yang dikalibrasi Jumlah UTTP yang ditera Persentase UTTP yang tertib ukur dan tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	25 u 700 UTTP 700 UTTP	0,00	25 u 700 UTTP 700 UTTP	112.000.000,00	112.000.000,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran / Jumlah Industri Naik Kelas	99% + 53 IKM	0,00	99% + 53 IKM	828.740.530,00	828.740.530,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 07.2.01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Jumlah IKM yang menerima fasilitas promosi	50 IKM	0,00	50 IKM	828.740.530,00	828.740.530,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 07.2.01.01	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Jumlah IKM yang menerima fasilitas promosi	50 IKM	0,00	50 IKM	635.045.280,00	635.045.280,00
3.30 . 3-30.3-31.0-00.02 . 07.2.01.02	<i>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Laporan pengawasan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk serta sentra yang memiliki tata kelola pengembangan produk Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	1 laporan 20 IKM 90 persen	0,00	1 laporan 20 IKM 90 persen	193.695.250,00	193.695.250,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			94.246.488.810,00		105.874.624.695,00	11.628.135.885,00
4.01	Sekretariat Daerah			33.064.933.508,00		46.342.342.041,00	13.277.408.533,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah			33.064.933.508,00		46.342.342.041,00	13.277.408.533,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan		24.619.869.057,00		35.466.124.380,00	10.846.255.323,00
		Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran					
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					
		Tingkat kedisiplinan aparaturnya					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan					
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya					
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan dengan Kualitas Baik					
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			56.462.179,00		56.462.179,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	21.531.015,00	6 dokumen	21.531.015,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	3 dokumen	34.931.164,00	3 dokumen	34.931.164,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	10.303.941.604,00		10.892.421.604,00	588.480.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	14 bulan	9.960.215.544,00	14 bulan	10.490.447.544,00	530.232.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	9 Orang	328.776.000,00	9 Orang	387.024.000,00	58.248.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	14.950.060,00	1 dokumen	14.950.060,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	11.000.000,00	2 dokumen	11.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.02	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>			11.000.000,00		11.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah Aparatur yang Menerima Pakaian Dinas	48 orang	110.000.000,00	48 orang	110.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	110.000.000,00	5 orang	110.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			1.309.980.500,00		6.472.315.423,00	5.162.334.923,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah alat kelistrikan	111 buah	60.458.252,00	111 buah	60.458.252,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	361 buah	0,00	361 buah	4.667.844.500,00	4.667.844.500,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah ATK yang dibeli Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	506 buah 5600 kotak 1000 Kotak	20.222.400,00	506 buah 5600 kotak 1000 Kotak	20.222.400,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	38645 lembar	569.385.713,00	38645 lembar	877.369.436,00	307.983.723,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Bacaan bacaan yang tersedia	3 surat kabar	9.914.135,00	3 surat kabar	9.891.035,00	-23.100,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 bulan	650.000.000,00	12 bulan	836.529.800,00	186.529.800,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>			0,00		3.941.000.500,00	3.941.000.500,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Urusan Pemerintah Daerah</i>						
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	0,00	2 unit	531.000.000,00	531.000.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah mebeleur	10 unit	0,00	10 unit	2.713.000.000,00	2.713.000.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	0,00	2 unit	697.000.500,00	697.000.500,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			2.246.975.812,00		3.007.372.327,00	760.396.515,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	jumlah surat bermaterai yang terlayani	900 surat	18.000.000,00	900 surat	18.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	jumlah Rekening Telpn,air, listrik, dan internet yang dibayar setiap bulan	4 rekening	741.175.812,00	4 rekening	772.816.787,00	31.640.975,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Kebersihan jumlah pegawai harian lepas	1 OB 8 OB	1.487.800.000,00	1 OB 8 OB	2.216.555.540,00	728.755.540,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			956.492.800,00		1.016.483.800,00	59.991.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik jumlah kendaraan dinas yang berizin	16 unit 20 unit	770.548.800,00	16 unit 20 unit	770.548.800,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	88 unit	160.600.000,00	88 unit	160.600.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	25.344.000,00	1 unit	85.335.000,00	59.991.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	terbayarnya gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	13 bulan	3.289.717.974,00	13 bulan	3.189.717.974,00	-100.000.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala dan wakil kepala daerah	1 paket	2.664.717.974,00	1 paket	2.664.717.974,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.02	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 kali	75.000.000,00	2 kali	75.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.03	<i>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	0,00	-100.000.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.11.04	<i>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	12 bulan	450.000.000,00	12 bulan	450.000.000,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	12 bulan	1.828.332.000,00	12 bulan	3.072.866.600,00	1.244.534.600,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</i>	tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	12 bulan	988.449.000,00	12 bulan	1.996.299.900,00	1.007.850.900,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</i>			649.803.000,00		767.026.700,00	117.223.700,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.03	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga</i>			190.080.000,00		309.540.000,00	119.460.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Sekretariat Daerah</i>						
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>			750.962.388,00		640.489.773,00	-110.472.615,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	Persentase kesesuaian nomenklatur perangkat daerah	100 persen	298.568.950,00	100 persen	253.774.775,00	-44.794.175,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02	<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	Persentase ketersediaan regulasi / kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik daerah	90 persen	94.784.700,00	90 persen	79.663.700,00	-15.121.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan data kinerja secara elektronik	100 persen	230.880.115,00	100 persen	196.961.990,00	-33.918.125,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.04	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	indeks kepuasan masyarakat sekretariat daerah	80 persen	88.663.000,00	80 persen	78.127.000,00	-10.536.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	nilai sakip pada komponen pelaporan kinerja	12 komponen	38.065.623,00	12 komponen	31.962.308,00	-6.103.315,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>			3.756.003.800,00		3.055.994.200,00	-700.009.600,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01	<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah sesuai standar keprotokolan	100 persen	1.554.093.000,00	100 persen	1.574.093.000,00	20.000.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02	<i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	Persentase ketersediaan aparatur kehumasan dan keprotokolan yang berkompetensi	100 persen	1.674.014.400,00	100 persen	856.000.100,00	-818.014.300,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03	<i>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen	527.896.400,00	100 persen	625.901.100,00	98.004.700,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			5.764.709.811,00		8.433.005.651,00	2.668.295.840,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>			648.875.503,00		516.147.403,00	-132.728.100,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	Jumlah Dokumen PATEN	1 dokumen	272.253.700,00	1 dokumen	170.792.100,00	-101.461.600,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	Jumlah dokumen batas kecamatan	2 dokumen	154.829.063,00	2 dokumen	129.781.463,00	-25.047.600,00
		Jumlah Dokumen Rupa Bumi	1 dokumen		1 dokumen		
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	221.792.740,00	1 dokumen	215.573.840,00	-6.218.900,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			3.983.087.785,00		5.857.486.295,00	1.874.398.510,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	Jumlah cabang/golongan yang diperlombakan dalam MTQ	8 cabang	1.372.741.625,00	8 cabang	1.743.405.245,00	370.663.620,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	Persentase SDM Aparatur mengikuti pembinaan penyelenggara jenazah	90 persen	42.200.000,00	90 persen	89.081.050,00	46.881.050,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	Bansos Uang Duka	1 Kegiatan	2.568.146.160,00	1 Kegiatan	4.025.000.000,00	1.456.853.840,00
		Bansos Uang Duka	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		Hibah Kepada BKMT	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada BKPRMI	1 Lembaga		1 Lembaga		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hibah Kepada Dewan Masjid Indonesia	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada FKUB	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada IPHI	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada Muhammadiyah	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada Nahdatul Ulama	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Hibah Kepada Persatuan Gereja	1 Lembaga		1 Lembaga		
		Persentase masyarakat yang menerima bantuan penyelenggara jenazah	100 persen		100 persen		
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen rancangan peraturan perundang-undangan	100 persen	987.907.246,00	100 persen	836.539.276,00	-151.367.970,00
		Persentase jasa pelayanan penasehat dan pengacara	100 persen		100 persen		
		Persentase koordinasi yang dilaksanakan dengan pengadilan tata usaha negara (PTUN)	100 persen		100 persen		
		Persentase masyarakat yang memahami rencana hak asasi manusia	90 persen		90 persen		
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen rancangan peraturan perundang-undangan	100 persen	255.205.043,00	100 persen	222.805.043,00	-32.400.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	Persentase jasa pelayanan penasehat dan pengacara	100 persen	472.436.228,00	100 persen	380.036.228,00	-92.400.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasi	100 persen	260.265.975,00	100 persen	233.698.005,00	-26.567.970,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>			144.839.277,00		1.222.832.677,00	1.077.993.400,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	<i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	4 kegiatan	144.839.277,00	4 kegiatan	1.222.832.677,00	1.077.993.400,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan			2.680.354.640,00		2.443.212.010,00	-237.142.630,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>			559.219.220,00		600.374.720,00	41.155.500,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>			143.906.270,00		186.529.270,00	42.623.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	Jumlah dokumen monitoring pengendalian inflasi daerah	1 dokumen	212.262.400,00	1 dokumen	214.844.900,00	2.582.500,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>	Jumlah dokumen monitoring sertifikat hak atas tanah (SHAT)	1 dokumen	203.050.550,00	1 dokumen	199.000.550,00	-4.050.000,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>			657.653.765,00		704.153.535,00	46.499.770,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	Jumlah regulasi analisa standar biaya pemerintah kota lubuklinggau	1 regulasi	233.527.930,00	1 regulasi	220.310.630,00	-13.217.300,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	Persentase penyelesaian pengadaan barang/jasa	100 persen	194.968.110,00	100 persen	209.990.380,00	15.022.270,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	Persentase rata-rata realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah	100 persen	229.157.725,00	100 persen	273.852.525,00	44.694.800,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>			1.463.481.655,00		1.138.683.755,00	-324.797.900,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam layanan pengadaan barang/jasa	100 persen	650.359.205,00	100 persen	485.191.155,00	-165.168.050,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100 persen	450.532.050,00	100 persen	414.711.600,00	-35.820.450,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03	<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Persentase Perangkat daerah yang memiliki kapasitas pejabat pengadaan barang/jasa	100 persen	362.590.400,00	100 persen	238.781.000,00	-123.809.400,00
4.02	Sekretariat DPRD			61.181.555.302,00		59.532.282.654,00	-1.649.272.648,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			61.181.555.302,00		59.532.282.654,00	-1.649.272.648,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			28.328.596.660,00		27.483.512.737,00	-845.083.923,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			19.602.000,00		26.155.800,00	6.553.800,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	jumlah dokumen Perencanaan OPD yang tersusun Tepat Waktu	5 Dokumen	10.890.000,00	5 Dokumen	17.443.800,00	6.553.800,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Tepat waktu(LKJIP, lkpj, lppd, Monev),	4 Dokumen	8.712.000,00	4 Dokumen	8.712.000,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	2.570.188.536,00		2.660.633.586,00	90.445.050,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.558.734.236,00	14 bulan	2.649.019.236,00	90.285.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	1 Dokumen	3.382.500,00	1 Dokumen	3.382.500,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/semesteran skpd	2 Dokumen	5.042.400,00	2 Dokumen	5.042.400,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	jumlah laporan realisasi capaian /kinerja skpd(fisik dan keuangan)	4 Dokumen	3.029.400,00	4 Dokumen	3.189.450,00	160.050,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			797.640.000,00		787.412.000,00	-10.228.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai	81 stel	240.350.000,00	81 stel	265.100.000,00	24.750.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	36 orang/kali	557.290.000,00	36 orang/kali	522.312.000,00	-34.978.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			20.168.174.680,00		18.842.787.635,00	-1.325.387.045,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 jenis	78.697.685,00	21 jenis	105.647.685,00	26.950.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	200 meter	22.968.000,00	200 meter	22.968.000,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	29 jenis	101.870.700,00	29 jenis	85.926.500,00	-15.944.200,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor	44 jenis	1.257.063.500,00	44 jenis	506.141.900,00	-750.921.600,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	339.275.915,00	20 jenis	313.944.070,00	-25.331.845,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4600 exemplar	160.875.000,00	4600 exemplar	108.900.000,00	-51.975.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1000 orang/kali	18.207.423.880,00	1000 orang/kali	17.699.259.480,00	-508.164.400,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.715.516.000,00		1.800.959.250,00	85.443.250,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional	1 unit	17.600.000,00	1 unit	481.360.000,00	463.760.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan meubelair	12 unit	1.540.000.000,00	12 unit	1.120.880.350,00	-419.119.650,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan gedung kantor	2 jenis	157.916.000,00	2 jenis	198.718.900,00	40.802.900,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.274.466.244,00		2.233.386.960,00	-41.079.284,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang terlayani	3100 lembar	17.000.000,00	3100 lembar	17.000.000,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	605.960.244,00	12 Bulan	548.314.960,00	-57.645.284,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas kebersihan kantor	60 orang	1.651.506.000,00	60 orang	1.668.072.000,00	16.566.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			783.009.200,00		1.132.177.506,00	349.168.306,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	21 unit	464.094.000,00	21 unit	439.806.000,00	-24.288.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Operasional	23 unit	28.699.200,00	23 unit	27.787.500,00	-911.700,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kntr yang terpelihara	3 jenis	31.185.000,00	3 jenis	45.595.000,00	14.410.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang terpelihara	2 unit	187.000.000,00	2 unit	516.649.006,00	329.649.006,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kntr yang terpelihara	10 jenis	72.031.000,00	10 jenis	102.340.000,00	30.309.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			32.852.958.642,00		32.048.769.917,00	-804.188.725,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			2.006.294.400,00		2.132.880.000,00	126.585.600,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	jumlah raperda yang di bahas	15 Perda	2.006.294.400,00	15 Perda	1.832.880.000,00	-173.414.400,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah jasa konsultan hukum	2 Perda	0,00	2 Perda	300.000.000,00	300.000.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			154.440.000,00		154.440.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah hasil pembahasan KUA dan PPAS	3 rapat	30.888.000,00	3 rapat	30.888.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	4 rapat	30.888.000,00	4 rapat	30.888.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	jumlah hasil pembahasan APBD	4 rapat	30.888.000,00	4 rapat	30.888.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah hasil pembahasan APBD Perubahan	4 rapat	30.888.000,00	4 rapat	30.888.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 rapat	30.888.000,00	1 rapat	30.888.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2.039.468.000,00		1.144.740.000,00	-894.728.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kinerja Anggota DPRD	180 orang/kali	1.500.840.000,00	180 orang/kali	579.840.000,00	-921.000.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 kali	179.128.000,00	4 kali	174.900.000,00	-4.228.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah raperda yang di bahas	12 orang/kegiatan	5.500.000,00	12 orang/kegiatan	36.000.000,00	30.500.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah jasa tenaga ahli fraksi	7 orang/fraksi	354.000.000,00	7 orang/fraksi	354.000.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.634.283.090,00		1.634.283.090,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	jumlah dokumen reses	3 Kali	1.634.283.090,00	3 Kali	1.634.283.090,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			3.088.956.000,00		2.994.552.000,00	-94.404.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah Pimpinan DPRD yang Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	114 orang/kali	3.088.956.000,00	114 orang/kali	2.994.552.000,00	-94.404.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			22.252.718.552,00		22.306.141.352,00	53.422.800,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terbayarnya Gaji dan tunjangan Anggota DPRD	30 orang	21.807.218.552,00	30 orang	21.800.641.352,00	-6.577.200,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD	90 Stel	445.500.000,00	90 Stel	445.500.000,00	0,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kinerja Pimpinan dan anggota DPRD	30 orang	0,00	30 orang	60.000.000,00	60.000.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16	Layanan Administrasi DPRD			1.676.798.600,00		1.681.733.475,00	4.934.875,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitas rapat fraksi DPRD yang terlayani	49 rapat	87.120.000,00	49 rapat	36.036.000,00	-51.084.000,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah hasil rapat alat kelengkapan dewan	209 rapat	1.589.678.600,00	209 rapat	1.445.759.000,00	-143.919.600,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	0,00	12 bulan	199.938.475,00	199.938.475,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			96.651.719.838,00		72.461.998.685,72	-24.189.721.152,28
5.01	Perencanaan			8.208.308.134,00		8.068.426.539,98	-139.881.594,02
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			8.208.308.134,00		8.068.426.539,98	-139.881.594,02
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100	5.171.756.925,00	100	5.791.179.724,98	619.422.799,98
		Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100		100		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100		100		
		Tingkat kedisiplinan aparatur	100		100		
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	100		100		
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat lainnya	30		30		
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan dengan Kualitas Baik	100		100		
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.992.889,00		50.862.889,00	1.870.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	27.147.274,00	6 dokumen	27.972.274,00	825.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	3 dokumen	21.845.615,00	3 dokumen	22.890.615,00	1.045.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.808.704.092,00		3.990.455.091,98	181.750.999,98
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	14 bulan	3.709.639.212,00	14 bulan	3.891.390.211,98	181.750.999,98
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	9 Orang	84.192.000,00	9 Orang	84.192.000,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	7.531.590,00	1 dokumen	7.531.590,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	7.341.290,00	2 dokumen	7.341.290,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SKPD						
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			126.840.000,00		130.360.000,00	3.520.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Aparatur yang Menerima Pakaian Dinas	48 orang	37.840.000,00	48 orang	41.360.000,00	3.520.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	89.000.000,00	5 orang	89.000.000,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			417.156.314,00		494.932.114,00	77.775.800,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat kelistrikan	111 buah	6.513.144,00	111 buah	6.513.144,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	361 buah	12.749.000,00	361 buah	14.669.000,00	1.920.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibeli Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	506 buah 5600 kotak 1000 Kotak	135.337.620,00	506 buah 5600 kotak 1000 Kotak	155.883.420,00	20.545.800,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	38645 lembar	32.597.950,00	38645 lembar	33.147.950,00	550.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan bacaan yang tersedia	3 surat kabar	9.000.000,00	3 surat kabar	9.000.000,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 bulan	220.958.600,00	12 bulan	275.718.600,00	54.760.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			103.550.000,00		210.050.000,00	106.500.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	70.000.000,00	2 unit	75.000.000,00	5.000.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	10 unit	9.900.000,00	10 unit	13.200.000,00	3.300.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	23.650.000,00	2 unit	121.850.000,00	98.200.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			510.952.260,00		518.152.260,00	7.200.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat bermaterai yang tertayang	900 surat	4.500.000,00	900 surat	4.500.000,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Rekening Telpon,air,listrik, dan internet yang dibayar setiap bulan	4 rekening	338.452.260,00	4 rekening	338.452.260,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan jumlah pegawai harian lepas	1 OB 8 OB	168.000.000,00	1 OB 8 OB	175.200.000,00	7.200.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.561.370,00		396.367.370,00	240.806.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik jumlah kendaraan dinas yang berizin	16 unit 20 unit	111.286.370,00	16 unit 20 unit	141.642.370,00	30.356.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	88 unit	44.275.000,00	88 unit	54.725.000,00	10.450.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	0,00	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Bangunan Lainnya						
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			406.030.340,00		303.903.025,00	-102.127.315,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>			148.586.340,00		134.626.340,00	-13.960.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.01	<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	Jumlah laporan pelaksanaan rangkaian kelitbangan daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	87.263.270,00	1 dokumen	73.303.270,00	-13.960.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.03	<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>	Laporan Indeks Daya Saing daerah Kota Lubuklinggau	1 Dokumen	61.323.070,00	1 Dokumen	61.323.070,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>			122.252.955,00		0,00	-122.252.955,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03.02	<i>Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	Dokumen rekomendasi sektor ekonomi	1 dokumen	60.212.860,00	1 dokumen	0,00	-60.212.860,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03.04	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	Dokumen rekomendasi sektor ekonomi	1 dokumen	62.040.095,00	1 dokumen	0,00	-62.040.095,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>			135.191.045,00		169.276.685,00	34.085.640,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.04.01	<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah		43.605.520,00		0,00	-43.605.520,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.04.03	<i>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>	Indeks Inovasi Daerah	5000 indeks	69.344.225,00	5000 indeks	169.276.685,00	99.932.460,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.04.04	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kelitbangan	1 Laporan	22.241.300,00	1 Laporan	0,00	-22.241.300,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1.019.122.389,00		764.457.354,00	-254.665.035,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>			837.001.699,00		627.982.579,00	-209.019.120,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.01	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	arah Kebijakan Pembangunan 2022	1 Dokumen	60.677.850,00	1 Dokumen	45.451.025,00	-15.226.825,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	Dokumen hasil kesepakatan forum SKPD	1 dokumen	101.421.299,00	1 dokumen	76.126.739,00	-25.294.560,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.05	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	Dokumen Kesepakatan Musrenbang Revisi RPJMD Tingkat Kota Dokumen Kesepakatan Musrenbang RKPDP Tingkat Kota	1 dokumen 1 Dokumen	362.678.550,00	1 dokumen 1 Dokumen	272.283.315,00	-90.395.235,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.01.07	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dokumen Perubahan RPJMD Dokumen RKPDP Perubahan 2021 Dokumen RKPDP Tahun 2022	1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen	312.224.000,00	1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen	234.121.500,00	-78.102.500,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan</i>			55.076.705,00		40.922.425,00	-14.154.280,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>						
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.02.01	<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Laporan monitoring dan evaluasi Perencanaan program kegiatan	2 dokumen	55.076.705,00	2 dokumen	40.922.425,00	-14.154.280,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>			127.043.985,00		95.552.350,00	-31.491.635,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03.01	<i>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	Dokumen Analisa Data dan Informasi	1 Dokumen	56.232.990,00	1 Dokumen	42.459.600,00	-13.773.390,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 02.2.03.03	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah OPD yang di Bina Terkait Pemanfaatan Data dan Informasi	40 OPD/SKPD	70.810.995,00	40 OPD/SKPD	53.092.750,00	-17.718.245,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.611.398.480,00		1.208.886.436,00	-402.512.044,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>			736.100.790,00		551.950.716,00	-184.150.074,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Dokumen Arah kebijakan Bidang Pemerintahan	1 dokumen	64.343.999,00	1 dokumen	62.418.999,00	-1.925.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.02	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Nilai rata-rata aspek implementasi Rencana Kinerja Tahunan PD Bidang Pemerintahan 5.28 Nilai 8.81 nilai 4.4 Nilai Nilai rata-rata Aspek Kualitas Dokumen Rencana Kinerja Tahunan PD Bidang pemerintahan 1.76 Nilai 2.64 Nilai 3.52 Nilai Nilai rata-rata aspek kualitas perencanaan strategis PD bidang Pemerintahan Nilai rata-rata aspek pemenuhan renstra PD bidang pemerintahan Nilai rata-rata implementasi renstra PD bidang Pemerintahan Nilai Rata-rata Pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan PD Bidang Pemerintahan	5.28 Nilai 8.81 nilai 4.4 Nilai 1.76 Nilai 2.64 Nilai 3.52 Nilai	94.551.055,00 5.28 Nilai 8.81 nilai 4.4 Nilai 1.76 Nilai 2.64 Nilai 3.52 Nilai	55.537.855,00 5.28 Nilai 8.81 nilai 4.4 Nilai 1.76 Nilai 2.64 Nilai 3.52 Nilai	-39.013.200,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.03	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	persentase IKU PD bidang Pemerintahan memenuhi kriteria minimal persentase IKU PD bidang Pemerintahan per tingkat Eselon selaras per tingkatan persentase IKU PD pemerintahan Selaras dengan IKU KDH persentase PD bidang Pemerintahan Memiliki Dukungan IT dalam Pengukuran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	90.157.969,00 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	91.679.489,00 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.521.520,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kinerja Persentase PD Bidang pemerintahan Mempublikasikan IKU Unit Kerja Persentase PD Bidang pemerintahan Menerapkan Mekanisme Baku Pengumpulan Data Persentase PD Bidang pemerintahan Menerapkan PK per Tingkat Eselon					
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Dokumen Arah Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	72.291.963,00	1 Dokumen	0,00	-72.291.963,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Nilai Rata rata aspek implementasi Rencana Kinerja Tahunan PD bidang Pembangunan Manusia	5.28 %	85.083.480,00	5.28 %	74.547.930,00	-10.535.550,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.06	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Dokumen Arah Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	64.968.568,00	1 Dokumen	88.630.568,00	23.662.000,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Persentase IKU PD bidang Pembangunan Manusia Memenuhi kriteria Minimal	100%	66.615.711,00	100%	0,00	-66.615.711,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.01.08	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Persentase IKU PD bidang Pembangunan Manusia Memenuhi kriteria Minimal	100%	198.088.045,00	100%	179.135.875,00	-18.952.170,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>			509.271.600,00		382.435.905,00	-126.835.695,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.02.01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	dokumen arah kebijakan bidang perekonomian dan SDA	1 Dokumen	236.805.025,00	1 Dokumen	224.212.875,00	-12.592.150,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.02.02	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Dokumen perencanaan pembangunan PD Bidang perekonomian dan SDA	1 dokumen	202.042.790,00	1 dokumen	105.285.685,00	-96.757.105,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.02.07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	Dokumen Monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	70.423.785,00	1 Dokumen	52.937.345,00	-17.486.440,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>			366.026.090,00		274.499.815,00	-91.526.275,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.03.01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Dokumen arah kebijakan bidang Infrastruktur dan wilayah	1 Dokumen	138.954.380,00	1 Dokumen	85.760.380,00	-53.194.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.03.02	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	72.642.953,00	1 Dokumen	88.215.828,00	15.572.875,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.02 . 03.2.03.03	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Dokumen Monev terhadap penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang infrastruktur	1 Dokumen	154.428.757,00	1 Dokumen	100.523.607,00	-53.905.150,00
5.02	Keuangan			79.513.921.702,00		52.326.140.775,74	-27.187.780.926,26
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			70.206.477.564,00		41.638.232.667,74	-28.568.244.896,26
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			63.076.524.472,00		34.387.044.672,42	-28.689.479.799,58
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			53.732.619,00		113.876.238,00	60.143.619,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	jumlah dokumen perjanjian kinerja yang tersusun tepat	2 dokumen	22.484.715,00	2 dokumen	47.106.430,00	24.621.715,00
		jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen		
		jumlah dokumen renja yang tersusun tepat waktu	2 dokumen		2 dokumen		
		jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun tepat waktu	4 dokumen		4 dokumen		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	jumlah laporan capaian realisasi fisik keuangan skpd	2 laporan	17.060.379,00	2 laporan	36.257.758,00	19.197.379,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen KLJP yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	14.187.525,00	1 dokumen	30.512.050,00	16.324.525,00
		Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah dokumen LPPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah laporan monev per triwulan tepat waktu	4 laporan		4 laporan		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	61.658.870.679,00		30.979.630.392,42	-30.679.240.286,58
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	terbayarnya gaji dan tunjangan asn	14 bulan	61.477.655.836,00	14 bulan	30.795.245.549,42	-30.682.410.286,58
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	jasa administrasi keuangan	8 OB	141.998.000,00	8 OB	145.168.000,00	3.170.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan</i>	jumlah laporan keuangan CALK dan LRA	1 laporan	23.953.050,00	1 laporan	23.953.050,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	SKPD					
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	jumlah laporan bulanan / semesteran SKPD	1 laporan	15.263.793,00	1 laporan	15.263.793,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 orang	22.000.000,00	3 orang	22.000.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			494.268.518,00		1.137.441.386,00	643.172.868,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8 item	24.994.534,00	8 item	24.994.534,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	jumlah peralatan rumah tangga	20 item	20.400.000,00	20 item	20.400.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	jumlah alat tulis kantor	29 item	166.631.894,00	29 item	167.381.852,00	749.958,00
		Jumlah makan dan minum pegawai	9800 porsi		9800 porsi		
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	jumlah barang cetak dan penggandaan	9 item	35.840.090,00	9 item	67.645.000,00	31.804.910,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	jumlah bahan bacaan dan surat kabar	3 surat kabar	20.250.000,00	3 surat kabar	20.250.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	jumlah rapat - rapat koordinasi keluar daerah	58 kali	226.152.000,00	58 kali	836.770.000,00	610.618.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			114.600.000,00		957.450.000,00	842.850.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	1 unit	0,00	1 unit	420.000.000,00	420.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur	15 unit	0,00	15 unit	252.750.000,00	252.750.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	114.600.000,00	4 unit	284.700.000,00	170.100.000,00
		jumlah perlengkapan gedung kantor	3 unit		3 unit		
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			451.420.656,00		465.320.656,00	13.900.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	4000 lembar	7.500.000,00	4000 lembar	12.400.000,00	4.900.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	pembayaran rekening telp, listrik dan air	12 bulan	274.720.656,00	12 bulan	274.720.656,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jasa cleaning service	7 OB	169.200.000,00	7 OB	178.200.000,00	9.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			281.632.000,00		711.326.000,00	429.694.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	jumlah perpanjangan STNK	47 unit	100.500.000,00	47 unit	302.016.000,00	201.516.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29 unit	35.250.000,00	29 unit	56.710.000,00	21.460.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	145.882.000,00	1 unit	352.600.000,00	206.718.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			5.736.665.489,00		5.718.268.085,32	-18.397.403,68
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			952.364.660,00		1.017.564.660,00	65.200.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 dokumen	127.805.650,00	1 dokumen	127.805.650,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS-P	1 dokumen	249.494.775,00	1 dokumen	314.694.775,00	65.200.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Regulasi Perda dan Perkada APBD Tahun Anggaran	2 dokumen	110.927.090,00	2 dokumen	110.927.090,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	regulasi Perda dan Perkada Perubahan APBD Tahun Anggaran	2 dokumen	464.137.145,00	2 dokumen	464.137.145,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			520.856.889,00		520.856.889,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Penyerapan APBD	100 persen	90.814.515,00	100 persen	90.814.515,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya laporan penyerapan dan penyaluran dana transfer daerah	1 laporan	27.795.100,00	1 laporan	27.795.100,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 laporan	54.633.220,00	1 laporan	54.633.220,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Presentase pengelolaan gaji yang relevan, akurat dan lengkap	100 persen	95.473.790,00	100 persen	95.473.790,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan administrasi belanja hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah	469 laporan	134.708.664,00	469 laporan	134.708.664,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase OPD yang dibina untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen	117.431.600,00	100 persen	117.431.600,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.597.537.940,00		1.607.382.600,00	9.844.660,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan data pendapatan dan belanja daerah yang akuntabel	1 laporan	210.836.344,00	1 laporan	210.913.840,00	77.496,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	344.815.925,00	3 Dokumen	288.086.250,00	-56.729.675,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah laporan Semesteran dan laporan Keuangan Daerah	2 laporan	393.596.710,00	2 laporan	420.579.500,00	26.982.790,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK	1 laporan	299.450.495,00	1 laporan	335.823.100,00	36.372.605,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan yang akuntabel	100 persen	348.838.466,00	100 persen	351.979.910,00	3.141.444,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.500.000.000,00		2.392.800.736,32	-107.199.263,68
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Tak Terduga	1 Kegiatan	2.500.000.000,00	1 Kegiatan	2.392.800.736,32	-107.199.263,68
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			165.906.000,00		179.663.200,00	13.757.200,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terpelihara	1 sistem	165.906.000,00	1 sistem	179.663.200,00	13.757.200,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.393.287.603,00		1.532.919.910,00	139.632.307,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.393.287.603,00		1.532.919.910,00	139.632.307,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen kebutuhan barang/unit pemerintah kota lubuklinggau	1 dokumen	125.962.410,00	1 dokumen	125.962.410,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan barang /unit Pemerintah Kota Lubuklinggau	1 dokumen	137.916.758,00	1 dokumen	137.916.450,00	-308,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 laporan	419.798.240,00	1 laporan	417.441.600,00	-2.356.640,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Inventaris Aset Pemkot Lubuklinggau	86 buah	185.883.455,00	86 buah	185.875.100,00	-8.355,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Presentase Sertifikat tanah pemerintah kota lubuklinggau	100 persen	167.474.950,00	100 persen	309.472.750,00	141.997.800,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Nilai Aset Pemkot Lubuklinggau	1 dokumen	108.296.020,00	1 dokumen	108.295.880,00	-140,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Surat Keputusan Walikota tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 SK	247.955.770,00	4 SK	247.955.720,00	-50,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			9.307.444.138,00		10.687.908.108,00	1.380.463.970,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.952.112.895,00		8.180.518.545,00	1.228.405.650,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.982.995,00		9.243.355,00	-739.640,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	9.982.995,00	1 laporan	9.243.355,00	-739.640,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	5.399.696.235,00		6.519.606.235,00	1.119.910.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.307.444.235,00	12 bulan	6.439.234.235,00	1.131.790.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan	7 OB	92.252.000,00	7 OB	80.372.000,00	-11.880.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			250.674.836,00		229.522.836,00	-21.152.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah objek retribusi daerah baru	300 OP	59.855.443,00	300 OP	47.747.443,00	-12.108.000,00
		jumlah wajib pajak lainnya	250 WP		250 WP		
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah data retribusi daerah	1 laporan	70.006.008,00	1 laporan	60.962.008,00	-9.044.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah wajib pajak baru	500 WP	120.813.385,00	500 WP	120.813.385,00	0,00
		validasi data wajib pajak baru	265 WP		265 WP		
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			56.100.000,00		0,00	-56.100.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah raga aparatur	57 orang	56.100.000,00	57 orang	0,00	-56.100.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			326.092.770,00		370.969.251,00	44.876.481,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	17 item	9.031.000,00	17 item	9.031.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	29 item	103.662.570,00	29 item	154.408.991,00	50.746.421,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	9350 blok	35.255.000,00	9350 blok	2.530.000,00	-32.725.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan /surat kabar	3 surat kabar	9.000.000,00	3 surat kabar	15.750.000,00	6.750.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	32 kali	169.144.200,00	32 kali	189.249.260,00	20.105.060,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			376.065.000,00		407.365.000,00	31.300.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas kantor	10 unit	280.200.000,00	10 unit	285.000.000,00	4.800.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	9 unit	95.865.000,00	9 unit	122.365.000,00	26.500.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			283.961.204,00		378.685.013,00	94.723.809,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang bermaterai	250 surat	3.600.000,00	250 surat	3.600.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 bulan	137.561.204,00	2 bulan	232.285.013,00	94.723.809,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Cleaning Service	6 orang	142.800.000,00	6 orang	142.800.000,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			249.539.855,00		265.126.855,00	15.587.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	20 unit	215.967.855,00	20 unit	215.967.855,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	20 unit	33.572.000,00	20 unit	49.159.000,00	15.587.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.355.331.243,00		2.507.389.563,00	152.058.320,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>			2.355.331.243,00		2.507.389.563,00	152.058.320,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01	<i>Perencanaan pengelolaan pajak daerah</i>	jumlah perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 dokumen	165.665.750,00	1 dokumen	202.675.760,00	37.010.010,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.02	<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</i>	Persentase peningkatan dan Validasi data pelaporan omset wajib pajak	75 persen	94.711.280,00	75 persen	94.711.280,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.03	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	Jumlah wajib pajak yang dibina dan diberikan penyuluhan	500 wp	133.026.370,00	500 wp	155.610.170,00	22.583.800,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.04	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	Jumlah Sistem Informasi pajak berbasis online yang dikembangkan	1 sistem	321.561.800,00	1 sistem	344.738.000,00	23.176.200,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.05	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	jumlah objek PBB baru	300 OP	120.989.425,00	300 OP	120.989.425,00	0,00
		Jumlah Wajib Pajak Lainnya	250 WP		250 WP		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.06	<i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	jumlah sistem informasi pajak yang terpelihara	1 sistem	328.619.403,00	1 sistem	319.515.353,00	-9.104.050,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.07	<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>	jumlah penilaian pajak bumi dan PBBP2 serta BPHTB yang sesuai NJOP	1000 kali	188.068.085,00	1000 kali	180.472.685,00	-7.595.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.08	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	jumlah wajib pajak baru	500 WP	225.095.665,00	500 WP	319.697.605,00	94.601.940,00
		validasi data wajib pajak daerah yang baru	265 WP		265 WP		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.09	<i>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang terlayani	500 kali	87.404.140,00	500 kali	87.387.760,00	-16.380,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.10	<i>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>	Jumlah Dokumen Penertiban dan pemeriksaan pajak daerah	1 dokumen	296.855.430,00	1 dokumen	262.164.830,00	-34.690.600,00
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 persen		100 persen		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.11	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	pelunasan pajak daerah tepat waktu	100 persen	121.447.100,00	100 persen	113.625.100,00	-7.822.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.12	<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	jumlah aduan keberatan BPHTB yang ditindaklanjuti	4 laporan	140.175.650,00	4 laporan	140.175.650,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.13	<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	Jumlah laporan realisasi pendapatan PBB	1 laporan	50.991.455,00	1 laporan	84.906.255,00	33.914.800,00
		Persentase penerimaan pajak daerah	100 persen		100 persen		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.03 . 04.2.01.14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan</i>	persentase penerimaan pajak daerah dan	1 laporan	80.719.690,00	1 laporan	80.719.690,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	retribusi daerah					
5.03	Kepegawaian			8.929.490.002,00		12.067.431.370,00	3.137.941.368,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.929.490.002,00		12.067.431.370,00	3.137.941.368,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.549.669.599,00		8.045.879.342,00	3.496.209.743,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			12.499.740,00		12.499.740,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 dokumen	12.499.740,00	2 dokumen	12.499.740,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.275.826.161,00		3.425.775.161,00	149.949.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.179.490.161,00	12 bulan	3.312.275.161,00	132.785.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	10 OB	96.336.000,00	10 OB	113.500.000,00	17.164.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			592.322.426,00		573.516.201,00	-18.806.225,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 item	24.995.564,00	3 item	24.995.564,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 item	18.746.200,00	13 item	53.611.800,00	34.865.600,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	34 item	213.450.722,00	34 item	159.778.897,00	-53.671.825,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	9 item	76.242.540,00	9 item	76.242.540,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 item	9.000.000,00	3 item	9.000.000,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan	12 bulan	249.887.400,00	12 bulan	249.887.400,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			56.650.000,00		242.700.000,00	186.050.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah pengadaan mebel	1 paket	0,00	1 paket	98.700.000,00	98.700.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	56.650.000,00	1 paket	144.000.000,00	87.350.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			228.899.032,00		704.616.000,00	475.716.968,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Tersedianya Materai	2400 lembar	10.500.000,00	2400 lembar	10.500.000,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 rekening	92.399.032,00	4 rekening	434.916.000,00	342.516.968,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	3 orang	126.000.000,00	3 orang	259.200.000,00	133.200.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			383.472.240,00		586.772.240,00	203.300.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</i>	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	31 unit	361.032.240,00	31 unit	361.032.240,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>						
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Tersedianya peralatan kantor yang terpelihara	33 unit	22.440.000,00	33 unit	25.740.000,00	3.300.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	0,00	1 gedung	200.000.000,00	200.000.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>			0,00		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.10.01	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>			0,00		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02	Program Kepegawaian Daerah			1.159.401.358,00		1.585.904.983,00	426.503.625,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>			688.677.260,00		892.914.485,00	204.237.225,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02	<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	Dokumen kebutuhan Pegawai	1 dokumen	28.500.030,00	1 dokumen	17.082.030,00	-11.418.000,00
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 persen		85 persen		
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	persentase pemenuhan kebutuhan ASN	85 persen	214.754.135,00	85 persen	236.254.135,00	21.500.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06	<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	persentase usulan pensiun yang dilayani sesuai SOP	100 persen	43.445.750,00	100 persen	45.583.175,00	2.137.425,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.08	<i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	Persentase ASN yang memiliki karis/karsu	90 persen	304.814.575,00	90 persen	304.814.575,00	0,00
		Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala	100 persen		100 persen		
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Jumlah layanan kepegawaian secara online	2 layanan	63.653.880,00	2 layanan	245.651.680,00	181.997.800,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11	<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	Dokumen bazetting jabatan fungsional	1 dokumen	33.508.890,00	1 dokumen	43.528.890,00	10.020.000,00
		Dokumen bazetting jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	1 dokumen		1 dokumen		
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>			368.350.163,00		512.977.563,00	144.627.400,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01	<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	persentase pemenuhan kebutuhan jabatan OPD	70 persen	47.476.698,00	70 persen	93.801.098,00	46.324.400,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	Persentase usulan kenaikan pangkat yang disetujui	90 persen	40.589.670,00	90 persen	57.342.670,00	16.753.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03	<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan tinggi dan administrasi	100 persen	280.283.795,00	100 persen	361.833.795,00	81.550.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>			30.576.675,00		55.509.675,00	24.933.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.14	<i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan ujian dinas	90 persen	30.576.675,00	90 persen	55.509.675,00	24.933.000,00
		Persentase pemenuhan aparatur pelayanan kepegawaian	80 persen		80 persen		
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional	100 persen	71.797.260,00	100 persen	124.503.260,00	52.706.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02	<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional	100 persen	37.241.985,00	100 persen	65.367.985,00	28.126.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.07	<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	dokumen evaluasi pengembangan jabatan fungsional	1 dokumen	34.555.275,00	1 dokumen	59.135.275,00	24.580.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			3.220.419.045,00		2.435.647.045,00	-784.772.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>			3.220.419.045,00		2.435.647.045,00	-784.772.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.07	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	persentase yang melaksanakan pengembangan kompetensi	100 persen	3.185.419.545,00	100 persen	2.390.147.545,00	-795.272.000,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.08	<i>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	dokumen evaluasi pengembangan kompetensi	1 dokumen	34.999.500,00	1 dokumen	45.499.500,00	10.500.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			6.685.165.300,00		7.112.682.760,00	427.517.460,00
6.01	Inspektorat			6.685.165.300,00		7.112.682.760,00	427.517.460,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat			6.685.165.300,00		7.112.682.760,00	427.517.460,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.603.946.920,00		5.015.704.380,00	411.757.460,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			26.400.000,00		23.520.000,00	-2.880.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokeumen perencanaan	2	26.400.000,00	2	23.520.000,00	-2.880.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.407.237.478,00		3.630.043.962,00	222.806.484,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.335.165.478,00	12 bulan	3.569.455.962,00	234.290.484,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			72.072.000,00		60.588.000,00	-11.484.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			109.168.000,00		104.480.000,00	-4.688.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			30.360.000,00		30.360.000,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal dan non formal	22 pegawai	78.808.000,00	22 pegawai	74.120.000,00	-4.688.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			434.608.126,00		843.900.896,00	409.292.770,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpakai	22 Item	6.576.800,00	22 Item	6.576.800,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	12	180.676.276,00	12	156.416.986,00	-24.259.290,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Item	47.427.050,00	7 Item	41.349.110,00	-6.077.940,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1000 Eksemplar	8.250.000,00	1000 Eksemplar	8.250.000,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri	83 kali	191.678.000,00	83 kali	631.308.000,00	439.630.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			270.050.000,00		14.850.000,00	-255.200.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1	255.200.000,00	1	0,00	-255.200.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	14.850.000,00	5 unit	14.850.000,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.029.636,00		117.280.092,00	8.250.456,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	12 bln	4.000.000,00	12 bln	4.000.000,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	3 Rek	57.029.636,00	3 Rek	65.280.092,00	8.250.456,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor	2 Org	48.000.000,00	2 Org	48.000.000,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			247.453.680,00		281.629.430,00	34.175.750,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dan motor dinas yang terpelihara	17 unit	195.710.400,00	17 unit	225.761.150,00	30.050.750,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dan motor dinas yang terpelihara	3 unit	9.113.880,00	3 unit	9.113.880,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	42.629.400,00	5 unit	46.754.400,00	4.125.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			1.444.656.600,00		1.497.802.600,00	53.146.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.025.044.000,00		1.019.448.000,00	-5.596.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Kinerja, audit operasional/belanja	10 LHP	810.926.750,00	10 LHP	806.776.750,00	-4.150.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Dokumen laporan hasil reviu	6 dokumen	214.117.250,00	6 dokumen	212.671.250,00	-1.446.000,00
		Persentase PD yang memiliki Data Kinerja Valid dan Terupdate secara berkala	80 persen		80 persen		
		Persentase PD yang memiliki Petugas	100 persen		100 persen		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		AKIP berkompetensi					
		Persentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh OPD	97 persen		97 persen		
		Rata-rata nilai capaian hasil Evaluasi AKIP PD	100 persen		100 persen		
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>			419.612.600,00		478.354.600,00	58.742.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	jumlah laporan gratifikasi	100 persen	165.862.600,00	100 persen	172.454.600,00	6.592.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	hibah tim siber pungli	1 kegiatan	253.750.000,00	1 kegiatan	305.900.000,00	52.150.000,00
		laporan hasil pemeriksaan khusus	22 LHP		22 LHP		
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			636.561.780,00		599.175.780,00	-37.386.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>			278.584.650,00		261.964.650,00	-16.620.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100 persen	29.617.150,00	100 persen	28.081.150,00	-1.536.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	Persentase APIP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 orang	248.967.500,00	5 orang	233.883.500,00	-15.084.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>			357.977.130,00		337.211.130,00	-20.766.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Persentase ASN yang memahami Aturan LHKASN	65 persen	313.972.130,00	65 persen	316.672.130,00	2.700.000,00
		Realisasi Penerapan Lingkungan Pengendalian Perangkat Daerah	95 unsur		95 unsur		
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Persentase Satgas ZI Unit Pelayanan yang Aktif	71 persen	44.005.000,00	71 persen	20.539.000,00	-23.466.000,00
		Persentase Unit Layanan ditetapkan menjadi Zona Integritas (ZI)	71 persen		71 persen		
7	UNSUR KEWILAYAHAN			45.757.229.916,00		47.477.217.880,00	1.719.987.964,00
7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			45.757.229.916,00		47.477.217.880,00	1.719.987.964,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Lubuklinggau Barat I			7.140.042.318,00		7.404.483.875,00	264.441.557,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.201.748.872,00		6.366.184.894,00	164.436.022,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	5.770.039.160,00		5.959.794.527,00	189.755.367,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.765.042.602,00	12 bulan	5.954.797.602,00	189.755.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4.996.558,00	5 Dokumen	4.996.925,00	367,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			10.285.000,00		10.200.000,00	-85.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	20 stel	10.285.000,00	20 stel	10.200.000,00	-85.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kelengkapannya</i>						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			164.247.345,00		139.578.000,00	-24.669.345,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Bahan logistik kantor	12	53.992.125,00	12	52.427.560,00	-1.564.565,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 item	20.853.580,00	3 item	20.675.000,00	-178.580,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	10 media/Bulan	6.000.000,00	10 media/Bulan	6.000.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	20 kali	83.401.640,00	20 kali	60.475.440,00	-22.926.200,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			40.260.000,00		40.200.000,00	-60.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	40.260.000,00	20 unit	40.200.000,00	-60.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			152.252.072,00		152.252.072,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Materai/Prangko	1000 Lembar	6.000.000,00	1000 Lembar	6.000.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	21.410.072,00	12 Bulan	21.410.072,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah jasa kebersihan	2 Orang/12 Bulan	124.842.000,00	2 Orang/12 Bulan	124.842.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			64.665.295,00		64.160.295,00	-505.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik	9 unit	54.710.295,00	9 unit	54.210.295,00	-500.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	45 item	9.955.000,00	45 item	9.950.000,00	-5.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			237.596.196,00		152.933.056,00	-84.663.140,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			237.596.196,00		152.933.056,00	-84.663.140,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kecamatan	11 Layanan	237.596.196,00	11 Layanan	152.933.056,00	-84.663.140,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			640.697.250,00		640.679.325,00	-17.925,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			640.697.250,00		640.679.325,00	-17.925,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Dokumen Musrenbang	12 Dokumen	37.972.000,00	12 Dokumen	37.976.000,00	4.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	66 Kelompok	602.725.250,00	66 Kelompok	602.703.325,00	-21.925,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		244.686.600,00	184.686.600,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		244.686.600,00	184.686.600,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 Petugas	60.000.000,00	5 Petugas	244.686.600,00	184.686.600,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Lubuklinggau Barat II			5.108.551.369,00		5.295.771.338,00	187.219.969,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.432.701.843,00		4.543.336.293,00	110.634.450,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.013.551.431,00		4.151.655.906,00	138.104.475,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.008.551.656,00	12 bulan	4.146.656.656,00	138.105.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4.999.775,00	5 Dokumen	4.999.250,00	-525,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			13.090.000,00		0,00	-13.090.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	85 stel	13.090.000,00	85 stel	0,00	-13.090.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			162.669.500,00		144.436.725,00	-18.232.775,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah kebutuhana Peralatan rumah tangga	11 item	6.289.800,00	11 item	5.718.000,00	-571.800,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Bahan logistik kantor	12	68.041.370,00	12	67.783.875,00	-257.495,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 item	7.172.330,00	2 item	7.350.850,00	178.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 media/12 Bulan	6.000.000,00	3 media/12 Bulan	6.000.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	20 kali	75.166.000,00	20 kali	57.584.000,00	-17.582.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			29.700.000,00		27.000.000,00	-2.700.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit	29.700.000,00	1 unit	27.000.000,00	-2.700.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			126.563.772,00		126.563.772,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Materai/Prangko	2335 Lembar	6.000.000,00	2335 Lembar	6.000.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	15.671.772,00	12 Bulan	15.671.772,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah jasa kebersihan	1 Orang/12 Bulan	104.892.000,00	1 Orang/12 Bulan	104.892.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			87.127.140,00		93.679.890,00	6.552.750,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</i>	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik	9 unit	76.732.140,00	9 unit	84.229.890,00	7.497.750,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	30 unit	10.395.000,00	30 unit	9.450.000,00	-945.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			163.936.532,00		106.114.350,00	-57.822.182,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			163.936.532,00		106.114.350,00	-57.822.182,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kecamatan	8 Layanan	163.936.532,00	8 Layanan	106.114.350,00	-57.822.182,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			451.912.994,00		449.205.745,00	-2.707.249,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			451.912.994,00		449.205.745,00	-2.707.249,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.02.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Dokumen Musrenbang	9 Dokumen	28.902.078,00	9 Dokumen	28.827.640,00	-74.438,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif	48 Kelompok	423.010.916,00	48 Kelompok	420.378.105,00	-2.632.811,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		197.114.950,00	137.114.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		197.114.950,00	137.114.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban	5 Petugas	60.000.000,00	5 Petugas	197.114.950,00	137.114.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Lubuklinggau Timur I			5.523.564.748,00		5.719.509.889,00	195.945.141,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.855.605.662,00		4.961.815.219,00	106.209.557,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.999.930,00		4.236.450,00	236.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Perencanaan	5	3.999.930,00	5	4.236.450,00	236.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.393.569.208,00		4.543.049.208,00	149.480.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.393.569.208,00	12 bulan	4.543.049.208,00	149.480.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			86.060.000,00		35.400.000,00	-50.660.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas siap pakai	100	71.060.000,00	100	20.400.000,00	-50.660.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.813.134,00		154.836.171,00	51.023.037,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	1.878.642,00	6	1.887.856,00	9.214,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15	3.403.400,00	15	4.155.000,00	751.600,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	12	26.425.312,00	12	51.529.165,00	25.103.853,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	3	5.504.180,00	3	18.113.350,00	12.609.170,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	9.500.000,00	100	9.500.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	20	57.101.600,00	20	69.650.800,00	12.549.200,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.970.000,00		26.250.000,00	-31.720.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	100	57.970.000,00	100	26.250.000,00	-31.720.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.824.680,00		135.824.680,00	-5.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang terlayani	2000	10.000.000,00	2000	5.000.000,00	-5.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekenening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12	36.132.680,00	12	36.132.680,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1	94.692.000,00	1	94.692.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.368.710,00		62.218.710,00	-7.150.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah perawatan kendaraan dinas	60	65.518.710,00	60	57.218.710,00	-8.300.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perawatan peralatan gedung kantor		3.850.000,00		5.000.000,00	1.150.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			169.402.376,00		124.488.000,00	-44.914.376,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			169.402.376,00		124.488.000,00	-44.914.376,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kecamatan	11 layanan	169.402.376,00	11 layanan	124.488.000,00	-44.914.376,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			438.556.710,00		436.341.720,00	-2.214.990,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			438.556.710,00		436.341.720,00	-2.214.990,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Dokumen Musrenbang	9 Dokumen	29.909.820,00	9 Dokumen	28.842.620,00	-1.067.200,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pembangunan di Kelurahan</i>						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	48 kelompok	408.646.890,00	48 kelompok	407.499.100,00	-1.147.790,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		196.864.950,00	136.864.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		196.864.950,00	136.864.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 petugas	60.000.000,00	5 petugas	196.864.950,00	136.864.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Lubuklinggau Timur II			5.671.366.231,00		5.881.479.848,00	210.113.617,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.819.494.810,00		4.926.994.518,00	107.499.708,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.397.496.391,00		4.547.123.266,00	149.626.875,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.392.424.566,00	12 bulan	4.542.034.566,00	149.610.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Perencanaan	5 dokumen	5.071.825,00	5 dokumen	5.088.700,00	16.875,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			43.700.000,00		17.000.000,00	-26.700.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas siap pakai	100%	18.700.000,00	100%	17.000.000,00	-1.700.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	25.000.000,00	3 orang	0,00	-25.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			142.830.777,00		142.953.610,00	122.833,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100%	5.511.000,00	100%	4.921.000,00	-590.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	12 jenis	50.117.667,00	12 jenis	49.555.460,00	-562.207,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah cetak dan penggandaan	3 item	4.457.310,00	3 item	5.094.350,00	637.040,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	10.250.000,00	100%	12.500.000,00	2.250.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	18 kali	72.494.800,00	18 kali	70.882.800,00	-1.612.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			164.838.302,00		150.938.302,00	-13.900.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat masuk dan keluar yang terlayani	2000 lembar	11.700.000,00	2000 lembar	2.000.000,00	-9.700.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	19.446.302,00	12 bulan	19.446.302,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 item	133.692.000,00	4 item	129.492.000,00	-4.200.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			70.629.340,00		68.979.340,00	-1.650.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	jumlah perawatan kendaraan dinas	60%	70.629.340,00	60%	68.979.340,00	-1.650.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			192.355.355,00		140.717.935,00	-51.637.420,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			192.355.355,00		140.717.935,00	-51.637.420,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kecamatan	9 layanan	192.355.355,00	9 layanan	140.717.935,00	-51.637.420,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			599.516.066,00		595.261.895,00	-4.254.171,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			599.516.066,00		595.261.895,00	-4.254.171,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.02.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Dokumen Musrenbang	10 dokumen	32.000.451,00	10 dokumen	32.796.500,00	796.049,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	54 kelompok	567.515.615,00	54 kelompok	562.465.395,00	-5.050.220,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		218.505.500,00	158.505.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		218.505.500,00	158.505.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 petugas	60.000.000,00	5 petugas	218.505.500,00	158.505.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Lubuklinggau Utara I			5.587.215.041,00		5.824.551.771,00	237.336.730,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.857.639.753,00		5.008.768.321,00	151.128.568,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.442.215.283,00		4.610.286.793,00	168.071.510,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.437.215.343,00	12 bulan	4.605.755.343,00	168.540.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5	4.999.940,00	5	4.531.450,00	-468.490,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			14.025.000,00		17.000.000,00	2.975.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	85 stel	14.025.000,00	85 stel	17.000.000,00	2.975.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			173.547.780,00		160.337.255,00	-13.210.525,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik penerangan bangunan kantor	7 item	3.702.450,00	7 item	3.135.290,00	-567.160,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	22 item	10.301.500,00	22 item	8.633.100,00	-1.668.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaa bahan logistik kantor	12 jenis	67.369.115,00	12 jenis	60.860.025,00	-6.509.090,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 item	8.039.075,00	3 item	8.447.200,00	408.125,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 media/Bulan	3.300.000,00	3 media/Bulan	3.000.000,00	-300.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	20 kali	80.835.640,00	20 kali	76.261.640,00	-4.574.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.600.000,00		8.500.083,00	1.900.083,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	3 unit	6.600.000,00	3 unit	8.500.083,00	1.900.083,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146.063.520,00		139.063.520,00	-7.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko	2000 lembar	6.000.000,00	2000 lembar	3.500.000,00	-2.500.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	18.671.520,00	12 bulan	18.671.520,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan	2 Orang/12 anggota/bln	121.392.000,00	2 Orang/12 anggota/bln	116.892.000,00	-4.500.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.188.170,00		73.580.670,00	-1.607.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik	9 unit	67.955.670,00	9 unit	64.655.670,00	-3.300.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	3 unit	7.232.500,00	3 unit	8.925.000,00	1.692.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			219.997.983,00		150.302.520,00	-69.695.463,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			219.997.983,00		150.302.520,00	-69.695.463,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	11	219.997.983,00	11	150.302.520,00	-69.695.463,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			449.577.305,00		444.684.880,00	-4.892.425,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			449.577.305,00		444.684.880,00	-4.892.425,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	36.397.055,00	1	36.657.380,00	260.325,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat	70	413.180.250,00	70	408.027.500,00	-5.152.750,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		220.796.050,00	160.796.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		220.796.050,00	160.796.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban	5	60.000.000,00	5	220.796.050,00	160.796.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Lubuklinggau Utara II			6.259.620.741,00		6.488.476.791,00	228.856.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.303.403.708,00		5.405.529.478,00	102.125.770,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.824.587.473,00		4.998.964.778,00	174.377.305,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.809.621.043,00	12 bulan	4.985.581.043,00	175.960.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Laporan Keuangan	2	14.966.430,00	2	13.383.735,00	-1.582.695,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			212.660.635,00		163.801.500,00	-48.859.135,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	15 jenis	93.222.635,00	15 jenis	54.747.850,00	-38.474.785,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah cetak dan penggandaan	13 jenis	25.366.000,00	13 jenis	24.860.000,00	-506.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 media	24.000.000,00	3 media	26.361.650,00	2.361.650,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	70.072.000,00	10 Kali	57.832.000,00	-12.240.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			28.160.000,00		25.600.000,00	-2.560.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah Peralatan Kantor	2 Unit	28.160.000,00	2 Unit	25.600.000,00	-2.560.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			169.962.400,00		152.780.000,00	-17.182.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat masuk dan keluar yang terlayani	800 Lembar	12.000.000,00	800 Lembar	12.000.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekenening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	26.552.400,00	12 Bulan	15.336.000,00	-11.216.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			15.730.000,00		15.500.000,00	-230.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah jasa administrasi keuangan	6 Orang	115.680.000,00	6 Orang	109.944.000,00	-5.736.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			68.033.200,00		64.383.200,00	-3.650.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	jumlah perawatan kendaraan dinas	60	68.033.200,00	60	64.383.200,00	-3.650.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Jabatan</i>						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			359.044.270,00		289.432.500,00	-69.611.770,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			359.044.270,00		289.432.500,00	-69.611.770,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kecamatan	9	359.044.270,00	9	289.432.500,00	-69.611.770,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			537.172.763,00		564.618.763,00	27.446.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			537.172.763,00		564.618.763,00	27.446.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Dokumen Musrenbang	11	35.572.763,00	11	35.572.763,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	54	501.600.000,00	54	529.046.000,00	27.446.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		228.896.050,00	168.896.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)</i>			60.000.000,00		228.896.050,00	168.896.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.03.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5	60.000.000,00	5	228.896.050,00	168.896.050,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I			4.572.000.838,00		4.736.025.238,00	164.024.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.003.842.283,00		4.048.681.803,00	44.839.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.020.500,00		5.352.000,00	1.331.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dokumen Kinerja PD	2	4.020.500,00	2	5.352.000,00	1.331.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	3.447.001.148,00		3.578.601.148,00	131.600.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.447.001.148,00	12 bulan	3.578.601.148,00	131.600.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			20.000.000,00		0,00	-20.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	2 Orang	0,00	-20.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			258.581.245,00		181.696.975,00	-76.884.270,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Rekenening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	6.997.992,00	12 Bulan	8.272.855,00	1.274.863,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah peralatan rumah tangga	77 item	6.666.000,00	77 item	12.265.850,00	5.599.850,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah pengadaa bahan logistik kantor	12 jenis	99.713.653,00	12 jenis	64.552.270,00	-35.161.383,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Kec. Llg.Selatan II	13.613.600,00	Kec. Llg.Selatan II	7.955.000,00	-5.658.600,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 media	18.000.000,00	3 media	11.340.000,00	-6.660.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	113.590.000,00	10 Kali	77.311.000,00	-36.279.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39.820.000,00		30.500.000,00	-9.320.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan Kantor	2 Unit	39.820.000,00	2 Unit	30.500.000,00	-9.320.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			167.388.000,00		158.170.380,00	-9.217.620,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang terlayani	800 Lembar	4.500.000,00	800 Lembar	4.500.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	24.228.000,00	12 Bulan	27.598.380,00	3.370.380,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan	6 Orang	138.660.000,00	6 Orang	126.072.000,00	-12.588.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.031.390,00		94.361.300,00	27.329.910,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perpanjangan STNK	9 unit	62.246.390,00	9 unit	60.111.300,00	-2.135.090,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perawatan gedung kantor	9 unit	4.785.000,00	9 unit	2.950.000,00	-1.835.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		31.300.000,00	31.300.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			108.261.420,00		103.816.900,00	-4.444.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kecamatan	13 Layanan	108.261.420,00	13 Layanan	103.816.900,00	-4.444.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			108.261.420,00		103.816.900,00	-4.444.520,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			399.897.135,00		401.102.135,00	1.205.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			399.897.135,00		401.102.135,00	1.205.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang	8 Dokumen	27.269.000,00	8 Dokumen	23.224.000,00	-4.045.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	35 Kelompok	372.628.135,00	35 Kelompok	377.878.135,00	5.250.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan			60.000.000,00		182.424.400,00	122.424.400,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketertiban Umum						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		182.424.400,00	122.424.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 Petugas	60.000.000,00	5 Petugas	182.424.400,00	122.424.400,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II			5.894.868.630,00		6.126.919.130,00	232.050.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.189.798.395,00		5.301.447.306,00	111.648.911,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.999.578,00		3.641.980,00	-357.598,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dokumen Kinerja PD	2	3.999.578,00	2	3.641.980,00	-357.598,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	4.789.870.967,00		4.958.565.967,00	168.695.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.789.870.967,00	12 bulan	4.958.565.967,00	168.695.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			44.000.000,00		0,00	-44.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	44.000.000,00	1 Orang	0,00	-44.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			161.047.805,00		144.705.550,00	-16.342.255,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Rekenening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	1.512.500,00	12 Bulan	1.330.000,00	-182.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah peralatan rumah tangga	77 item	2.887.500,00	77 item	2.625.000,00	-262.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah pengadaa bahan logistik kantor	12 jenis	39.255.150,00	12 jenis	25.121.500,00	-14.133.650,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah cetak dan penggandaan	20 unit	9.499.655,00	20 unit	8.636.050,00	-863.605,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 media	9.900.000,00	3 media	9.000.000,00	-900.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	97.993.000,00	10 Kali	97.993.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			123.576.000,00		132.984.000,00	9.408.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat masuk dan keluar yang terlayani	600 Lembar	6.000.000,00	600 Lembar	3.000.000,00	-3.000.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekenening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	32.352.000,00	12 Bulan	32.352.000,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			85.224.000,00		97.632.000,00	12.408.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			67.304.045,00		61.549.809,00	-5.754.236,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	Jumlah Perpanjangan STNK	9 STNK	67.304.045,00	9 STNK	61.549.809,00	-5.754.236,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Jabatan</i>						
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			149.799.243,00		141.364.674,00	-8.434.569,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			149.799.243,00		141.364.674,00	-8.434.569,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	11 Layanan	149.799.243,00	11 Layanan	141.364.674,00	-8.434.569,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			495.270.992,00		472.351.650,00	-22.919.342,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			495.270.992,00		472.351.650,00	-22.919.342,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03.2.02.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Dokumen Musrenbang	9 Dokumen	22.488.092,00	9 Dokumen	12.261.250,00	-10.226.842,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	63 Kelompok	472.782.900,00	63 Kelompok	460.090.400,00	-12.692.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			60.000.000,00		211.755.500,00	151.755.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			60.000.000,00		211.755.500,00	151.755.500,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 Petugas	60.000.000,00	5 Petugas	211.755.500,00	151.755.500,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3.619.115.672,00		3.683.940.672,00	64.825.000,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik			3.619.115.672,00		3.683.940.672,00	64.825.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			3.619.115.672,00		3.683.940.672,00	64.825.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.183.417.722,00		2.134.479.722,00	-48.938.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1.340.711.216,00		1.395.504.216,00	54.793.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.260.767.216,00	12 bulan	1.319.592.216,00	58.825.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	79.944.000,00	12 bulan	75.912.000,00	-4.032.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			532.189.006,00		393.344.716,00	-138.844.290,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah materai	1400 lbr	13.629.396,00	1400 lbr	13.629.396,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	jumlah peralatan rumah tangga	590 bh	7.650.500,00	590 bh	8.450.500,00	800.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	590 bh	171.618.040,00	590 bh	81.471.040,00	-90.147.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan</i>	jumlah makanan dan minuman pegawai	14442 ktk	48.835.000,00	14442 ktk	48.835.000,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Pengadaan</i>						
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	590 bh	9.000.000,00	590 bh	9.000.000,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	40 kali	281.456.070,00	40 kali	231.958.780,00	-49.497.290,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			58.500.000,00		86.973.290,00	28.473.290,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah mebeleur	1 pkt	0,00	1 pkt	28.973.290,00	28.973.290,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan gedung kantor	1 pkt	58.500.000,00	1 pkt	58.000.000,00	-500.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			144.077.160,00		150.717.160,00	6.640.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah materai	1400 lbr	5.860.000,00	1400 lbr	1.500.000,00	-4.360.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening komunikasi, air dan listrik yang terbayar	4 rekening	48.417.160,00	4 rekening	48.417.160,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	JUmlah jasa kebersihan	6 org	89.800.000,00	6 org	100.800.000,00	11.000.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			107.940.340,00		107.940.340,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Perpanjangan STNK	12 unit	94.490.340,00	12 unit	94.490.340,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah kendaraan dinas/ops dalam kondisi baik	5 unit	13.450.000,00	5 unit	13.450.000,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			159.977.800,00		153.790.800,00	-6.187.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>			159.977.800,00		153.790.800,00	-6.187.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	Jumlah Pokja PPWK dan masyarakat yang terfasilitasi	80	159.977.800,00	80	153.790.800,00	-6.187.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			568.658.500,00		705.426.500,00	136.768.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan</i>			568.658.500,00		705.426.500,00	136.768.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>						
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	pemuda / pelajar / mahasiswa yang mengikuti pembinaan politik	70	568.658.500,00	70	705.426.500,00	136.768.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			93.045.600,00		91.429.600,00	-1.616.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>			93.045.600,00		91.429.600,00	-1.616.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	jumlah buku profil dan database parpol	16	93.045.600,00	16	91.429.600,00	-1.616.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			296.100.550,00		293.680.550,00	-2.420.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>			296.100.550,00		293.680.550,00	-2.420.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Jumlah Anggota FKUB yang berperan aktif dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	10	296.100.550,00	10	293.680.550,00	-2.420.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			317.915.500,00		305.133.500,00	-12.782.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			317.915.500,00		305.133.500,00	-12.782.000,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.02	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang</i>	Jumlah konflik yang tertangani oleh Tim Penanganan Konflik Sosial	5	73.095.500,00	5	66.929.500,00	-6.166.000,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	pemuda / pelajar / mahasiswa yang mengikuti pembinaan politik	70	244.820.000,00	70	238.204.000,00	-6.616.000,00

Tabel 5. 3. Program Kegiatan Penanganan Covid-19 Kota Lubuklinggau

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>
1	Meningkatkan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui program promotif dan preventif;	Melengkapi sarana dan prasarana pengendalian penyakit menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Item pengadaan sarana dan prasarana UPTD	1,357,573,000.00	
				Jumlah pusling single gardan		
				jumlah ambulans (unit)		
				Jumlah mobil promkes		
				Jumlah pengadaa alkes set umum		
				Jumlah pengadaan alkes set UGD		
				Jumlah pengadaaan set KIA dan KB		
				Jumlah pengadaan set persalinan (unit)		
				Jumlah pengadaan set promosi kesehatan (unit)		
				jumlah pengadaan set laboratorium puskesmas		
				jumlah pengadaan set rawat inap (unit)		
			jumlah pengadaan set ruang farmasi (unit)			
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah instalasi air bersih labkesda	46,913,086.00				
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik lainnya	12,151,623,031.93				
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah alkes pkm yg dikalibersi	97,004,550.00				

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah			
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>			
			Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dengan patokan WHO (2 dolar perkapita) Cakupan Pelayanan Distribusi Obat dan Logistik	1,199,685,590.12				
2	Meningkatkan daya tarik wisata dengan peningkatan objek wisat	Penyelenggaraan <i>event-event</i> dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif di dalam kawasan Daya Tarik Wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			321,322,724	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
			Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah partisipasi Mitra pariwisata dalam kegiatan pemerintah daerah					
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya pelatihan Berbasis Kompetensi Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar					
			Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi					
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Tersedianya Fasilitas/Sarana peningkatan produksi Ekonomi Kreatif					
			Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang dikembangkan potensinya					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					494,708,575	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota						
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan								

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi dg sarpras yg terpelihara		
				Jumlah fasilitas pariwisata yg dibangun		
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi	Pembinaan pelaku usaha pariwisata di Lokasi Destinasi Wisata		
3	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi dan fasilitas penempatan tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		-	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang dilatih	179,276,620	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Dinas Ketenagakerjaan
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan 100 Persen	262,248,565	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
			Job Fair/Bursa Kerja			
			Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja diserap melalui mekanisme AKAD	-	
4	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Penanganan kerawanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		433,977,520	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Informasi Harga Pangan Up to Date		
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri		
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah		
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	AKG energi & protein		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Dinas Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		51,615,600	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga rentan rawan pangan yang ditangani		
5	Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah layanan perijinan	Memper memudahkan akses layanan dan fasilitasi penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		88,000,000	
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		52,500,000	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Even Promosi Daerah Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		118,192,000	
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan yang diberikan (didukung 3 sistem pelayanan)		
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pemantauan		
JUMLAH					16,854,640,862	

BAB 6

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2021 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan Tahun APBD 2021. Perubahan RKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 disusun dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran serta sebagai wujud upaya mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara sinergis dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai tujuan pembangunan Kota Lubuklinggau.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

TTD

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE